

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG MELALUI COREMAP DI WAKATOBI :

**Peran Masyarakat dan Dampaknya
Terhadap Pendapatan**

DENY HIDAYATI
NGADI
RUSLI CAHYADI



COREMAP-LIPI

**PENGELOLAAN TERUMBU KARANG MELALUI COREMAP
DI WAKATOBI :**

**Peran Masyarakat dan Dampaknya
Terhadap Pendapatan**

Penulis :

Deny Hidayati
Ngadi
Rusli Cahyadi

Layout :

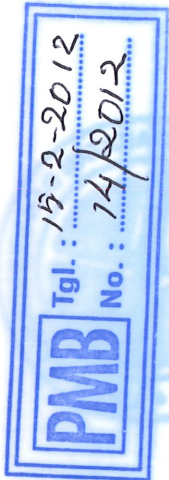
Nova Hendarto

Desain Cover :

Puji Hartana

ISBN :

978-602-8942-46-1



PT. LEUSER CITA PUSTAKA (Anggota IKAPI)
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 16, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7810076, Fax: (021) 7810076

Bekerjasama dengan



LIPI



COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI
Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948
Website: <http://oseanografi.lipi.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Coral Reef Rehabilitation and Management Program atau disingkat COREMAP merupakan program nasional yang telah memasuki Fase ke II. Program ini bertujuan untuk mengelola terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu lokasi COREMAP Fase II di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan COREMAP tahun 2005 ditandai oleh kegiatan sosialisasi dengan tujuan penyadaran masyarakat di lokasi-lokasi COREMAP, termasuk Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Kegiatan program ini telah berlangsung selama 3 tahun waktu kajian ini dilaksanakan tahun 2008 dan serangkaian kegiatan telah dan sedang dilakukan.

Buku ini merupakan hasil kajian dari aspek sosial ekonomi yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan COREMAP, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat lokasi dimana masyarakat terlibat secara langsung dalam pengelolaan terumbu karang. Pada buku ini juga dibahas kontribusi masyarakat dalam kegiatan COREMAP, digambarkan dari partisipasi mereka dalam rencana pengelolaan terumbu karang, pengembangan usaha ekonomi produktif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang merusak karang, dan pembangunan prasarana fisik desa/kelurahan yang mendukung pelestarian terumbu karang.

Penulisan buku ini dapat terlaksana dengan bantuan berbagai *stakeholders*. Kepada para informan: nelayan, pimpinan formal dan informal, tokoh masyarakat Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan pada semua pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survei. Terima kasih kami haturkan pada Motivator Desa (MD), pengurus LPSTK, pengurus LKM

COREMAP, dan Kepala Desa/Kelurahan beserta staff di semua lokasi kajian yang telah membantu dan memfasilitasi pengumpulan data dalam kajian ini. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, PMU dan semua Komponen COREMAP Kabupaten Wakatobi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, November 2011

Penulis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Wakatobi merupakan lokasi program penyelamatan terumbu karang atau Coremap Fase II. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Kajian BME Coremap diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu indikator keberhasilan program. Hasil BME juga menggambarkan semua kegiatan Coremap, capaian dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program sampai awal Mei 2008.

Kajian dilakukan di tiga lokasi Coremap Kabupaten Wakatobi yaitu di Pulau Wangi-Wangi, khususnya di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi. Ketiga lokasi dipilih secara purposive, merupakan lokasi pengumpulan data dasar Coremap, sehingga dampak program dapat dipantau di kabupaten ini.

Hasil BME menginformasikan bahwa pelaksanaan Coremap di Kabupaten Wakatobi telah mengalami perkembangan antara tahun 2006 dan 2008, meskipun belum optimal. Perkembangan pelaksanaan Coremap bervariasi, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat lokasi.

Pelaksanaan Coremap di tingkat kabupaten pada awalnya mengalami kendala dan keterlambatan, namun PMU berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Coremap pusat. Permasalahan Coremap berkaitan dengan kurang efektifnya pengelolaan program karena dominasi ‘aparatur’ tertentu, kurangnya koordinasi dengan *stakeholders*, kendala administrasi dan perubahan jumlah lokasi karena pemekaran desa/kelurahan.

Komponen-komponen Coremap, seperti PA, CBM, MCS dan CRITC telah berupaya melakukan tugas dan fungsinya, meskipun lebih terfokus pada kegiatan di tingkat kabupaten. Pembimbingan dan

pemantauan pelaksanaan program di lokasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya dana *sharing* untuk monitoring. Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang Coremap masih terbatas pada tujuan program, sedangkan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan dan mekanisme pelaksanaan Coremap masih sangat minim. Keadaan ini seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap program ini.

Organisasi pengelola Coremap telah terbentuk di semua lokasi kajian, LPSTK dan LKM di tingkat desa/kelurahan dan pokmas, kelompok jender dan pokmaswas di tingkat masyarakat. Pengelola Coremap belum berfungsi secara optimal. Peran LPSTK dalam penyusunan RPTK dan pengembangan DPL masih terbatas. Kegiatan LPSTK berkaitan dengan *village grant* juga tidak sepenuhnya mengacu pada RPTK, terutama di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan. Peran LKM dalam pengembangan UEP juga masih minim.

Pelatihan sudah dilakukan terhadap pengurus Coremap di ketiga lokasi kajian, tetapi jenis pelatihan tergantung pada Coremap Pusat dan PMU kabupaten, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pokmas/pokmaswas dan masyarakat di lokasi. Pelatihan diikuti oleh tokoh-tokoh tertentu saja, kurang melibatkan anggota pokmas. Waktu pelatihan sangat pendek, sehingga belum dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil pelatihan kurang ditindak lanjuti, berhenti setelah pelatihan selesai.

Pokmaswas belum sepenuhnya berperan di ketiga lokasi. Pokmaswas di Desa Mola Selatan belum melakukan kegiatan pengawasan dengan alasan tidak tersedianya armada dan biaya operasional. Sedangkan pokmaswas di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha sudah mulai beroperasi, meskipun belum optimal. Pemahaman Pokmaswas mengenai proses pengusulan dan penggunaan dana operasional masih kurang, karena itu dana tersebut belum jelas keberadaannya.

Peran pokmas, kelompok jender dan pokmaswas masih terbatas dan bervariasi antar lokasi. Pokmas di Desa Mola Selatan belum melakukan kegiatan UEP karena belum turunnya *seed fund*. Pokmas

di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha baru memulai kegiatan UEP, karena dana *seed fund* baru turun pada waktu kajian dilakukan. Pembagian dana pada anggota pokmas di Kelurahan Wandoka tidak transparan ditentukan oleh ketua lingkungan dengan alasan keterbatasan dana.

Dampak kegiatan UEP terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota pokmas dan kelompok jender juga masih sangat terbatas. Karena itu dampak kegiatan Coremap untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha dan belum dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Mola Selatan.

Hasil BME menginformasikan, meskipun bukan hasil langsung dari kegiatan Coremap, pendapatan per kapita penduduk Wakatobi mengalami peningkatan sebesar 49 persen, dari Rp 132.711 per bulan tahun 2006 menjadi Rp 197.720 per bulan tahun 2008. Pendapatan per kapita ini berada di atas garis kemiskinan Provinsi Sultra tahun 2006 (sebanyak Rp 172.995 per bulan) dan Kabupaten Wakatobi (Rp 151.941 per bulan). Peningkatan pendapatan per kapita bervariasi antar lokasi dengan pendapatan tertinggi terdapat di Kelurahan Wandoka dan pendapatan terendah terdapat di Desa Mola Selatan.

Pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan juga mengalami kenaikan sebanyak 49,6 persen dalam kurun dua tahun. Peningkatan rata-rata pendapatan bervariasi antar lokasi, persentase tertinggi terdapat pada rumah tangga di Desa Waha dan yang terendah di Desa Mola Selatan. Peningkatan pendapatan rumah tangga tertinggi mencapai hampir 200 persen terdapat pada rumah tangga yang bekerja di pengolahan/industri rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan yang menjadi fokus kegiatan Coremap, persentasenya jauh lebih kecil yaitu mencapai 70,4 persen. Persentase ini juga lebih kecil dari kenaikan pendapatan rumah tangga yang bekerja di bangunan (sebanyak 89 persen). Keadaan ini dapat dipahami karena Kabupaten Wakatobi, khususnya Pulau Wangi-Wangi merupakan lokasi ibukota kabupaten yang sedang gencar-gencarnya membangun perkantoran dan fasilitas publik.

Kenaikan pendapatan rumah tangga, jika dilihat dari distribusi besar pendapatan, terjadi pada sebagian kecil masyarakat yaitu kelompok rumah tangga berpendapatan di atas satu juta rupiah. Sebaliknya, rumah tangga berpendapatan rendah, kurang dari satu juta rupiah, proporsinya masih cukup besar meskipun cenderung mengalami penurunan dari 87,0 persen tahun 2006 menjadi 63,0 persen tahun 2008.

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan di Wakatobi juga mengalami peningkatan sebesar 50,3 persen, dari Rp 537.253 tahun 2006 menjadi Rp 807.237 tahun 2008. Peningkatan pendapatan terjadi di ketiga lokasi kajian dengan besaran yang bervariasi antar lokasi. Rumah tangga nelayan memperoleh pendapatan terbanyak pada musim gelombang lemah atau musim teduh dan sebaliknya, pendapatan terendah diperoleh pada musim gelombang kuat, disebabkan oleh sebagian besar nelayan tidak dapat melaut karena keterbatasan armada tangkap. Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan ini berkaitan erat dengan meningkatnya harga hasil perikanan di Wakatobi.

Peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi Coremap ternyata hampir sama dengan peningkatan pendapatan normal ditingkat Kabupaten Wakatobi. Peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi Coremap terutama dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro tingkat kabupaten, bukan oleh kegiatan Coremap yang implementasinya belum dilakukan secara optimal. Meskipun mengalami peningkatan pendapatan, secara umum tingkat kesejahteraan penduduk tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian penduduk merasa lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar rumah tangga di kabupaten ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK DAN FOTO	xiii
DAFTAR PETA DAN DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Potensi dan Degradasi Terumbu Karang	1
1.2. Prioritas Kegiatan Ekonomi dari Laut.....	5
1.3. Upaya Pengelolaan Melalui COREMAP	8
1.4. Pembabakan Penulisan.....	10
BAB II COREMAP: PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DENGAN PENDEKATAN <i>TOP-DOWN & BOTTOM-UP</i>	
2.1. Pengembangan Coremap.....	13
2.2. Pengelolaan Ditingkat Kabupaten.....	14
2.2.1. PMU	14
2.2.2. Komponen <i>Public Awareness (PA)</i>	15
2.2.3. Komponen <i>Community-Based Management (CBM)</i>	17
2.2.4. Komponen <i>Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)</i>	19
2.2.5. <i>Coral Reef Research, Information and Training Center (CRITC)</i>	20
2.3. Pengelolaan di Tingkat Lokasi.....	22
2.3.1. Kelembagaan COREMAP	23
2.3.2. Kegiatan COREMAP	36

BAB III	PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN COREMAP	
3.1.	Pengetahuan Tentang Keberadaan COREMAP dan Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang.....	57
3.2.	Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Kegiatan- Kegiatan COREMAP	58
3.3.	Manfaat COREMAP Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat	62
BAB IV	PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT	
4.1.	Pendapatan di Tingkat Kabupaten/Kota	69
4.2.	Pendapatan Penduduk di Lokasi COREMAP.....	72
4.2.1	Pendapatan Rumah Tangga (RT).....	72
4.2.2	Pendapatan Menurut Lapangan Pekerjaan....	79
4.2.3	Pendapatan Menurut Kegiatan Kenelayanan	83
4.3.	Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan....	90
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Perkembangan COREMAP di Tingkat Kabupaten	97
5.2	Perkembangan COREMAP Di Tingkat Lokasi.....	99
5.3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	105
5.4.	Rekomendasi	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pokmas/Jender dan Pokmaswas di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2008	34
Tabel 3.1. Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Ekonomi yang Dilakukan COREMAP dan Manfaatnya Bagi Masyarakat (Persentase Responden yang Menjawab ‘Ya’).....	63
Tabel 3.2. Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Usaha dari Kegiatan COREMAP dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha (Persentase Responden yang Menjawab ‘Ya’).....	64
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wakatobi menurut Lapangan Pekerjaan atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (Jutaan Rp).....	70
Tabel 4.2. Jumlah dan Persentase Keluarga Miskin di Wakatobi, Tahun 2004.....	71
Tabel 4.3. Statistik Pendapatan Penduduk di Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008	74
Tabel 4.4. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pendapatan dan Desa/Kelurahan , Kabupaten Wakatobi, 2006 dan 2008 (Persen).....	78
Tabel 4.5. Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan KRT Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008	80
Tabel 4.6. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008	84

Tabel 4.7. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008..... 86

Tabel 4.8. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Kabupaten Wakatobi 2006 dan 2008 (Persen)..... 89

Tabel 4.9. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Desa, Kabupaten Wakatobi , Tahun 2006 dan 2008 (Persen) 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Seorang Perempuan Desa Mola Selatan Sedang Batu Karang Untuk Bahan Bangunan.....	4
Gambar 1.2.	Brosur Kegiatan Pariwisata Wakatobi.....	7
Gambar 2.1.	Susunan Pengurus LPSTK.....	24
Gambar 2.2.	Susunan LPSTK dan LKM Desa Waha.....	25
Gambar 2.3.	Tong Sampah di Mola Selatan.....	27
Gambar 2.4.	Lokasi DPL di Wandoka	38
Gambar 2.5.	Pondok Informasi di Mola Selatan	43
Gambar 2.6.	Pondok Informasi di Wandoka	44
Gambar 2.7.	Pondok Informasi di Waha	45

DAFTAR PETA DAN DIAGRAM

Peta 1.	Wilayah Kabupaten Wakatobi.....	2
Diagram 3.1.	Persentase Responden Menurut Pengetahuan tentang Keberadaan COREMAP dan Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang	58
Diagram 3.2.	Persentase Responden Menurut Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran, Pengawasan, Pembentukan LPSTK dan Penyusunan RPTK.....	59
Diagram 3.3	Persentase Responden Menurut Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Pelatihan dan Pendampingan UEP.....	61
Diagram 3.4.	Persentase Responden Menurut Pendapat tentang Kondisi Ekonomi Keluarga Sekarang dan Sebelum Adanya COREMAP	66
Diagram 4.1.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 (Persen).....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Potensi dan Degradasi Terumbu Karang

Kabupaten Wakatobi baru terbentuk tahun 2004 merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Kabupaten ini sebagian besar terdiri dari laut, mencapai luas 55.113 km² (98,5 persen). Nama Wakatobi berasal dari singkatan empat nama pulau besar di wilayah ini, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Kabupaten yang dulunya dikenal dengan nama Kepulauan Tukang Besi ini terdiri dari 48 pulau (sumber lain menyebutkan 33 pulau dan 25 diantaranya tidak dihuni) yang berimpitan dengan wilayah Taman Nasional Laut Wakatobi (Bappeda Kabupaten Wakatobi, 2006). Semua pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi adalah pulau yang terbentuk dari karang.

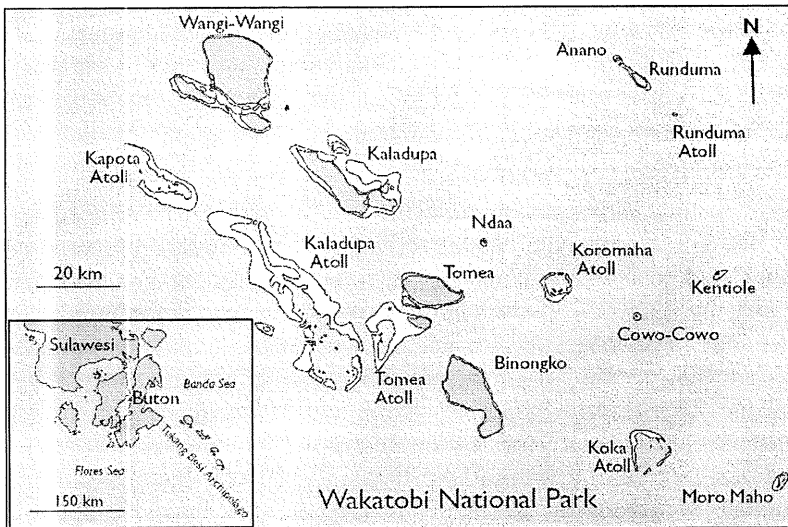
Kabupaten Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga dikatakan terlengkap di dunia. Wilayah ini memiliki 900 jenis ikan. Wakatobi juga sangat kaya akan terumbu karang terdiri dari 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia dengan luas 90.000 hektar, dikenal sebagai segitiga karang dunia. WWF Indonesia tahun 2003 mencatat 396 spesies karang *scleractinia hermatipic* yang terbagi dalam 68 genus dan 15 famili. Survei juga mencatat 10 spesies dari spesies karang keras non *scleractinia* atau *hermatipic* dan 28 genera karang lunak. Wakatobi memiliki atol terpanjang di dunia, yaitu Atol Kaledupa (48 km) (Bappeda Kabupaten Wakatobi, 2006; Hidayati dan Rahmawati, 2003, COREMAP LIPI, 2007, dan Nontji, 2001).

Kekayaan terumbu karang mengindikasikan kekayaan biota laut di perairan Wakatobi. Biota laut yang sangat potensial antara lain ikan, kima, lola, dan penyu. Jenis ikan yang banyak ditemukan *Abudefduf leucogaster*, *A. saxatilis*, *Acanthurus achilles*, *A. aliosa*, *A.*

mata, *Amphiprion tricoloratus*, *Chaetodon speculum*, *Chelinus undulatus*, *Chelmon rostratus*, *Heniochus acuminatus*, *H. permutatus*, *Macolor macularis* (snapper), Napoleon wrasse, *Paramia quinquelineata*, *Scarus qibbus*, *S. taeniurus*, dan masih banyak lagi (WWF, 2003).

Terumbu karang tersebar di seluruh wilayah, membentang dari kawasan karang Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Kawasan karang yang luas antara lain terdapat di Karang Kapota, Karang Kaledupa, Karang Koromaha, Karang Koka, Karang Runduma, Tolandono, Ndaa, Cowo-cowo, Moromaho, Kentiole dan Anano (peta 1.1).

Peta 1.1. Wilayah Kabupaten Wakatobi



Sumber: Duncan May (2005)

Jenis karang bervariasi antar kawasan dan pulau. Di Pulau Wangi-Wangi kawasan karang yang dominan adalah *Thalassodendron ciliatum* yang menutupi separoh dari dasar perairan di pulau ini. Sedangkan pada bagian yang landai, karang yang dominan adalah

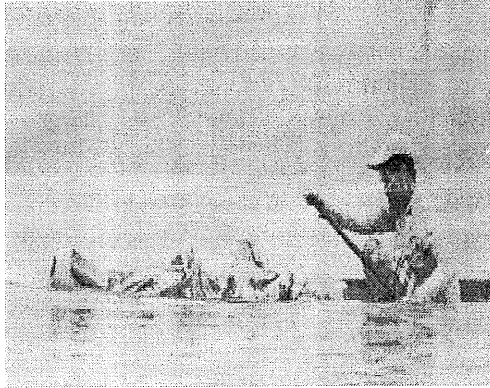
Montipora digitata, *Porites cylindrica* dan *Goniastrea retiformis*, dan pada bagian tubir karangnya lebih bervariasi, seperti: *Acropora spp*, *Montipora spp*, *Porites spp*, dan *Stylophora pistillata* (Opwal, WWF, 2003).

Kondisi terumbu karang bervariasi menurut kawasan dan berfluktuasi menurut waktu. Kondisi karang yang paling baik terdapat pada atol bagian timur, dan keragaman spesies karang yang paling tinggi dijumpai di Tomia bagian barat laut. Sedangkan komunitas karang paling tidak umum dan kelimpahan spesies langka yang paling tinggi terdapat di laguna Karang Kaledupa (Haapkylä dkk, 2007)

Secara umum kondisi terumbu karang di 33 stasiun, menurut hasil survei REA (2003), berada dalam keadaan baik. Tetapi hasil survei CRITC LIPI di 52 stasiun tahun 2006 menggambarkan kondisi karang berada pada kategori sedang, berarti mengalami penurunan dari kondisi sebelumnya. Keadaan ini diindikasikan oleh tutupan karang hidup rata-rata mencapai 31 persen yang terdapat di Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa dan Tomia. Tutupan karang yang bervariasi antar pulau dengan persentase tutupan karang hidup rata-rata terendah terdapat di Pulau Wangi-Wangi yaitu sebesar 27 persen dan yang tertinggi di Pulau Tomia sebesar 44 persen, sedangkan di Pulau Kaledupa kondisi karangnya berada diantara kedua pulau tersebut (P2O-LIPI, 2007).

Penurunan kategori terumbu karang di Kabupaten Wakatobi mengindikasikan bahwa terumbu karang telah mengalami degradasi. Terumbu karang di kawasan Wakatobi mendapat tekanan yang cukup tinggi, utamanya berasal dari eksploitasi terumbu karang menggunakan bahan dan alat yang merusak dan penambangan batu karang dan pasir (Hidayati dan Rahmawati, 2003; COREMAP LIPI, 2008). Pemanfaatan sumber daya laut ini dilakukan secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama, baik oleh masyarakat setempat maupun nelayan dari luar daerah. Degradasi ini sebetulnya sangat disayangkan mengingat Kabupaten Wakatobi termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Laut Wakatobi.

Kerusakan karang, walau pada tingkat yang relatif rendah, disebabkan oleh tiga hal yaitu penggunaan bahan peledak, serangan mahkota berduri dan pemutihan (bleaching). Penggunaan bahan beracun (sianida) tampak terjadi pula di banyak tempat, walau dampak langsung pada karang belum diobservasi. (Hidayati dan Rahmawati, 2003; P2O-LIPI, 2007; COREMAP LIPI, 2008)



Gambar 1.1. Seorang Perempuan Desa Mola Selatan Sedang Batu Karang Untuk Bahan Bangunan.

Selain itu, karang laut biasa digunakan sebagai bahan untuk pondasi rumah, jalan maupun penutup pantai sehingga menjadi daratan. Sebagian besar daratan Desa Mola Selatan dan Mola Utara adalah hasil reklamasi dengan bahan dasar batu karang. Penggunaan batu karang untuk bangunan sangat dominan, dikarenakan sulitnya mendapatkan batuan gunung sebagai bahan bangunan.

Kondisi terumbu karang kemudian cenderung mengalami perbaikan, diindikasikan dari hasil survei ekologi yang dilakukan CRITC LIPI tahun 2007. Tutupan karang mencapai 46,9 persen atau naik sekitar 15,9 persen dari persentase tutupan karang hasil survei tahun 2006. Tutupan karang tertinggi (75,9 persen) terdapat di kawasan karang Tomia dan sebaliknya tutupan karang terendah (23,1 persen) ditemukan di kawasan karang Kapota. Tutupan karang ini

terdiri dari jenis arcopora dan non arcopora. Perbaikan terumbu karang juga dikemukakan oleh Haapkylä dkk (2007) yang menginformasikan kecilnya angka penyakit karang.

Kekayaan sumber daya laut di Kabupaten Wakatobi merupakan aset yang sangat penting, karena itu wilayah Wakatobi ditetapkan menjadi Taman Wisata Alam Laut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 462/KPTS-II/1995. Setahun kemudian wilayah Wakatobi ditetapkan menjadi daerah konservasi dengan status Taman Nasional oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 393/KPTS-VI/1996 (Bappeda Kabupaten Wakatobi, 2006).

Ketergantungan pada terumbu karang dan sumber daya laut sangat tinggi untuk menopang kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah ini. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya daratan sangat terbatas mengingat semua pulau di Kabupaten Wakatobi adalah pulau yang terbentuk dari karang dengan jenis tanah yang bervariasi dari batuan kapur, pasir putih dan tanah lempung. Pulau-pulau di Wakatobi tidak memiliki cadangan air tanah permanen kecuali air yang terjebak dilubang-lubang tanah maupun gua.

Wakatobi kurang potensial untuk kegiatan pertanian. Wilayah ini, dengan kondisi tanah yang kering dan tipis serta curah hujan rendah, hanya cocok untuk *staple food* jenis singkong dan jagung serta ubi jalar, beberapa jenis tanaman tahunan (seperti bambu/rebung, nangka, kelapa dan jambu mete), dan beberapa jenis sayuran semusim (seperti kacang panjang, tomat dan terong), serta beberapa jenis buah-buahan (seperti nanas, pisang, dan mangga).

1.2. Prioritas Kegiatan Ekonomi dari Laut

Kabupaten Wakatobi dengan slogannya “Surga di Bawah Laut” mengandalkan sumber daya laut, terutama kekayaan dan keindahan terumbu karang, sebagai sumber utama pembangunan ekonomi. Pemerintah kabupaten telah menetapkan sektor perikanan laut dan pariwisata bahari sebagai sektor unggulan di kabupaten ini. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan kabupaten yaitu *terwujudnya surga nyata bawah laut di jantung segi tiga karang dunia*.

Perikanan

Kabupaten Wakatobi mempunyai potensi perikanan yang sangat besar. Kabupaten yang terletak di Taman Nasional Kepulauan Wakatobi (TNKW) memiliki 7 spot pemijahan ikan dengan 29 spesies ikan yang telah teridentifikasi. WWF (2003) mengidentifikasi sekitar 942 spesies ikan di wilayah Wakatobi. Famili-famili yang paling beragam spesiesnya antara lain jenis-jenis wrase (*Labridae*), damsel (*Pomacentridae*), kerapu (*Serranidae*), kepe-kepe (*Chaetodontidae*), surgeon (*Acanthuridae*), kakatua (*Scaridae*), cardinal (*Apogonidae*), kakap (*Lutjanidae*), squirrel (*Holocentridae*), dan angel (*Pomacanthidae*). Survei WWF juga menemukan sebanyak 647 ekor *Serranidae* dan 29 ekor Napoleon Wrasse *Chelinus undulatus*. Dari jumlah tersebut hanya 100 ekor (kurang dari 1/6) merupakan spesies yang memiliki nilai tinggi dalam perdagangan ikan karang hidup (umumnya spesies *Epinephelus* dan *Plectropomus*).

Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Keadaan ini digambarkan dari produksi ikan yang baru mencapai 3.000 ton/tahun terdiri dari ikan pelagis (kecil/besar) 2.300 ton dan ikan demersal (karang) 700 ton (Hajifu dan Oktawinus, 2006). Produksi perikanan masih berada di bawah potensi lestari perikanan di kabupaten ini.

Pariwisata

Wakatobi, dengan keindahan dan keunikan pantai serta kekayaan terumbu karangnya, mempunyai potensi wisata bahari yang sangat besar. Wisata bahari ini telah dikembangkan, namun kegiatan wisata selama ini masih terbatas pada dua tipe yaitu *dive tourism* dan *research tourism* yang dilakukan oleh Operation Wallacea (Clifton, tt; Coles et al., 2007). Pembangunan bandara di Wanci tampaknya akan membuat perkembangan pariwisata akan semakin meningkat. Namun disisi lain, peningkatan kegiatan wisata berpotensi untuk memberikan tekanan yang besar terhadap upaya pelestarian sumberdaya laut (Coles et al., 2007).

Potensi pariwisata bahari sangat besar dengan garis pantai yang mencapai 251,96 km ditambah dengan keberadaan terumbu karang yang sangat luas. Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut terlengkap di dunia. Dengan kondisi alam semacam itu, tidaklah mengherankan jika kemudian sektor pariwisata (wisata bahari) dan perikanan digadagadag sebagai sektor unggulan utama untuk dikembangkan di kabupaten Wakatobi.



Gambar 1.2. Brosur Kegiatan Pariwisata Wakatobi

Pentingnya sektor pariwisata bagi pemerintah setempat tercermin dari visi pembangunan kabupaten yaitu *terwujudnya surga nyata bawah laut di jantung segi tiga karang dunia*. Penetapan titik berat pembangunan daerah semacam itu tidak terlepas dari penetapan wilayah kepulauan Wakatobi sebagai Taman Nasional. Penetapan status wilayah Wakatobi sebagai Taman Nasional didasarkan oleh kondisi ancaman terhadap keberlangsungan sumberdaya laut yang ada serta nilai historis kawasan tersebut dalam kaitannya dengan studi Alfred Russel Wallace serta potensi yang mungkin didapatkan dari pengembangan ekowisata (Clifton, 2003).

1.3. Upaya Pengelolaan Melalui COREMAP

Salah satu upaya untuk mengurangi kerusakan terumbu karang dan meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui program penyelamatan terumbu karang yang dikenal dengan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* atau disingkat COREMAP. Program ini bertujuan untuk mengelola ekosistem terumbu karang agar ekosistem ini dapat dikelola secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), merupakan salah satu lokasi COREMAP Fase II di wilayah timur Indonesia. Program ini pada awalnya akan dilaksanakan di 66 desa yang tersebar di Kecamatan Wangi-Wangi (9 desa/kelurahan), Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (13 desa), Kecamatan Kaledupa (9 desa), Kecamatan Kaledupa Selatan (9 desa), Kecamatan Tomia (7 desa), Kecamatan Tomia Timur (9 desa) dan Kecamatan Binongko (10 desa). Namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan. Jumlah lokasi COREMAP meningkat dari 14 desa tahun 2006, kemudian menjadi 24 desa dan 40 desa/kelurahan tahun 2008.

Kegiatan COREMAP pada tahap awal difokuskan pada sosialisasi pentingnya pelestarian terumbu karang dan pembentukan lembaga pengelola COREMAP di lokasi-lokasi COREMAP. COREMAP, sesuai dengan program yang direncanakan, melakukan berbagai kegiatan, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, dan pengawasan terumbu karang oleh kelompok masyarakat. Semua kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan terumbu karang dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Kegiatan COREMAP masih terus berlangsung dan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan capaian dari kegiatan yang telah dilakukan, maka dilakukan kajian di Pulau Wangi-Wangi bulan Mei 2008.

Kegiatan COREMAP sudah disosialisasikan di desa-desa yang menjadi lokasi program. Tetapi, kegiatan sosialisasi masih terbatas pada pimpinan formal dan informal, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Sosialisasi secara luas melibatkan semua unsur masyarakat masih

terbatas. Karena itu sebagian besar anggota masyarakat, khususnya di lokasi kajian Desa Mola Selatan, Desa Waha dan Kelurahan Wandoka belum sepenuhnya memahami COREMAP, meskipun program ini telah berjalan selama dua tahun pada 2008.

Terbatasnya sosialisasi COREMAP mempunyai implikasi pada masyarakat. Masyarakat Desa Mola Selatan, misalnya, banyak yang menaruh kecurigaan terhadap COREMAP. Menurut mereka kegiatan ini akan merugikan ekonomi penduduk, karena ‘melarang’ usaha nelayan di kawasan karang. Padahal kehidupan ekonomi mereka sangat tergantung pada sumber daya laut tersebut. Keadaan ini perlu segera ditangani, karena kecurigaan dapat membuat masyarakat antipati terhadap program, yang sebetulnya belum mereka pahami tersebut. Selain itu kegiatan COREMAP tampaknya telah dijadikan semacam alasan oleh sekelompok penduduk untuk membangun konflik diantara mereka yang kemudian bermuara pada pemecahan desa. Kasus semacam ini misalnya terjadi Waha dimana kegiatan dilakukan pada tempat yang berbeda, seperti pondok informasi terdapat di Desa Waha (Induk), sementara daerah perlindungan laut (DPL) ditetapkan berada di wilayah desa Korowe-onowa. Penduduk Desa Korowe merasa dirugikan karena dengan adanya DPL akses mereka ke laut menjadi terbatas, sedangkan dana COREMAP justru dinikmati oleh penduduk Waha Induk.

Terbatasnya pemahaman tentang COREMAP bukan hanya terjadi pada masyarakat saja, tetapi juga motivator desa/kelurahan, pengurus dan kelompok-kelompok masyarakat di lokasi kajian. Sebagian besar pengurus COREMAP di ketiga lokasi belum sepenuhnya memahami kegiatan apa yang akan dilakukan COREMAP dan bagaimana cara melakukannya. Seorang motivator di Desa Mola Selatan misalnya mengatakan bahwa beliau hanya menjalankan perintah yang selama ini hanya berupa pendataan penduduk saja. Keadaan ini tentu saja perlu diperhatikan, karena pemahaman pengurus COREMAP di tingkat lokasi sangat diperlukan agar mereka dapat mensosialisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan COREMAP sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan masyarakat.

Buku ini didasarkan pada hasil kajian tahun 2008 tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha yang menjadi lokasi COREMAP di Kabupaten Wakatobi. Buku, yang merupakan buku ke dua dari serangkaian publikasi hasil kajian, bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan COREMAP di tingkat kabupaten dan di tingkat lokasi, dan dampaknya terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Mola Selatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha di Kecamatan Wangi-Wangi.

Kajian kondisi sosial ekonomi tahun 2008 ini menggunakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilaksanakan melalui survei terhadap 170 rumah tangga responden. Responden ini sebagian besar (lebih dari 90 persen) adalah responden yang sama pada survei tahun 2006, karena itu datanya dapat dibandingkan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di lokasi-lokasi tersebut, karena adanya COREMAP. Survei menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari dua set, yaitu: kuesioner untuk rumah tangga dan individu/perorangan. Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode wawancara terbuka dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan-informan kunci yang dipilih secara *purposive* di tingkat kabupaten dan lokasi-lokasi COREMAP.

1.4. Pembabakan Penulisan

Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi potensi dan degradasi terumbu karang, kegiatan ekonomi andalan yang bersumber dari sumber daya laut, khususnya terumbu karang, dan upaya pengelolaan melalui Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang yang dikenal dengan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP).

Bab ke dua menggambarkan program COREMAP dan implementasinya di tingkat kabupaten dan tingkat *grassroot* di lokasi-lokasi COREMAP. Pembahasan di tingkat kabupaten difokuskan pada perencanaan, kegiatan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh *Program Management Unit* (PMU) beserta komponen *Public Awareness* (PA), *Community Based Management* (CBM), *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS) dan *Coral Reef Research, Information and Training Center* (CRITC). Sedangkan pembahasan di tingkat lokasi ditekankan pada pengelolaan COREMAP, termasuk pembentukan dan kinerja pengelola seperti Lembaga Pengelola Sumber daya Terumbu Karang (LPSTK), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kelompok masyarakat (pokmas), kelompok jender dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), dan kegiatan penyadaran masyarakat. Analisa pada bagian ini mencakup program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk pengetahuan dan partisipasi masyarakat, sosialisasi COREMAP, kegiatan pelatihan, pendidikan, pengawasan, dan usaha ekonomi produktif. Sedangkan Bab ke tiga menginformasikan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan COREMAP.

Bab ke empat berisi gambaran tentang pendapatan penduduk dan kecenderungan perubahan selama pelaksanaan kegiatan COREMAP di lokasi ini (dari bulan November tahun 2006 sampai bulan Mei tahun 2008). Pendapatan yang dianalisa adalah pendapatan per bulan menurut lapangan pekerjaan dan pendapatan nelayan menurut musim (gelombang kuat, pancaroba dan gelombang lemah). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail, maka pada bab ini juga dijelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan, termasuk faktor internal, eksternal dan struktural. Bab terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan COREMAP ke depan.

BAB II

COREMAP: PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DENGAN PENDEKATAN TOP-DOWN & BOTTOM-UP

2.1. Pengembangan COREMAP

Kawasan terumbu karang Wakatobi merupakan salah satu kawasan yang termasuk dalam pengelolaan COREMAP untuk Indonesia bagian timur yang didanai oleh World Bank (WB). Kawasan ini terletak di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Di kabupaten ini program COREMAP baru dilaksanakan pada fase ke dua, dan implementasinya baru dimulai tahun 2005.

COREMAP adalah program penyelamatan terumbu karang dengan pendekatan kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up*, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Program ini didesain oleh pemerintah di tingkat nasional, namun pelaksanaannya didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan di tingkat *grassroots* dimana keterlibatan masyarakat menjadi sentral dalam pengelolaan terumbu karang, dikenal dengan konsep pengelolaan berbasis masyarakat. Semua kegiatan program ini berkaitan dengan upaya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Project Management Unit (PMU) merupakan pengelola COREMAP di tingkat kabupaten. Organisasi ini *leading* instansinya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi. Struktur organisasi COREMAP di kabupaten ini mengacu pada ketentuan COREMAP di tingkat nasional. Organisasi pengelola ini dilengkapi dengan komponen-komponen, yaitu Komponen Penyadaran Masyarakat atau *Public Awareness* (PA), Komponen Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau *Community-Based Management* (CBM), Komponen Pengawasan dan Pengendalian atau

Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS), dan Komponen Pusat Informasi dan Pelatihan atau *Coral Reef Information and Training Center* (CRITC). Dengan demikian, organisasi ini melibatkan berbagai instansi disesuaikan dengan kepentingan komponen dan tugas serta fungsi masing-masing instansi.

2.2. Pengelolaan Ditingkat Kabupaten

2.2.1. PMU

Pengelolaan dan pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Wakatobi mengalami perkembangan antara tahun 2006 dan 2008. Pengelolaan dan pelaksanaan pada awal kegiatan mengalami hambatan, namun PMU COREMAP kabupaten kemudian berupaya untuk mengatasi hambatan agar program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keterlambatan pelaksanaan program dikarenakan beberapa alasan. COREMAP pada awal kegiatan mengalami kendala karena adanya dominasi ‘aparatus’ PMU dalam pelaksanaan. ‘Aparatus’ tersebut kurang berkoordinasi dengan komponen COREMAP dan instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan program. Keadaan ini berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan COREMAP. PMU COREMAP Kabupaten Wakatobi menyadari situasi ini, karena itu berupaya mengatasi kendala, mengganti ‘aparatus’ tersebut, dan memacu pelaksanaan kegiatan COREMAP tahun 2007.

Keterlambatan pelaksanaan juga berkaitan dengan keterlambatan turunnya Surat Keputusan (SK) pengelola COREMAP Kabupaten Wakatobi. SK turun bulan Juli 2007, dengan demikian kegiatan belum dapat dilaksanakan sampai bulan tersebut. Akibatnya, kegiatan baru berjalan sekitar 15 persen pada bulan November 2007. Pengelola COREMAP kemudian memacu kegiatan-kegiatan COREMAP di kabupaten ini, sehingga kegiatan sudah mencapai 70 persen pada bulan Desember 2007. Kegiatan-kegiatan COREMAP dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini berpengaruh terhadap kualitas hasil kegiatan-kegiatan tersebut, karena pihak pengelola hanya terfokus pada terlaksananya kegiatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan COREMAP di Kabupaten Wakatobi juga dipengaruhi oleh penambahan lokasi COREMAP. Jumlah lokasi sesuai dengan pemekaran desa/kelurahan meningkat secara signifikan, dari 14 desa/kelurahan tahun 2006 menjadi 40 desa pada 2008. Penambahan jumlah lokasi berimplikasi pada jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

Keterlambatan pelaksanaan COREMAP, terutama di lokasi, juga berkaitan dengan turunnya dana. Dana untuk masyarakat tahun anggaran 2006/2007, termasuk dana untuk pembangunan sarana desa atau *village grant*, dana bergulir untuk matapencaharian alternatif atau usaha ekonomi produksit masyarakat atau *seed fund*, dan dana pondok informasi, baru cair pada bulan Desember 2007 dan didistribusikan ke lokasi awal tahun 2008. Pada waktu kajian dilakukan bulan Mei 2008, masih ada desa yang belum mendapatkan *seed fund*. Penetapan dana memerlukan waktu, karena melalui proses revisi dana tahun 2007. Revisi tersebut tidak dapat dilaksanakan di DPRD, karena kondisi politik yang berkembang di Kabupaten Wakatobi saat ini. Besarnya dana juga mengalami penurunan, sebagai contoh dana *village grant* untuk pengembangan sarana prasarana desa/kelurahan sudah mengalami beberapa kali penurunan dari Rp 100 juta menjadi Rp 50 juta dan turun kembali sampai Rp 33 jutaan per desa/kelurahan. Penetapan dana merupakan hasil negosiasi pengelola COREMAP kabupaten dengan KPPN. Dana tersebut didistribusikan dalam dua tahap, tahap pertama sudah ditransfer bulan April 2008, sedangkan dana tahap kedua akan ditransfer kemudian sebelum *closing date* COREMAP tahun 2009.

2.2.2. Komponen *Public Awareness* (PA)

Public Awareness (PA) atau kesadaran masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi dasar untuk pengembangan COREMAP di Kabupaten Wakatobi. Kerusakan terumbu karang di Wakatobi dikarenakan perilaku manusia yang merusak karang, di samping karena faktor alami (lihat buku data dasar aspek sosial terumbu karang). Perilaku negatif masyarakat berkaitan

dengan kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap sumber daya laut ini.

Komponen PA melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian terumbu karang di kawasan ini. Kegiatan PA telah dimulai sejak awal kegiatan COREMAP tahun 2005 dan masih berlangsung sampai kajian ini dilakukan awal Mei 2008. Kegiatan tahun 2006 cukup banyak, antara lain: pembuatan materi buku, dokumen visual-shooting, sosialisasi ke setiap kecamatan COREMAP, even-even lokal, seperti lomba karya tulis, training guru dan pengembangan produk mulok. Sedangkan kegiatan tahun 2007 dilakukan oleh pihak ketiga yang mendapat kontrak dari COREMAP. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan perlengkapan (seperti papan informasi dan mesin cetak), desiminasi informasi PA, pelatihan komunikasi dan penyuluhan, pelatihan jurnalis lingkungan, pembuatan materi (dalam bentuk poster-poster, baju, dan topi), sosialisasi di lokasi, workshop guru SMP dengan peserta sebanyak 45 guru (dua peserta per sekolah), dan even lokal (Kontes Innovator Muda atau KIM). Papan informasi didistribusikan ke setiap pondok informasi, sedangkan mesin cetak di Kantor COREMAP Kabupaten Wakatobi. Desiminasi COREMAP juga dilakukan melalui iklan di radio & TV lokal (lewat TV kabel) pada bulan September/Oktober 2007. Pelatihan komunikasi dan penyuluhan dilaksanakan secara swakelola dengan peserta adalah *Senior Training Officer* (Seto), *Community Facilitator* (CF), Motivator Desa (MD), dan Birokrat Eselon III. Materi pelatihan disampaikan oleh staf Bappeda dan JICA. Pelatihan jurnalis lingkungan melibatkan 35 peserta terdiri dari wartawan lokal (radio, Wakatobi Pos), wartawan dari Provinsi Sultra (seperti perwakilan dari Media Sultra, Kendari Pos, dan Kendari Ekspres), dan siswa SMA.

Sosialisasi COREMAP sangat penting dilakukan di lokasi-lokasi. Namun komponen PA hanya melakukan sosialisasi ke dua kecamatan. Kegiatan ini melibatkan Seto sebanyak 7 orang. Metode yang digunakan dalam sosialisasi bervariasi, termasuk ceramah, pemutaran film terumbu karang dan kuis. Sosialisasi dihadiri banyak anggota masyarakat yang tertarik untuk menonton film.

Kegiatan PA untuk tahun 2008 meliputi KIM, pembuatan materi, workshop/training guru, munas/pameran, duta karang, jurnalis kompetisi, lomba foto bawah laut, even lokal berupa cerdas cermat. Kegiatan-kegiatan ini belum terlaksana pada waktu kajian ini dilaksanakan awal Mei 2008.

2.2.3. Komponen *Community-Based Management* (CBM)

Community-Based Management (CBM) atau Pengelolaan Berbasis Masyarakat sangat krusial dan menjadi dasar pengelolaan terumbu karang di tingkat lokasi karena masyarakat merupakan *prime users* sumber daya laut. Komponen CBM di tingkat kabupaten bertugas memfasilitasi dan membimbing kelompok masyarakat dalam mengelola terumbu karang, baik yang berkaitan dengan pengawasan dan penyelamatan sumber daya laut ini maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau Matapencaharian Alternatif (MPA).

Kegiatan Komponen CBM mengalami perkembangan antara tahun 2006 dan 2008. Komponen CBM mulai melaksanakan kegiatannya tahun 2006, namun kegiatannya masih terbatas pada *requitment Senior Officer* (Seto), *Community facilitator* (CF), dan Motivator Desa (MD). Komponen CBM mulai mengintensifkan kegiatannya tahun 2007 dengan melakukan pelatihan dan studi banding atau *cross visit* ke Makassar. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Seto dan CF tentang kefasilitatoran dan *tim work*, dan kapasitas MD tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta teknis pelaksanaan di lapangan. Komponen CBM juga melakukan pelatihan untuk Seto, CF, MD dan ketua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 40 lokasi tentang keuangan mikro dan matapencaharian alternatif. Pelatihan ini umumnya difasilitasi oleh pengelola COREMAP tingkat pusat, demikian juga narasumber pelatihan juga berasal dari Jakarta. Sedangkan studi banding ke Makassar bertujuan untuk mempelajari pengelolaan rumput laut yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah.

Komponen CBM idealnya juga memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana *village grant* (pengembangan sarana dan prasarana desa/kelurahan) dan *seed fund* (dana bergulir). Komponen ini bekerjasama dengan unsur PMU mengadakan pertemuan dengan LPSTK semua lokasi untuk menjelaskan pelaksanaan *village grant dan seed fund* di lokasi. Kegiatan *village grant* sudah dilaksanakan di 16 lokasi. Kegiatan di lokasi COREMAP yang baru (24 desa/kelurahan) masih terfokus pada penggalan potensi melalui *Participatory Rapid Assessment* (PRA) dan pembuatan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). Kegiatan dari *seed fund* juga sedang berjalan, kecuali di Desa Mola Selatan yang masih di'pending' karena adanya permasalahan dengan ketua LKM. Komponen CBM berupaya untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat yang tergabung dalam kegiatan COREMAP dengan melakukan pelatihan tentang pengelolaan matapencarian alternatif dan keterampilan usaha, seperti kerajinan.

Kegiatan CBM yang berkaitan dengan penyelamatan terumbu karang, khususnya Daerah Perlindungan Laut (DPL) juga sedang berlangsung. Pelatihan tentang DPL belum dilakukan, meskipun pelatihan untuk percobaan pernah dilaksanakan tahun 2006. DPL dapat ditempatkan di kawasan terumbu karang atau mangrove, disesuaikan dengan kebutuhan lokasi yang dapat dipantau oleh masyarakat. DPL dapat dikembangkan di satu lokasi dan/atau beberapa lokasi bergabung membuat satu DPL. Sebagai contoh Desa Mola Selatan dan Mola Utara tidak membuat DPL karena wilayahnya sangat terbatas, kedua desa ini mendukung DPL yang terletak di Desa Kolo dan Numana. Beberapa desa/kelurahan sudah mempunyai DPL yang disahkan dalam peraturan desa (Perdes), seperti DPL Desa Waha (meskipun tanda batas DPL telah hilang karena ketidaksetujuan sebagian masyarakat). DPL-DPL yang telah ada belum dilakukan uji Publik dan ditetapkan berdasarkan data GPS, rencananya akan dilakukan pada tahun anggaran 2008 ini.

Komponen CBM tidak mempunyai dana operasional, karena itu staff komponen ini tidak dapat melakukan monitoring di semua lokasi, terutama lokasi-lokasi yang letaknya jauh dari Kantor COREMAP di

Wanci. Pihak CBM hanya mendapat buku kemajuan kegiatan CBM dari Seto, CF dan MD pada waktu mereka mengambil gaji di kantor COREMAP. Buku tersebut tentu saja belum optimal untuk mengetahui secara jelas kegiatan dan permasalahan yang dihadapi CBM di lokasi.

2.2.4. Komponen *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS)

Komponen pemantauan, pengawasan dan pengendalian atau *monitoring, controlling and surveillance* (MCS) merupakan komponen yang juga sangat diperlukan dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Komponen MCS dalam pelaksanaannya terfokus pada Daerah Perlindungan Laut (DPL) di lokasi COREMAP, terutama peraturan daerah, dan operasional kegiatan pengawasan. Komponen ini memfasilitasi kegiatan pengawasan di tingkat kabupaten dan tingkat lokasi COREMAP.

MCS di tingkat kabupaten dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan Dinas DKP Bagian Pengawasan dan Pengendalian, Taman Nasional, TNI AL/Polres dan WWF. Tim ini melakukan patroli sebulan sekali. Di samping itu, patroli juga dilakukan sendiri-sendiri oleh Dinas DKP, WWF dan Taman Nasional. Dinas DKP untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian telah melatih dua stafnya hingga mempunyai sertifikat PPNS. Kedua staf tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan jika terjadi pelanggaran di laut.

Komponen MCS Kabupaten Wakatobi tahun 2007 melakukan kegiatan berupa pelatihan dan pengadaan peralatan. Kegiatan pelatihan difokuskan pada dua topic, yaitu sertifikasi perdagangan ikan karang yang diikuti oleh pengusaha ikan dari 40 desa sasaran program dan LSM Yayasan Sulawesi Raya, dan *destructive fishing* yaitu pendataan di masing-masing desa COREMAP oleh LSM Yayasan Sulawesi Raya. Komponen MCS untuk peningkatan kapasitas peralatan melakukan pengadaan *speed boat* dengan mesin berkekuatan 80 PK yang ditempatkan di ibukota kabupaten. Komponen MCS juga mengadakan peralatan seperti GPS, jaket

renang, masker, snorkel, kompas, peta wakatobi. Peralatan MCS ini didistribusikan ke 40 desa/kelurahan lokasi COREMAP.

Selain tingkat kabupaten, komponen MCS juga mengembangkan kapasitas MCS di tingkat lokasi. Kegiatan pengawasan di desa/kelurahan dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) menggunakan sistem pengawasan masyarakat (siswasmas). Komponen MCS pada 2007 melakukan apel siaga siswasmas. Apel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi (tupoksi) siswasmas. Komponen ini juga memfasilitasi pelatihan ketua pokmaswas tentang pokmaswas, peran siskamling dan peran TNI dalam hukum dan kedaulatan di laut oleh TNI-AL. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas DKP Provinsi Sultra.

Pokmaswas yang melakukan patroli tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap pelanggar. Pokmaswas harus melapor ke Dinas DKP, dan Dinas akan berkoordinasi dengan tim terpadu, termasuk Taman Nasional, TNI AL/Polres untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Mekanisme ini sudah diimplementasikan, bahkan tim terpadu pernah dua kali menangkap nelayan yang sedang membius ikan dan pembius tersebut setelah di proses hukum di Bau-Bau telah diganjar hukuman selama 2 bulan penjara.

Komponen MCS kabupaten melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan di lokasi COREMAP, namun kegiatannya masih terbatas. Pemantauan dilakukan pada lokasi yang dekat kantor COREMAP, seperti Desa Waha, Desa Mola Utara dan Desa Mola Selatan. Hal ini berkaitan erat dengan tidak turunnya biaya operasional COREMAP, termasuk untuk komponen MCS, karena tidak adanya dana pendamping.

2.2.5. *Coral Reef Research, Information and Training Center* (CRITC)

Coral Reef Research, Information and Training Center (CRITC) adalah satu komponen COREMAP yang fokus pada riset dan training. Riset diperlukan untuk mengumpulkan data ekologi dan sosial ekonomi (sosek) terumbu karang. Hasil riset dapat dijadikan landasan

untuk mengetahui kondisi terumbu karang dan kondisi sosek masyarakat sebelum dan setelah dilaksanakannya COREMAP. Data tersebut juga dijadikan indikator keberhasilan COREMAP di daerah sasaran program.

CRITC di Kabupaten Wakatobi dikelola PMU di bawah koordinasi Bappeda. Kegiatan CRITC mengacu pada ketentuan CRITC pusat Jakarta dan kegiatan lain yang spesifik lokal. Kegiatan CRITC dimulai tahun 2005, namun kegiatannya masih terbatas dan dokumennya masih terpusat di kantor PMU. Kegiatan CRITC tahun 2006 didominasi oleh KPA COREMAP dan pelaksanaannya dikontrakkan pada pihak ketiga yaitu Operation Wallacea (Opwal), akibatnya peran komponen CRITC menjadi tidak optimal. Kegiatan yang dilakukan adalah lokakarya dan pelatihan selam dan Manajemen Pengelolaan Terumbu Karang (MPTK). Peserta pelatihan berasal dari unsur pemerintah daerah, seperti Bappeda, DKP, TNI dan non pemerintah, seperti WWF, LSM dan MD, sedangkan pematerinya berasal dari organisasi penyelam Padi. Kegiatan pelatihan MPTK diikuti oleh 20-30 peserta dengan narasumber dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kegiatan CRITC tahun 2007 juga tidak optimal, dikarenakan tidak adanya dana *sharing* dari kabupaten, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang telah direncanakan adalah monitoring terumbu karang, survei data *creel*, filing dan dokumentasi. Penganggaran dari World Bank mengalami keterlambatan, karena itu ketersediaan dana *sharing* harus menunggu perubahan APBD di DPRD, ternyata perubahan ini tidak dibahas, sehingga tidak dapat ditetapkan. Akibatnya, kegiatan monitoring terumbu karang dan survei *creel* tidak dapat dilaksanakan, namun CRIRC Kabupaten Wakatobi tetap membantu CRITC LIPI melakukan monitoring terumbu karang dan survei baseline ekologi. Sedangkan kegiatan untuk tahun 2008 belum berjalan. PMU belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk personil CRITC sampai awal Mei 2008.

2.3. Pengelolaan di Tingkat Lokasi

Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Wakatobi, khususnya di Kelurahan Mola Selatan, Wandoka dan Desa Waha telah memberikan pelajaran, baik yang positif untuk pengembangan program maupun yang negative sehingga menjadi penghambat kegiatan COREMAP di lokasi ini. Bagian ini mengulas pembelajaran yang dapat dipetik, terutama dari aspek kelembagaan, ekonomi produktif dan pelestarian/konservasi sumber daya laut, khususnya ekosistem terumbu karang.

COREMAP mempunyai dampak positif terhadap penyelamatan terumbu karang. Keadaan ini dapat diketahui dari penurunan secara signifikan kegiatan ilegal, terutama penggunaan bius/potas. Upaya penyelamatan terumbu karang telah dilakukan sebelum pelaksanaan COREMAP di Kawasan Wakatobi, tetapi keberadaan program ini telah meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kegiatan yang merusak terumbu karang. Penangkapan ikan karang hidup menjadi salah satu primadona di kawasan ini, mengingat harga jualnya cukup tinggi dan permintaan terhadap biota laut tersebut juga tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

COREMAP adalah program penyelamatan terumbu karang berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dan menjadi faktor sentral dalam pelaksanaan program di tingkat lokasi. Keterlibatan masyarakat idealnya bukan hanya individu-individu tertentu saja, tetapi melibatkan semua lapisan masyarakat yang dilakukan secara melembaga.

Pengelolaan COREMAP di tingkat lokasi atau desa/kelurahan, menurut ketentuan yang berlaku, dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) untuk pengelolaan terumbu karang dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk pengelolaan kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas), baik laki-laki/putera maupun perempuan/jender. Pokmas merupakan bagian dari LPSTK dan LKM.

2.3.1. Kelembagaan COREMAP

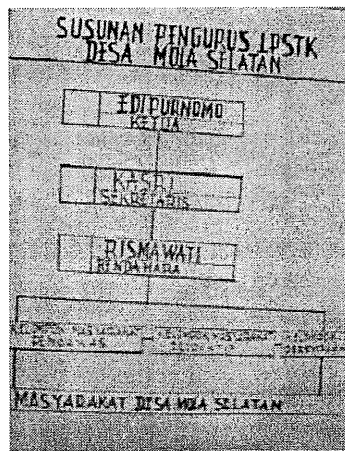
Kelembagaan COREMAP di tingkat lokasi dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yaitu Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagian ke dua adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yaitu kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

- Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)

Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) telah dibentuk di tiga lokasi kajian yaitu Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi (desa/kelurahan sebelum pemekaran). Lembaga ini beranggotakan masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi tersebut dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan di tingkat desa/kelurahan.

Pembentukan

Pembentukan LPSTK mengacu pada ketentuan yang sudah ada. LPSTK di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dibentuk tahun 2006. Pembentukan lembaga ini dilakukan pada pertemuan masyarakat di kantor desa. Pertemuan ini dihadiri masyarakat sebanyak 60 warga dan wakil COREMAP Kabupaten Wakatobi. Mereka menyepakati pengurus lembaga, termasuk ketua, sekertaris, bendahara dan kelompok-kelompok masyarakat.



Gambar 2.1. Susunan Pengurus LPSTK

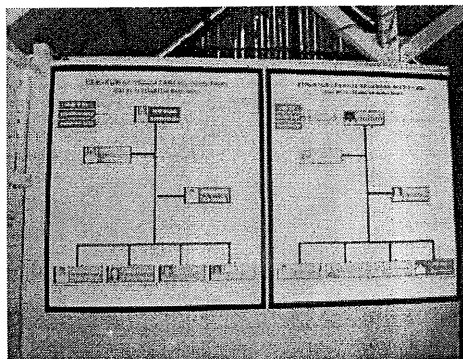
LPSTK di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi dibentuk bulan Oktober 2007 dan telah disyahkan dalam Surat Keputusan (SK) Lurah Wandoka. Proses pembentukan berjalan relatif cepat karena adanya kebutuhan SK lembaga agar COREMAP dapat dilaksanakan di kelurahan ini. Pembentukan lembaga dilakukan melalui rapat yang difasilitasi oleh Seto dan CF dan dihadiri oleh sebanyak 25 peserta yang terdiri dari pimpinan formal dan informal serta perwakilan masyarakat dari 6 lingkungan yang ada di kelurahan ini. Pada rapat tersebut ditunjuk beberapa warga yang hadir sebagai kandidat dan kemudian disepakati posisinya dalam LPSTK.

Pembentukan LPSTK di Desa Waha¹ dilakukan dalam rapat yang dihadiri sekitar 60 anggota masyarakat pada November 2007. Rapat yang difasilitasi Seto, CF dan MD ini memilih peserta yang hadir menjadi pengurus lembaga. Berdasarkan kesepakatan terpilih ketua LPSTK, sekertaris, bendahara, dan 5 anggota. Pengurus LPSTK di desa ini cukup menggembirakan karena telah mengakomodasi

¹ Desa Waha pada waktu dilakukan BME awal Mei 2008 telah mekar menjadi tiga desa yaitu Desa Waha dan Korowe dan Wapia-pia, namun pengelolaan COREMAP masih belum berubah yaitu Desa Waha.

keterlibatan perempuan. Sebagian warga, terutama yang tempat tinggalnya cukup jauh dari pusat kegiatan COREMAP dan lokasi yang telah menjadi desa baru karena pemekaran, mengungkapkan bahwa pengurus COREMAP di Desa Waha lebih didasarkan pada penunjukan ketika ada pertemuan daripada pemilihan berdasarkan aspirasi masyarakat. Mereka menduga semua pengurus mempunyai tali persaudaraan dan kedekatan dengan pimpinan formal di desa ini. Seorang pejabat di desa pemekaran bahkan mengatakan penunjukan pengurus ini menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat.

LPSTK di ketiga lokasi COREMAP dibentuk karena keberadaan lembaga pengelola menjadi salah satu persyaratan agar program ini dapat dilaksanakan di Mola Selatan, Wandoka dan Waha.



Gambar 2.2. Susunan LPSTK dan LKM
Desa Waha

Pembentukan lembaga baru dilakukan setelah mendapat informasi dari PMU Kabupaten Wakatobi bahwa dana COREMAP akan segera turun. Karena itu dapat dipahami apabila pengurus adalah peserta rapat yang ditunjuk langsung dan disepakati dalam rapat pembentukan lembaga ini.

Kegiatan

LPSTK sesuai dengan namanya mempunyai tugas melakukan pengelolaan terumbu karang di wilayah desa/kelurahan yang termasuk dalam lokasi COREMAP. Kegiatan lembaga bervariasi antar lokasi, namun dalam pelaksanaannya kegiatan lebih terfokus pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dari COREMAP tingkat nasional, terutama *village grant*.

Desa Mola Selatan

Kegiatan LPSTK di Desa Mola Selatan sampai kajian ini dilakukan awal Mei 2008 masih sangat terbatas. Keadaan ini dapat digambarkan dari masih terbatasnya kegiatan pengelolaan terumbu karang, sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah *village grant* dan pendirian pondok informasi.

Pengelolaan terumbu karang belum sepenuhnya mendapat perhatian LPSTK. Keadaan ini digambarkan dari masih minimnya kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang di Desa Mola Selatan. Padahal Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) sangat penting sebagai acuan dan panduan dalam melakukan kegiatan COREMAP di desa ini. Rencana pengelolaan yang komprehensif dan terpadu, idealnya didesain dan disepakati oleh masyarakat, dituangkan secara tertulis dalam dokumen RPTK.

RPTK Desa Mola Selatan sudah disusun, namun keterlibatan masyarakat sangat minim dan dokumen tersebut juga tidak tersedia di lokasi. Ketua LPSTK pernah melihat dokumen RPTK yang disimpan di kantor COREMAP kabupaten. Gambaran ini sangat memprihatinkan, karena pengelolaan terumbu karang di tingkat lokasi seharusnya mengacu pada RPTK, namun pengurus yang menjadi tokoh kuncipun kurang mempunyai akses terhadap rencana pengelolaan di desa ini.



Gambar 2.3. Tong Sampah di Mola Selatan

LPSTK Desa Mola Selatan melalui *village grant* tahun anggaran 2007 membangun sarana fisik berupa tong sampah, MCK dan balai pertemuan nelayan. Kegiatan ini baru dilaksanakan awal tahun 2008.

Pembuatan tong sampah dan MCK erat kaitannya dengan perbaikan kondisi sanitasi lingkungan di wilayah desa ini. Tong sampah sangat diperlukan karena sampah selama ini berserakan dimana-mana, masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk di sekitar rumah dan kanal-kanal di sekelilingnya. Tong sampah sebanyak 17 buah telah dibuat dan ditempatkan di berbagai wilayah di Desa Mola Selatan dan Desa Nelayan Bakti (desa pemekaran).

Selain tong sampah, LPSTK Mola Selatan juga membangun MCK yang berlokasi di Mesjid desa. Pembangunan sarana ini mendapat berbagai tanggapan. Beberapa anggota masyarakat mengatakan bahwa pembangunan MCK kurang layak, karena hanya satu bak penampung air yang digunakan untuk air wudhu dan WC bersama-sama. Padahal, air wudhu seharusnya air bersih yang tidak terkontaminasi oleh air untuk WC. Letak kloset juga dianggap tidak tepat karena berada di muka bak penampung air. MCK baru selesai dibangun karena itu belum dimanfaatkan.

Dana *village grant* juga digunakan untuk membangun balai pertemuan nelayan. Balai pertemuan dibangun di Desa Nelayan Bakti

wilayah pemekaran yang berbatasan langsung dengan laut. Pembangunan balai dilakukan pada bangunan yang sudah ada oleh pihak ke tiga yaitu dari Unhalu Kendari.

Selain itu, LPSTK juga telah membangun pondok informasi menggunakan dana tahun 2007. Pondok informasi di bangun di atas kanal, sehingga juga berfungsi sebagai jembatan penyebrangan. Satu sisi dibuat ruangan untuk menyimpan materi dan bahan atau tempat pertemuan kelompok kecil, bagian tengah berupa jalan tempat lalu lintas warga dan sisi lainnya dibuat tempat duduk/amben yang bisa digunakan untuk anggota pokmas atau warga berkumpul dan berbincang-bincang. Lokasi bangunan terletak di bekas bangunan tempat siskamling yang dirobohkan, namun bahan-bahannya sebagian masih menggunakan bahan bangunan yang terdahulu. Pondok ini terbuat dari bahan kayu dan papan dengan atap seng.

Kegiatan pembangunan sarana tersebut didominasi oleh ketua LPSTK, kurang melibatkan pengurus LPSTK dan anggota-anggota pokmas. Bendahara yang mengurus keuangan, misalnya belum sepenuhnya difungsikan, pencairan dana dilakukan melalui rekening atas nama ketua. Hal ini sudah menjadi isu di Desa Mola Selatan, bahkan ada pengurus yang sudah membicarakannya pada pejabat COREMAP kabupaten. Pejabat tersebut menurut informan kunci telah berjanji untuk memanggil pengurus LPSTK Desa Mola Selatan.

Kelurahan Wandoka

Kegiatan LPSTK Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, juga masih terbatas. Kegiatan yang dominan adalah pembangunan prasarana menggunakan dana *village grant* tahun anggaran 2007 yang baru cair pada awal 2008. Kelurahan Wandoka mendapatkan dana sebesar Rp 33.500.000 yang diperoleh dalam dua tahap. Dana ini digunakan untuk membantu 4 mesjid, pengadaan armada tangkap (bodi dan motor dalam) dan pembangunan jalan setapak.

Masyarakat Wandoka sebetulnya menginginkan dana *village grant* digunakan untuk membangun lorong di tiga tempat, karena

kelurahan ini telah mekar menjadi 3 kelurahan. Dana tersebut tentu saja tidak mencukupi, sehingga mereka membuat kesepakatan baru yaitu dana digunakan untuk membantu mesjid di ketiga kelurahan tersebut, seperti bahan-bahan bangunan untuk pembuatan kuba dan jendela mesjid. Pembangunan mesjid tidak secara langsung berhubungan dengan pengelolaan terumbu karang, namun bantuan ini diperlukan karena mesjid juga digunakan sebagai tempat pertemuan dan sosialisasi penyelamatan terumbu karang di kelurahan ini.

LPSTK juga membangun jalan setapak sepanjang 100 meter. Jalan ini menghubungkan jalan raya dengan pondok informasi yang terletak di pinggir pantai. Pembangunan jalan dilakukan secara gotong royong melibatkan anggota masyarakat, sedangkan bahan-bahan yang diperlukan seperti batu, pasir dan semen dibeli menggunakan dana *village grant* dari COREMAP.

Dana *village grant* juga digunakan untuk keperluan perlindungan sumber daya terumbu karang di Kelurahan Wandoka. Dana sebanyak Rp 1.500.000 dipakai untuk membeli pelampung yang digunakan sebagai pembatas Daerah Perlindungan Laut (DPL). LPSTK juga membeli armada untuk kegiatan patroli seharga Rp 8.000.000, terdiri dari bodi dan mesin dalam Merk Shanghai dengan kapasitas 260 PK.

Selain itu, LPSTK juga membangun pondok informasi dengan dana sebesar Rp 6.500.000. Pondok baru dibangun bulan April 2008 menggunakan dana tahun anggaran 2007. Pondok informasi dibangun secara permanen dan terletak di pinggir pantai di atas lahan milik seorang warga yang konsen dan mendukung kegiatan pelestarian terumbu karang.

Desa Waha

Pengurus LPSTK setelah terbentuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendiskusikan kegiatan dari dana *village grant*. Masyarakat mulanya mengusulkan pembuatan jalan tembus dari pantai menuju kebun nelayan. Pembangunan jalan ini akan memudahkan nelayan untuk mencari tambahan uang diluar kegiatan kenelayanan. Pembangunan jalan akan mempermudah nelayan dan

keluarganya untuk pergi ke kebun dan kegiatan ini dapat menjadi alternatif pemecahan masalah bagi kegiatan ibu-ibu yang menangkap ikan dan gurita dengan mencungkil karang. Namun usulan ini tidak diterima dan sebagai gantinya disepakati pengadaan rumpon ikan.

Dana *village grant* cair dalam dua tahapan. Dana tahap pertama sebanyak Rp 16.500.000 cair bulan Januari 2008. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan rumpon, pembelian pelampung untuk pembatas Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan biaya operasional pengawasan sampai bulan Maret sebanyak p 1.500.000. Rumpong seluas 8 x 3 m² dibuat dengan total biaya sebesar Rp 10.540.000. Sedangkan dana tahap kedua sebanyak Rp 16.500.000, cair pada April 2008, digunakan untuk pembangunan talud penahan abrasi (Rp 4.635.000) dekat pondok informasi, bodi ketinting (Rp 9.000.000) dan MCK di pondok informasi (Rp 3.125.000). Tanggul dipasang di sekitar pondok informasi, tujuannya adalah melindungi pondok dari hempasan ombak.

- LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP) atau matapecaharian alternatif (MPA)kelompok masyarakat (pokmas) di lokasi COREMAP. Lembaga ini sangat diperlukan karena tujuan COREMAP adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, di samping melestarikan terumbu karang. Semua kegiatan ekonomi, baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan pemanfaatan sumber daya terumbu karang, harus mengacu pada RPTK sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembentukan

Pembentukan LKM di lokasi-lokasi COREMAP dilakukan bersamaan dengan pembentukan LPSTK. Proses pembentukan juga relatif sama, yaitu melalui pertemuan masyarakat. Beberapa peserta pertemuan ditunjuk sebagai pengurus dan kemudian disepakati

kedudukan mereka dalam LKM, yaitu sebagai ketua, bendahara, sekertaris dan ketua kelompok masyarakat (pokmas).

LKM di Desa Mola Selatan dibentuk tahun 2006 dengan struktur yang sesuai dengan ketentuan. LKM di desa ini terdiri dari dua pokmas yaitu kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dan kelompok perempuan. Pemilihan anggota kelompok dilakukan oleh ketua kelompok. Ketua kelompok UEP, setelah mendapat informasi dari LPSTK tentang akan turunnya dana, mengajak seorang warga membuat kelompok dengan 5 anggota untuk mengembangkan usaha ekonomi yang didanai COREMAP. Cerita ini kemudian diceritakan kembali kepada 5 warga yang diperkirakan seide. Mereka lalu mengadakan beberapa kali pertemuan dan menyepakati untuk bergabung dalam kelompok UEP.

Pembentukan LKM di Kelurahan Wandoka dilakukan tahun 2007 setelah mendapat informasi dari lurah tentang akan turunnya dana COREMAP. Pembentukan dilakukan bersamaan dengan pembentukan LKM melalui pertemuan yang dihadiri sekitar 25 peserta yang berasal dari perwakilan masing-masing lingkungan. Seorang peserta dalam rapat ditunjuk dan disepakati menjadi ketua LKM di kelurahan ini. Proses selanjutnya adalah pembentukan pokmas. Ketua LKM difasilitasi oleh Seto, MD dan LPSTK melakukan sosialisasi ke 6 lingkungan di Kelurahan Wandoka dan kemudian membentuk pokmas di masing-masing lingkungan. Pemilihan anggota pokmas sebanyak 5 orang ditentukan berdasarkan kebijakan kepala lingkungan masing-masing. Persyaratan menjadi anggota adalah mempunyai usaha, karena dana yang bersumber dari pos LKM adalah penambahan modal usaha.

LKM di Desa Waha dibentuk bulan November 2007 bersamaan dengan pembentukan LPSTK. Proses pembentukan LKM juga sama dengan LPSTK. Pengurus LKM ditunjuk dan disepakati dalam pertemuan dengan masyarakat, terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara dan 5 anggota.

•

Kegiatan

LKM berfungsi mengelola dana bergulir atau *seed fund* COREMAP untuk usaha ekonomi produktif (UEP) pokmas. Dana UEP didistribusikan pada pokmas sebagai tambahan modal anggota kelompok agar dapat meningkatkan usaha. Dengan demikian, persyaratan untuk mendapatkan dana adalah anggota masyarakat yang mempunyai usaha dan bergabung dalam pokmas. Kegiatan UEP bervariasi antar kelompok dan antar lokasi COREMAP, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.

LKM di Mola Selatan belum berjalan sampai kajian ini dilakukan awal Mei 2008. Keadaan ini dikarenakan belum keluarnya dana *seed fund* di Desa Mola Selatan. Kegiatan yang dilakukan hanya terbatas pada rapat-rapat untuk mensosialisasikan pengurus dan kegiatan yang berkaitan dengan UEP.

LKM di Kelurahan Wandoka telah mendistribusikan dana *seed fund* tahun anggaran 2007 yang baru turun pada bulan April 2008. Dana *seed fund* ini merupakan dana tahap pertama sebanyak Rp 19.375.000 atau 50 persen dari total dana. Meskipun demikian tidak semua dana didistribusikan pada pokmas, sebagian dana dipotong untuk biaya operasional LKM. Pokmas mendapat dana sebanyak Rp 15.000.000 untuk 6 kelompok di 6 lingkungan Kelurahan Wandoka.

Di Desa Waha, LKM mempunyai tugas mengurus dana bergulir atau *seed fund* pokmas. Dana tersebut turun bulan Januari 2008, padahal sosialisasi akan turunnya dana COREMAP sudah ada sejak Desember 2006. Pengurus LKM telah mendistribusikan dana pada sebanyak Rp19.375.000 kepada 19 anggota pokmas yaitu pokmas konservasi, usaha produktif dan jender.

- Pokmas/Kelompok Jender

Kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok jender adalah kelembagaan masyarakat pada tingkatan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan COREMAP di lokasi. Kelompok ini langsung berkaitan dengan kegiatan pengelolaan terumbu karang

dan/atau usaha ekonomi produktif masyarakat. Pokmas mempunyai peran yang bervariasi, pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi produktif (UEP), kelompok jender umumnya juga menangani usaha ekonomi produktif, dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang bertugas mengawasi kawasan terumbu karang dari perilaku yang merusak sumber daya laut tersebut. Jumlah pokmas/jender dan pokmaswas bervariasi antar lokasi COREMAP, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing lokasi (lihat Tabel 2.1.)

Semua pokmas di Desa Mola Selatan belum melakukan kegiatan UEP. Hal ini dikarenakan belum turunnya dana *seed fund* sampai dengan awal Mei 2008. Keterlambatan distribusi dana di desa ini berkaitan dengan permasalahan ketua LKM dengan Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. Pengurus tersebut sebelumnya mendapat dana untuk kegiatan Dinas Perikanan di desa ini dan dana tersebut bermasalah. Pihak Dinas Perikanan khawatir jika dana *seed fund* di transfer ke rekening pengurus tersebut akan mengalami masalah yang sama. Pihak dinas mengharapkan pengurus tersebut menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Namun PIU berjanji akan mendistribusikan dana ini sesegera mungkin ke Desa Mola Selatan.

Tabel 2.1. Pokmas/Jender dan Pokmaswas di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2008

	Lokasi		Jumlah	
	Sebelum Pemekaran 2006	Setelah Pemekaran 2008	Pokmas	Kelompok Jender Pokmaswas
Mola Selatan	- Mola Selatan	- Mola Selatan	3	1
		- Nelayan Bakti	- Budidaya Keramba	
			- Rumput Laut	
			- Pengolahan & Perdagangan Hasil Laut	
Wandoka	- Wandoka	- Wandoka	6	-
		- Wandoka Utara	di 6 lingkungan	1
Waha	- Waha	- Waha	2	1
		- Koroe	- Konservasi (5 anggota)	- Kel Jender (7 anggota)
			- Produktif (7 anggota)	

Sumber: *Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang*. LIPI (2008)

Pokmas di Kelurahan Wandoka telah mendapat *seed fund*, namun pembagian dana kepada anggota dilakukan secara tidak transparan. Anggota pokmas, siapa anggota dan berapa jumlah, yang mendapat dana ditentukan oleh ketua lingkungan. Ketua LKM memberikan dana kepada ketua lingkungan dan ketua lingkungan kemudian membagi dana tersebut pada anggota pokmas yang dipilihnya. Ketua lingkungan 6 yang juga merangkap ketua pokmas mengatakan bahwa dana di lingkungannya dibagi untuk dua anggota saja, yaitu beliau sendiri dan satu orang warga yang dipilihnya karena dapat dipercaya. Dana yang diperoleh menurut ketua lingkungan tersebut jumlahnya kecil, karena itu hanya cukup untuk dua orang. Masyarakat di lingkungan ini belum mengetahui bahwa dana *seed fund* telah turun dan dibagikan pada pokmas, karena informasi ini disembunyikan dan tidak diberitahukan pada masyarakat. Ketua

pokmas tersebut bahkan mengatakan tidak terlibat dalam kegiatan COREMAP ketika pertama kali ditemui tim peneliti.

Desa Waha mempunyai tiga pokmas yaitu pokmas konservasi, usaha produktif dan jender. Ketiga pokmas tersebut terlibat hanya dalam kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP). Ketiganya juga telah mendapatkan dana *seed fund* COREMAP bulan April 2008. Semua pokmas sedang mengembangkan usaha sesuai dengan kesepakatan kelompok, seperti pokmas konservasi menangani usaha makanan/kue, pokmas usaha produktif menangani usaha perdagangan sembako, dan pokmas jender membuat dendeng ikan dan abon.

- Pokmaswas

Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kawasan terumbu karang di desa/kelurahan. Pokmaswas di ketiga desa/kelurahan sudah terbentuk, terdiri dari 5 anggota dan satu ketua. Semua ketua lingkungan di Kelurahan Wandoka, yaitu Antapia, Bira, Wandoka, Ampopu dan Wova, terlibat sebagai anggota pokmaswas. Pada mulanya semua ketua lingkungan mendukung kegiatan pengawasan namun dukungan ini mulai mengalami penurunan karena permasalahan daerah perlindungan laut dan kegiatan COREMAP yang berubah dari kesepakatan.

Pokmaswas di ketiga lokasi sudah terbentuk, namun kinerjanya bervariasi antar lokasi. Pokmaswas di Desa Mola Selatan belum berjalan, karena belum memiliki sarana untuk pengawasan. Pokmaswas di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha telah melakukan kegiatan pengawasannya, meskipun masih terbatas. Penjelasan detail mengenai kegiatan pokmaswas dapat dilihat pada bagian selanjutnya yaitu pada kegiatan pengawasan.

2.3.2. Kegiatan COREMAP

- Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK)

Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) adalah acuan yang sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan COREMAP di tingkat desa/kelurahan. RPTK idealnya disusun secara komprehensif dan terpadu mencakup semua upaya pemanfaatan terumbu karang secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, kebutuhan, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di lokasi COREMAP.

RPTK telah dibuat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Pembuatan RPTK melibatkan LPSTK dan masyarakat di ketiga lokasi, meskipun partisipasinya sangat terbatas. Proses pembuatan RPTK bervariasi antar lokasi, namun semua informan kunci mengatakan bahwa peran Seto sangat besar dalam pembuatan dokumen tersebut. Ketiga lokasi telah mempunyai RPTK, namun masyarakat kurang mengetahui substansi yang tercantum dalam RPTK di lokasi masing-masing.

Pembuatan RPTK di Desa Mola Selatan prosesnya kurang jelas. Pengurus COREMAP di desa ini, seperti ketua LPSTK dan LKM, bendahara, sekretaris dan beberapa ketua pokmas, tidak dapat menjelaskan proses tersebut. Ketua LPSTK mengakui pernah melihat dokumen RPTK desa ini di Kantor COREMAP Wakatobi, namun beliau tidak sempat untuk membaca dokumen tersebut. Ketua LPSTK secara jujur mengatakan tidak mengetahui isi RPTK desa ini. Padahal, sebagai ketua LPSTK beliau bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan terumbu karang yang pelaksanaannya harus mengacu pada dokumen RPTK.

Pembuatan RPTK di Kelurahan Wandoka dapat dibagi dalam dua tahap. Pertama, pihak pengelola COREMAP, seperti Seto, MD, LPSTK dan LKM mengadakan pertemuan dengan sekelompok kecil masyarakat di rumah seorang warga. Pertemuan bertujuan untuk menggali potensi dan aspirasi masyarakat. Kedua, Seto menuangkan

hasil pertemuan ini dalam dokumen RPTK. RPTK ini belum disosialisasikan pada masyarakat, sehingga mereka belum mengetahui isi dokumen tersebut. Ketua LPSTK, tokoh yang sangat penting dan berwenang dalam pengelolaan terumbu karang di Kelurahan Wandoka, bahkan belum membaca dokumen RPTK desa ini.

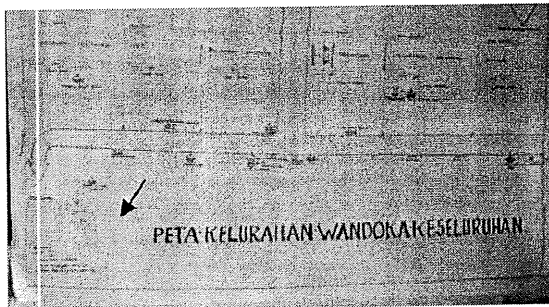
Proses pembuatan RPTK di Desa Waha hampir sama dengan di Kelurahan Wandoka. Tahap pertama adalah pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan masukan tentang kegiatan yang perlu dilakukan untuk pengelolaan terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahap kedua adalah penyusunan draft RPTK yang dilakukan oleh kantor COREMAP Wakatobi. Draft RPTK ini kemudian didiskusikan lagi dengan sekelompok kecil masyarakat dalam pertemuan yang melibatkan pihak desa. Hasil akhir dari RPTK kurang diketahui oleh masyarakat, bahkan seperti di Wandoka, ibu ketua LPSTK juga belum membaca RPTK tersebut.

- Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Daerah Perlindungan Laut (DPL) merupakan kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perlindungan sumber daya hayati dan non hayati laut, karena itu pengelolaannya memerlukan ketentuan khusus. Daerah ini diperuntukkan sebagai tempat bertelur dan berkembang biaknya ikan dan biota laut, karena itu zona inti tidak boleh dimanfaatkan, namun nelayan masih diizinkan memancing di bagian pinggir, tapi tidak boleh merusak karang, seperti pengeboman, pembiusan dan penambangan batu karang. Masyarakat idealnya mempunyai kesepakatan dalam menentukan lokasi DPL dan terlibat dalam pengelolaan wilayah ini. Kesepakatan masyarakat sangat penting agar tidak menimbulkan konflik di tingkat masyarakat.

Kelurahan Wandoka sejak April 2008 telah mempunyai DPL. Lokasi DPL dekat permukiman penduduk, sekitar 300 meter dari pantai di depan pondok informasi yang terletak di tengah perkampungan/lingkungan Wandoka. DPL yang berukuran 250 x 300 m² ini terdiri dari zona inti seluas 50 x 100 m², zona penyangga 100 x

100 m², dan zona pemanfaatan 100 x 100 m². Pengembangan DPL di kelurahan ini mengalami kendala terutama dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak menyetujui lokasi DPL. Lokasi DPL pada mulanya disepakati pengurus COREMAP dan masyarakat di perbatasan antara Wandoka dan Sambu. Di perbatasan ini tidak ada permukiman, sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas penduduk. Kesepakatan ini tidak dapat diimplementasikan, karena perbatasan ini masih dalam sengketa tapal batas sebagai akibat adanya pemekaran wilayah. Konsekuensinya, lokasi DPL dipindahkan di tengah kampung. Keadaan ini menimbulkan pro dan kontra. Semua ketua lingkungan mulanya menyetujui lokasi yang baru ini, namun karena penolakan sebagian besar masyarakat, maka sebagian ketua lingkungan juga menarik dukungannya. Lokasi DPL saat ini belum permanen, jika masalah tapal batas sudah dapat diselesaikan, maka lokasi DPL akan dipindahkan di daerah perbatasan tersebut.



Gambar 2.4. Lokasi DPL di Wandoka

Penolakan sebagian besar masyarakat ini berkaitan erat dengan letak DPL yang mengganggu kehidupan penduduk, terutama nelayan. Lokasi tersebut merupakan lokasi *meti* tempat nelayan mengambil ikan pada saat air surut dan jalur lalu lintas nelayan untuk melaut. Masyarakat kaget karena tiba-tiba dipasang pelampung sebagai batas DPL, karena itu pelampung hanya bertahan satu hari, siang dipasang dan malamnya sudah hilang. Pengurus COREMAP sebetulnya sudah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali dengan masyarakat untuk

mendiskusikan hal ini, namun masyarakat menolak lokasi tersebut. Sebagian masyarakat juga merasa DPL membatasi kegiatannya di laut.

Keberatan masyarakat terhadap DPL dapat dimengerti, karena ketentuan yang tercantum dalam berita acara pembentukan DPL. Masyarakat dilarang melakukan kegiatan apapun dalam areal DPL; dilarang melakukan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang, bom, pembiusan, tuba, pengambilan karang, pembuangan limbah rumah tangga dan reklamasi pantai. Masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa peneguran pada yang bersangkutan, ke dua kalinya denda sebesar Rp 50.000 untuk 1 m³ batu dan ketentuan lain diatur kemudian. Berita acara ini ditandatangani oleh ketua LPSTK, LKM dan Lurah Wandoka. Sebagian masyarakat kemudian meminta kompensasi agar COREMAP memberikan bantuan pada 4 mesjid di kelurahan ini, namun sebagian masyarakat tetap tidak menyetujui lokasi DPL.

DPL di Desa Waha juga ditetapkan bulan April 2008 sesaat sebelum kedatangan tim evaluasi World Bank. DPL ini berukuran 350 x 350 m², terletak di Desa Koroe (desa ini sebelum pemekaran merupakan bagian dari Desa Waha) sekitar 500 meter dari pantai. Penempatan DPL di lokasi ini kurang mendapat persetujuan masyarakat, karena tempat ibu-ibu mencari ikan dan letaknya dekat permukiman penduduk. Wilayah DPL batasnya ditandai dengan pelampung, namun tanda batas ini hilang sehari setelah kepulangan tim World Bank. Penolakan masyarakat ini berkaitan erat dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai DPL. Mereka mengira keberadaan DPL menyebabkan masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan apapun, termasuk memancing, seperti di lokasi konservasi Tomia. Masalah ini sebetulnya dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya keberadaan DPL dan dampaknya terhadap pelestarian sumber daya laut dan peningkatan pendapatan penduduk.

- **Penyadaran Masyarakat**

Penyadaran masyarakat telah dilakukan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Kegiatan ini terutama dilaksanakan pada awal kegiatan COREMAP di ketiga lokasi oleh pengurus COREMAP kabupaten dan pusat. Cara yang digunakan bervariasi, namun yang dominan adalah ceramah. Materi yang disampaikan kebanyakan adalah pengarahan tentang terumbu karang, permasalahan dan pentingnya pelestarian sumber daya laut ini. Cara lain adalah melalui rapat-rapat dalam kelompok kecil yang terdiri dari peserta wakil masyarakat, pengurus COREMAP dan pihak Dinas DKP Kabupaten Wakatobi.

Mola Selatan (sebelumnya masuk Desa Mola) merupakan lokasi pertama COREMAP di Kabupaten Wakatobi. Karena itu, kegiatan penyadaran masyarakat sudah dimulai sejak lama, meskipun kegiatan ini tidak dilakukan secara intensif. Penyadaran masyarakat setidaknya dilakukan sebanyak 3 kali oleh pengelola COREMAP dari DKP Jakarta, Dinas DKP Kabupaten Wakatobi dan LSM dari Makassar. Cara yang digunakan berbeda-beda. DKP pusat memanfaatkan media, yaitu video dan layar tancap untuk menyampaikan pesan pengelolaan terumbu karang di desa ini.

Respon masyarakat terhadap kegiatan penyadaran masyarakat adalah pro dan kontra. Sebagian kecil masyarakat pro terhadap pelestarian terumbu karang, karena kondisi terumbu karang di kawasan karang kapota memang sudah mengalami kerusakan. Sebagian besar masyarakat kontra terhadap COREMAP, karena masyarakat takut kegiatan ini seakan-akan melarang pemanfaatan karang dan karena itu akan mengganggu kehidupan mereka. Masyarakat juga takut jika diminta untuk tanda tangan, mereka beranggapan kalau tanda tangan sebagai bentuk persetujuan untuk zona konservasi yang melarang kegiatan di karang. Anggapan sebagian masyarakat ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan.

Kegiatan penyadaran masyarakat sudah jarang dilakukan di Desa Mola Selatan. Peran LPSTK, MD dan pengurus COREMAP yang lain

dalam penyadaran masyarakat juga terbatas. Hal ini berkaitan dengan keaktifan pengurus dan keterbatasan materi penyadaran yang dapat digunakan pengurus di desa ini. Alasan yang lain adalah tidak tersedianya dana untuk mengumpulkan masyarakat. Upaya penyadaran sebetulnya dapat dilakukan melalui media elektronik radio. Desa Mola Selatan mempunyai radio *all band* yang dikelola oleh Karang Taruna melalui program TNC. Radio ini dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelestarian terumbu karang.

Gambaran yang serupa juga terjadi di Kelurahan Wandoka. Kegiatan penyadaran dilakukan oleh Seto dan CF sebelum terbentuknya LPSTK dan LKM, namun frekuensinya sangat terbatas. Setelah kelembagaan masyarakat ini terbentuk, pengurus LPSTK dan LKM serta pengurus lainnya melakukan penyadaran masyarakat di 6 lingkungan yang terdapat di kelurahan ini. Pengurus COREMAP saat kajian dilakukan awal Mei 2008 belum melakukan kegiatan penyadaran ke lingkungan-lingkungan lagi karena baru menyelesaikan kegiatan yang berkaitan dengan *village grant* dan sedang menangani kegiatan dari dana *seed fund*.

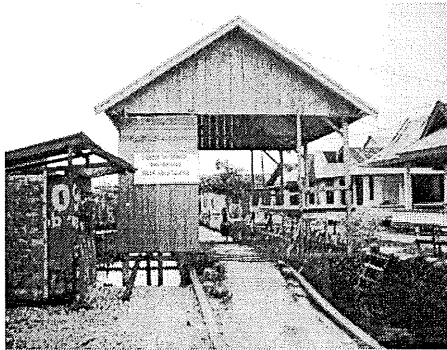
Kegiatan penyadaran masyarakat di Desa Waha lebih variatif jika dibandingkan dengan di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Motivator Desa (MD) cukup berperan dalam kegiatan yang kebanyakan dilakukan secara informal. Penyuluhan tentang kegiatan yang merusak karang dan pentingnya pelestarian terumbu karang dilakukan pada waktu berkumpul dan mengobrol dengan beberapa warga. Sebagai contoh, kegiatan yang merusak karang oleh nelayan yang mengambil gurita dengan mencungkil karang menggunakan linggis dan besi. Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan alat-alat tangkap yang merusak dan ramah terhadap lingkungan. Kegiatan penyadaran juga dilakukan melalui khotbah di mesjid pada hari Jum'at. Masyarakat mulanya banyak yang kontra karena COREMAP banyak melakukan larangan pada masyarakat, namun dengan meningkatnya pemahaman tentang kegiatan program ini, maka jumlah yang kontra juga mulai berkurang.

- **Pondok Informasi**

Pondok informasi adalah sarana atau tempat untuk penyampaian dan/atau sumber informasi kegiatan COREMAP dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Pondok informasi sangat penting bagi masyarakat, karena idealnya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Karena itu, pondok informasi harus dilengkapi dengan materi dan bahan informasi dalam bentuk buku, poster, leaflet, CD atau pengumuman. Pondok informasi juga dapat berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pengurus COREMAP dan/atau warga mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang relevan.

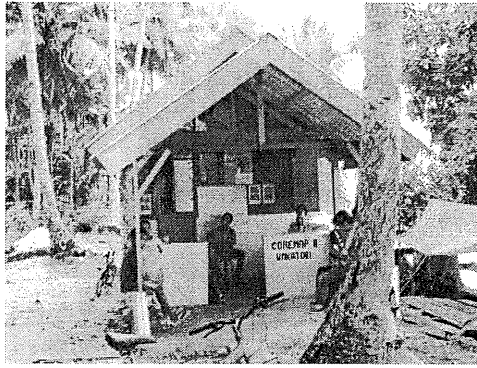
Pondok informasi sudah dibangun di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Pembangunan pondok waktunya hampir bersamaan pada awal 2008 menggunakan dana tahun anggaran 2006/2007. Bentuk, bahan, kelengkapan dan fungsi pondok bervariasi antar lokasi.

Pondok informasi di Desa Mola Selatan dibangun bulan Februari 2008, terletak dekat Kantor Desa Mola Selatan. Pondok ini berada di saluran air/kanal dan juga berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Penempatan bangunan ini dikoordinasikan dengan pihak desa, yaitu menggantikan tempat untuk pos ronda yang dibongkar. Untuk itu COREMAP memberikan ganti rugi sebesar sejuta rupiah dan uang tersebut disumbangkan ke Mesjid untuk membeli seng. Pondok ini terbuat dari kayu, memanfaatkan kayu-kayu bekas pos ronda. Ruangan tempat menyimpan materi dan ruang kerja pengurus diletakkan pada satu sisi bangunan, bagian tengah dibiarkan terbuka sehingga dapat berfungsi sebagai jembatan yang dapat dilalui oleh masyarakat, sedangkan di sisi lainnya dibuat tempat duduk/amben, dapat digunakan oleh masyarakat untuk duduk-duduk atau berdiskusi. Sarana yang terdapat pada pondok sangat terbatas. Materi penyadaran yang tersedia juga sangat minim, hanya dua poster kecil dari LIPI Jakarta. Pondok ini belum berfungsi sampai penelitian dilakukan awal Mei 2008.



Gambar 2.5. Pondok Informasi di Mola Selatan

Di Kelurahan Wandoka pondok informasi dibangun bulan April 2008, terletak di pantai Wandoka. Pondok dibangun di lahan seorang warga yang mendukung kegiatan COREMAP, meskipun sebagian masyarakat kurang menyetujui tempat tersebut, karena posisinya dianggap kurang cocok dan kurangnya sosialisasi. Pondok dibuat dari batu secara permanen, bahan bangunan ini tidak sesuai dengan pembicaraan semula yang akan menggunakan kayu. Pondok terdiri dari ruangan tempat menyimpan materi dan dokumen COREMAP dan ruang teras yang terbuka dan menjadi tempat berkumpulnya warga, terutama pemuda-pemuda pada malam hari. Pondok ini belum sepenuhnya berfungsi, karena pondok ini baru selesai dan materi penyadaran masyarakat di pondok ini masih terbatas, meskipun lebih banyak jika dibandingkan dengan di pondok informasi Mola Selatan.



Gambar 2.6. Pondok Informasi di Wandoka

Pondok informasi di Desa Waha kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Pondok dibangun pada Februari 2008 secara permanen dengan dinding batu, lantai semen dan atap seng. Pondok terletak di pinggir pantai dengan akses dari jalan cukup baik. Bangunan pondok terdiri dari dua bagian, yaitu ruangan dan teras serta di sampingnya terdapat bangunan MCK. Ruangan pondok dilengkapi dengan peralatan yang layak, seperti meja, kursi, bufet/lemari kecil dan papan pengumuman. Ruang ini dapat digunakan sebagai ruang kerja dan pertemuan kelompok kecil. Sedangkan teras dibiarkan terbuka dengan dilengkapi papan pengumuman yang dipasang di dinding dan beberapa kursi panjang. Pondok juga dilengkapi dengan sarana listrik. Bahan dan materi penyadaran yang tersedia masih terbatas, namun jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan di Mola Selatan dan Wandoka. Pondok informasi juga dilengkapi dengan MCK yang cukup baik dengan kondisi yang juga baik, karena baru selesai dibangun. Pondok informasi di Desa Waha berfungsi sebagai kantor LPSTK dan LKM, dan sarana masyarakat untuk berkumpul.



Gambar 2.7. Pondok Informasi di Waha

Pondok Informasi di Desa Waha sangat menarik, tidak hanya karena kondisinya cukup baik dan fasilitasnya cukup lengkap, melainkan juga penataan ruang yang juga baik dan rapi. Meja ditutup dengan taplak meja dan dilengkapi dengan bunga plastik. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pengembangan pondok ini, karena dana yang tersedia hanya cukup untuk membuat bangunan. Masyarakat menyumbang peralatan, seperti bupet dan kursi. Kondisi yang baik ini memang diciptakan untuk menyambut kedatangan tim evaluasi dari World Bank. Keadaan ini menarik minat masyarakat, banyak warga yang datang ke pondok hampir setiap malam untuk ngobrol dan main domino. Anak-anak juga banyak yang datang membaca buku terumbu karang dan main *game* pelestarian terumbu karang ‘ular tuing-tuing’.

- **Sosialisasi COREMAP**

Sosialisasi COREMAP merupakan kegiatan yang cukup penting untuk memperkenalkan program penyelamatan terumbu karang ini kepada masyarakat. Sosialisasi mencakup tujuan program, cara, pendekatan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, serta mekanisme pelaksanaannya. Sosialisasi program ini penting dilakukan karena kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya laut juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, seperti Taman Nasional, TNC dan WWF.

Kegiatan sosialisasi COREMAP telah dilakukan di ketiga lokasi, meskipun masih terbatas. Intensitas sosialisasi bervariasi antar lokasi, tergantung pada kegiatan program dari tingkat kabupaten dan pusat serta keaktifan pengelola COREMAP di tingkat desa/kelurahan.

Sosialisasi COREMAP di Desa Mola Selatan dilakukan sebanyak 3 kali. Kegiatan sosialisasi dikemas dalam bentuk rapat di kantor desa yang melibatkan tokoh-tokoh dan wakil-wakil masyarakat. Keadaan ini menginformasikan bahwa warga yang terlibat jumlahnya terbatas, dengan demikian sebagian besar masyarakat belum mendapatkan informasi tentang COREMAP. Karena itu dapat dimengerti apabila pemahaman masyarakat tentang program ini masih kurang. Akibatnya, sebagian besar masyarakat menganggap COREMAP sama dengan TNC yaitu membuat zona konservasi. Seorang pengurus COREMAP di desa ini mengatakan rapat terbuka yang melibatkan banyak warga belum dilakukan disini. Pengurus ini telah meminta Seto untuk mensosialisasikan COREMAP pada masyarakat, namun usulan ini belum terealisasi.

Kegiatan sosialisasi COREMAP di Kelurahan Wandoka telah dimulai bulan Mei 2006, namun frekuensinya sangat terbatas. Kegiatan ini dilakukan oleh staf dari Dinas DKP Wakatobi sebanyak dua kali pada saat kegiatan penyadaran yang dilakukan oleh Seto dan CF. Karena itu masyarakat yang memahami kegiatan COREMAP masih terbatas, menurut informan kunci hanya sekitar 20 persen. Namun demikian, sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan program di kelurahan ini, tapi pengetahuan mereka hanya terbatas pada tujuan COREMAP yaitu penyelamatan terumbu karang.

Sosialisasi COREMAP di Desa Waha belum optimal, karena sebagian masyarakat masih belum mendapat informasi yang jelas tentang COREMAP. Meskipun hampir semua warga tahu program ini, pengetahuan mereka hanya terbatas pada kegiatan penyelamatan terumbu karang. Kegiatan-kegiatan dan mekanisme pelaksanaan program belum banyak dipahami masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang tahu tentang RPTK masih sangat terbatas. Upaya mensosialisasikan COREMAP masih terus dilakukan melalui kegiatan informal, terutama oleh MD. Sosialisasi juga dilakukan pada anak-

anak sekolah SD dan SMP dengan harapan siswa sekolah tersebut akan menyebarkan informasi tentang COREMAP ini pada teman atau keluarganya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada kepala desa pemekaran yaitu Desa Koroe.

- **Pelatihan**

Pelatihan adalah kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pengelola COREMAP dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Kegiatan pelatihan biasanya dilakukan oleh pengelola program tingkat kabupaten dan tingkat pusat. Sekelompok kecil masyarakat, termasuk pengelola COREMAP, beberapa tokoh dan wakil masyarakat di ketiga lokasi pernah mengikuti pelatihan COREMAP. Materi pelatihan bervariasi tergantung dari pengelola COREMAP kabupaten atau pusat.

Pengelola COREMAP di Desa Mola Selatan telah beberapa kali mengikuti pelatihan. Ketua kelompok UEP pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan pusat riset dan informasi CRITC Jakarta pada Desember 2007. Pelatihan ini lebih terfokus pada penelitian, bukan pada usaha ekonomi yang menjadi kewajibannya. Ketua pokmaswas mengikuti pelatihan sebanyak dua kali di Wanci. Materi yang diperoleh lebih mengarah pada permasalahan terumbu karang dan pentingnya penyelamatan sumber daya laut ini, belum terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya.

Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh pengurus COREMAP di Kelurahan Wandoka masih terbatas. Ketua pokmaswas mengikuti pelatihan sebanyak dua kali di Kendari yang diselenggarakan oleh DKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelatihan pertama tentang pengawasan, penangkapan dan pengawetan ikan, dan alat tangkap. Sedangkan pelatihan kedua berkaitan dengan manajemen pengelolaan terumbu karang.

Pelatihan yang diikuti pengelola COREMAP di Desa Waha lebih beragam jika dibandingkan dengan pengelola di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. MD telah mengikuti pelatihan sebanyak 6 kali dengan materi yang berbeda, 3 kali tentang motivator desa dan

sisanya tentang pemahaman terumbu karang ke masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang diikuti sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai motivator desa. Pengelola juga mendapat pelatihan tentang UEP termasuk penjelasan tentang *seed fund* dan kegiatan usaha, seperti pembuatan dendeng ikan, puding rumput laut, manisan dan es buah dari rumput laut. Hasil pelatihan ini kemudian disosialisasikan kepada anggota pokmas, terutama ibu-ibu yang berusaha di bidang pembuatan dan penjualan makanan dan kue. Selain itu, pelatihan tentang pengawasan juga sudah dua kali diikuti oleh kepala desa, sayangnya ketua pokmaswas yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan belum mengikuti pelatihan ini.

- Edukasi

Pendidikan kelautan mulai diajarkan di Sekolah Dasar (SD) di lokasi COREMAP. Pendidikan ini dimasukkan dalam pelajaran muatan lokal (mulok) terumbu karang. Mulok kelautan di Kabupaten Wakatobi diujicobakan di tiga SD yaitu SD 1 Mola Utara, SD 1 Mandari II dan SD 1 Pongo. Kewajiban memasukkan mulok kelautan didasarkan pada surat resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi yang mulai berlaku tahun ajaran 2008, sebelumnya pelajaran mulok adalah bahasa Inggris dan bahasa Buton.

SD 1 Mola Utara telah melaksanakan pelajaran muatan lokal (mulok) kelautan sejak bulan Desember 2006. Pada saat ini pelajaran mulok kelautan hanya diberikan pada kelas 5 dan 6 saja, sesuai dengan materi bahan ajar yang tersedia dari TNC dan WWF. Mulok kelautan mulai diajarkan pada seluruh kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, pada tahun ajaran 2007 yaitu sejak sekolah ini menerima 2 set Buku Pesisir dan Laut Kita dari COREMAP. Serial buku ini terdiri dari 7 buku, yaitu buku kelas 1 sampai kelas 6 dan buku panduan guru. Setiap kelas mempunyai dua buku yang disimpan oleh wali kelas masing-masing. Sekolah ini baru mendapat tambahan buku pesisir dan laut kita. Pelajaran mulok kelautan tahun 2008 diajarkan seminggu sekali untuk dua jam pelajaran atau 2 x 35 menit. Guru di sekolah ini belum ada yang mengikuti pelatihan guru yang dilaksanakan oleh COREMAP, namun ada seorang guru yang pernah mengikuti

pelatihan di Hoga yang diselenggarakan oleh WWF dan TNC bulan Desember 2006.

Mulok Kelautan juga sudah diajarkan di SD Wandoka dan SD Waha. Sekolah-sekolah ini menggunakan serial Buku Pesisir dan Laut Kita dari COREMAP. Selain itu, MD Desa Waha juga telah mengunjungi SD dan SMP Waha untuk memberikan penjelasan tentang pelestarian terumbu karang dan mensosialisasikan kegiatan COREMAP di desa ini.

- **Kegiatan Pengawasan**

Kegiatan pengawasan sangat penting dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi terumbu karang dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut ini, terutama kegiatan yang merusak karang. Pengawasan di tingkat lokasi dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah dibentuk di ketiga lokasi COREMAP. Pokmaswas terdiri dari 5 anggota yang mewakili lingkungan dan masyarakat. Pokmaswas di Kelurahan Wandoka, misalnya, mewakili lingkungan yang terdapat di kelurahan ini, yaitu Lingkungan Antapia, Bira, Wandoka, Ampopu, dan Wova. Pokmaswas di Desa Waha juga terdiri dari 5 anggota, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengawasan ini cukup menarik, yaitu untuk mengawasi ibu-ibu yang menggunakan racun dan linggis untuk menangkap ikan pada waktu meti/surut.

Pokmaswas bertugas melakukan pengawasan di kawasan terumbu karang di desa/kelurahan. Kegiatan bervariasi antar lokasi, tergantung dari keaktifan, kebutuhan dan sarana yang dimiliki oleh desa/kelurahan. Pokmaswas di Desa Mola Selatan belum melakukan kegiatan pengawasan, bahkan rencana untuk pengawasanpun belum dibuat. Keadaan ini terutama dikarenakan tidak tersedianya sarana pengawasan seperti pompong, padahal pompong sangat penting sebagai alat transportasi untuk pengawasan. Peralatan pengawasan yang lain seperti HT, teropong dan radio, juga belum tersedia di lokasi ini. Satu-satunya sarana yang dimiliki adalah pondok pengawas yang

letaknya diperbatasan antara Desa Mola Selatan dan Nelayan Bakti. Pondok pengawas belum berfungsi, sehingga keberadaan pondok ini belum dapat meningkatkan kinerja pokmaswas dalam pengawasan terumbu karang di desa ini. Selain itu, biaya operasional untuk melakukan pengawasan juga belum tersedia, akibatnya pokmaswas belum melakukan patroli.

Pokmaswas di Kelurahan Wandoka sudah mulai melaksanakan tugasnya, yaitu melindungi perairan di wilayah pesisir dari pegeboman, pembiusan dan pengambilan batu karang. Pokmaswas dilengkapi sarana teropong, pelampung, kacamata dan sepatu snorkling. Armada pengawasan berupa pompong dilengkapi dengan mesin berkapasitas 220 pk juga tersedia di LPSTK. Armada pengawasan ini telah digunakan oleh pokmaswas untuk melakukan patroli sebanyak 5 kali sampai awal Mei 2008. Patroli dilaksanakan pada wilayah kelurahan dari Lingkungan Antapia sampai dengan Wanci. Biaya operasional patroli diperoleh dari COREMAP, terutama untuk bahan bakar sebanyak 5 liter dan honor anggota pengawas sebanyak Rp 50.000 – Rp 100.000 per anggota per patroli.

Kegiatan pengawasan juga dilakukan di Desa Waha oleh pokmaswas bersama-sama dengan jagawana dari taman nasional. Kegiatan patroli pokmaswas dibagi dalam dua kelompok. Anggota pokmaswas yang laki-laki bertugas melakukan patroli di laut, menggunakan sarana yang dimiliki COREMAP, termasuk perahu dan mesin ketinting serta teropong. Sedangkan anggota pokmaswas yang perempuan melakukan patroli di pantai, terutama mengawasi kegiatan ibu-ibu yang menangkap ikan dengan tuba yang merusak terumbu karang. Biaya operasional patroli sampai dengan Maret 2008 diperoleh dari dana *village grant*, berjumlah sekitar Rp 150.000 per patroli, terutama digunakan untuk pembelian solar sebanyak 10 liter dan uang rokok anggota pokmaswas. Sedangkan untuk patroli di pantai, biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp 100.000 per patroli. Kegiatan patroli dilakukan 4 kali per bulan.

- Kegiatan UEP

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan kegiatan COREMAP yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan modal usaha atau alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan pada masyarakat pesisir. Kegiatan UEP merupakan upaya untuk merealisasikan tujuan program, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, di samping penyelamatan terumbu karang.

Kegiatan UEP dilaksanakan dari dana *seed fund* yang telah disosialisasikan sejak akhir 2006. Kegiatan ini baru terlaksana di Kabupaten Wakatobi pada awal 2008. Dana *seed fund* semula direncanakan berjumlah Rp 50 juta, kemudian turun menjadi Rp 38 jutaan, dikarenakan adanya pemekaran desa/kelurahan menjadi 40 desa/kelurahan. Dana yang diterima di lokasi berjumlah Rp 19,375 juta. Besarnya *seed fund* yang diterima ini belum begitu jelas, karena pengelola program di tingkat lokasi mengatakan jumlah tersebut baru separoh atau 50 persen. Pengelola masih menunggu turunnya sisa dana untuk didistribusikan pada calon anggota yang baru. Tetapi seorang staf pengelola COREMAP Kabupaten Wakatobi menyatakan dana yang diberikan sudah 100 persen.

Kegiatan UEP dikelola oleh LKM dan dilaksanakan pada level masyarakat oleh pokmas, baik pokmas putera maupun puteri/jender. UEP idealnya dipilih berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di lokasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Usaha yang dikembangkan pokmas seharusnya sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RPTK.

Kegiatan UEP bervariasi antar lokasi. UEP di Desa Mola Selatan belum berjalan, terutama dikarenakan *seed fund* belum turun sampai awal Mei 2008. Belum turunnya dana berkaitan dengan permasalahan pengelola dana di desa ini dengan pihak Dinas DKP Wakatobi, namun pihak Dinas berjanji akan segera menyelesaikan masalah dan mendistribusikan dana tersebut pada pokmas. Kegiatan UEP

seharusnya sesuai dengan usaha yang tercantum dalam RPTK, namun pengurus COREMAP di desa ini belum mengetahui atau membaca RPTK. Kegiatan yang telah direncanakan, menurut informan kunci, ditetapkan oleh Dinas yaitu simpan pinjam untuk perempuan (SPP). Warga yang mendaftar sebanyak 50 orang, namun formulir yang diberikan hanya 5 formulir. Ketidakjelasan kegiatan UEP ini menimbulkan kecurigaan antar pengelola program, seperti LPSTK dan LKM, dan ketua dan bendahara lembaga-lembaga tersebut, dan antara masyarakat dengan pengelola COREMAP di lokasi ini.

Kegiatan UEP mulai berjalan dengan turunnya dana *seed fund* di Kelurahan Wandoka bulan April 2008. Jenis usaha yang dilakukan dan jumlah anggota pokmas yang mendapatkan dana tidak sepenuhnya mengacu pada RPTK, karena baik pengelola COREMAP maupun anggota pokmas di kelurahan ini belum membaca dokumen tersebut.

Kelurahan Wandoka mendapat dana *seed fund* sebesar Rp 19.375.000. Dana ini telah didistribusikan pada 6 pokmas sebesar Rp 15.000.000 atau Rp 2.500.000 per pokmas. Jumlah anggota yang mendapat dana ditentukan oleh ketua lingkungan, misalnya di lingkungan 6, anggota pokmas hanya 2 orang, meskipun menurut kesepakatan sebelumnya jumlah anggota sebanyak 5 orang. Jenis usaha juga tergantung pada kesepakatan anggota pokmas, seperti pokmas di lingkungan 6 memilih usaha perdagangan ikan (*palele*), namun karena produksi ikan berkurang secara signifikan, maka kedua anggota pokmas ini sepakat untuk memodifikasi usahanya menjadi usaha jual beli ikan dan sayur di Lasalimu. Usaha ini belum direalisasikan sampai awal Mei 2008.

Anggota pokmas di Kelurahan Wandoka diharuskan mengembalikan dana dalam waktu 8 bulan dengan bunga sebesar 2 persen atau sebanyak Rp 250.000 per bulan. Angsuran bulan pertama sudah dilunasi, diambil dari dana yang diterima. Anggota pokmas untuk mendapatkan dana harus memenuhi persyaratan yaitu menyerahkan fotocopy KTP dan menandatangani atau memberikan cap jempol pada surat peminjaman dana.

Pokmas Desa Waha juga telah mendapat dana *seed fund* bulan Februari 2008, karena itu kegiatan UEP sudah mulai diimplementasikan di desa ini. Jumlah dana yang diterima sama dengan di Kelurahan Wandoka yaitu Rp 19.375.000. Dana tersebut dikelola oleh 3 pokmas, yaitu kelompok konservasi, kelompok usaha produktif dan kelompok jender. Anggota yang mendapat dana berjumlah 19 orang terdiri dari 7 orang dari pokmas konservasi, 5 dari usaha produktif dan 7 lagi dari kelompok jender. Masing-masing anggota menerima dana sebesar Rp 1.000.000, kecuali seorang anggota yang meminjam Rp 500.000. Jenis usaha yang dikembangkan ketiga pokmas kebanyakan adalah pembuatan makanan, seperti kue, dendeng dan abon ikan, dan perdagangan sembako.

Pokmas konservasi lebih terfokus pada pembuatan dan penjualan kue Karasi dan sembako. Kue Karasi banyak dibuat karena rasanya enak dan tahan lama (sekitar sebulan), kue ini kemudian dijual di pasar dan pelabuhan. Usaha kue cukup menguntungkan dari modal sebesar Rp 50.000 dapat memberikan keuntungan sebanyak Rp 100.000 atau dua kali lipat dari modal.

Kelompok jender berkonsentrasi pada pengolahan pasca tangkap, yaitu membuat dan menjual dendeng dan abon ikan, meskipun ada juga anggota kelompok yang menjual minyak tanah. Usaha pengolahan pasca tangkap juga cukup menguntungkan, sekitar 2,5 kali lipat dari modal. Sedangkan usaha kelompok usaha produktif terfokus pada perdagangan, seperti sembako dan makanan (kasuami, roti dan kue). Ibu-ibu yang terlibat dalam pokmas ini pernah mendapatkan pelatihan keterampilan membuat makanan, seperti kue karasi, dendeng ikan, puding dan es rumput laut.

Dana dari *seed fund* sangat dibutuhkan di Desa Waha, karena kondisi ekonomi masyarakat masih memprihatinkan. Keadaan ini berkaitan erat dengan terbatasnya sarana melaut sebagian besar nelayan, sehingga mereka tidak bisa melaut ke laut lepas. Sedangkan ibu-ibu/janda yang membantu keuangan keluarga menangkap ikan menggunakan tuba yang merusak karang. *Seed fund* dapat menambah modal usaha mereka atau sebagai alternatif usaha untuk mengganti kegiatan yang merusak.

Pengelolaan *seed fund* di Desa Waha cukup baik. Keadaan ini dapat diketahui dari adanya perencanaan yang disepakati pengelola COREMAP dan sebagian masyarakat, terutama anggota pokmas, seperti jenis usaha, pendataan anggota dan persyaratan untuk mendapatkan dana, di samping itu pengelola juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan berusaha anggota pokmas.

Anggota yang mendapatkan *seed fund* harus memenuhi persyaratan. Persyaratan disepakati pengelola COREMAP dengan sebagian masyarakat melalui 3 kali pertemuan, antara lain: permohonan anggota, pernyataan, kesepakatan bunga sebesar 1,5 persen, jaminan berharga senilai uang yang dipinjam, tidak ada sangkutan hutang dengan pihak lain, waktu pengembalian selama 12 bulan, dan apabila dalam 3 bulan berturut-turut tidak membayar pengembalian dana, maka setoran pertama tersebut dinyatakan batal. Anggota sebelum menerima dana harus menyetor pengembalian dana untuk 1 bulan sebesar Rp 84.000 untuk setoran pokok dan Rp 15.000 untuk bunga. Bunga Rp 15.000 ini akan dipergunakan untuk administrasi sebesar Rp 10.000 dan untuk pengelola yang menagih uang sebesar Rp 5.000. Pembagian ini memberikan insentif bagi penarik dana untuk giat bekerja. Jumlah Rp 5.000 cukup berarti di lokasi ini, karena itu sistem insentif dapat menarik minat anggota untuk melakukan tugasnya. Persyaratan bunga di Desa Waha tidak memberatkan anggota dan bahkan cukup ringan, karena masyarakat di desa ini terbiasa dengan koperasi keliling dengan bunga yang jauh lebih tinggi sekitar 20-25 persen dan harus membayar setiap hari. Pengelola COREMAP dan anggota pokmas juga sepakat bahwa anggota yang tidak membayar akan diumumkan di pondok informasi dan mesjid, kesepakatan ini merupakan cara strategis untuk menghindari penunggakan pinjaman.

Selain kegiatan UEP menggunakan dana bergulir, di Desa Waha terdapat kegiatan UEP lain, seperti rumpon. Rumpon dikelola oleh LPSTK, letaknya cukup jauh dari desa, sekitar 2 jam perjalanan menggunakan perahu nelayan. Rumpon terbuat dari bambu dan telah dipasang selama satu bulan pada awal Mei 2008. Upaya pemasangan rumpon ini sudah mulai memberikan dampak positif, digambarkan

dari banyaknya ikan dirumpon tersebut dan nelayan-nelayan mulai mancing di lokasi tersebut.

Bab ini menggambarkan kegiatan COREMAP dan implementasinya di Kabupaten Wakatobi. Pelaksanaan program ini mengalami perkembangan antara tahun 2006 dan 2008, meskipun belum optimal. Pelaksanaan program di tingkat kabupaten pada awalnya mengalami kendala dan keterlambatan, namun PMU dengan komponen-komponennya kemudian berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan COREMAP. Kendala dan keterlambatan pelaksanaan di tingkat kabupaten berimplikasi pada pelaksanaan di tingkat lokasi. Organisasi pengelola di tingkat desa/kelurahan, seperti LPSTK dan LKM, dan di tingkat masyarakat, seperti kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), telah terbentuk di semua lokasi kajian, namun pengelola program ini belum berfungsi secara optimal. Keterlibatan pengelola program di tingkat lokasi dalam penyusunan RPTK, yang menjadi dasar pengelolaan terumbu karang, di semua lokasi sangat terbatas pada penggalan potensi. Kebanyakan pengurus bahkan ketua LPSTK belum pernah membaca RPTK yang disusun oleh Seto dan pengelola program tingkat kabupaten. DPL sudah ditentukan di lokasi Wandoka dan Waha, namun belum beroperasi karena belum disepakati masyarakat. Pokmaswas yang berwenang untuk mengawasi kawasan karang juga belum dapat beroperasi secara optimal, karena keterbatasan armada dan peralatan patroli. Demikian juga dengan pokmas belum sepenuhnya dapat melaksanakan kegiatan, dikarenakan keterlambatan turunnya *seed fund* (di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha) atau belum turunnya dana (di Desa Mola Selatan), dan tidak transparannya pembagian dana pada anggota pokmas (di Kelurahan Wandoka). Karena itu dampak kegiatan COREMAP untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di ketiga lokasi COREMAP.



BAB III

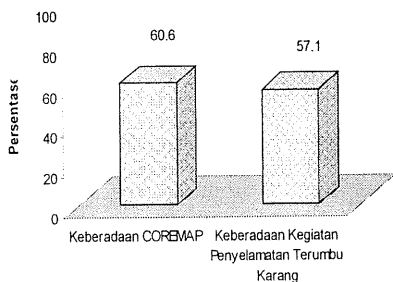
PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN COREMAP

Bab ini menggambarkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan COREMAP di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Analisa dimulai dari pengetahuan yang paling mendasar, yaitu tentang keberadaan program, kemudian dilanjutkan dengan analisa tentang pengetahuan dan keterlibatan rumah tangga dalam kegiatan-kegiatan COREMAP. Pada bagian akhir kajian ini akan mengulas manfaat kegiatan bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

3.1. Pengetahuan Tentang Keberadaan COREMAP dan Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang

Diagram 3.1 menginformasikan bahwa lebih dari separoh responden mengetahui adanya COREMAP di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Gambaran ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi COREMAP belum dilakukan secara optimal, karena masih banyak anggota masyarakat di ketiga desa/kelurahan, hampir separoh responden yang belum mengetahui adanya program ini. Informasi keberadaan program seharusnya dapat dilakukan dengan mudah karena pemukiman penduduk yang mengelompok dan hubungan sosial antar anggota masyarakat yang masih erat di ketiga desa/kelurahan.

Diagram 3.1. Persentase Responden Menurut Pengetahuan tentang Keberadaan COREMAP dan Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang



Sumber: *Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, PPK-LIPI (2008)

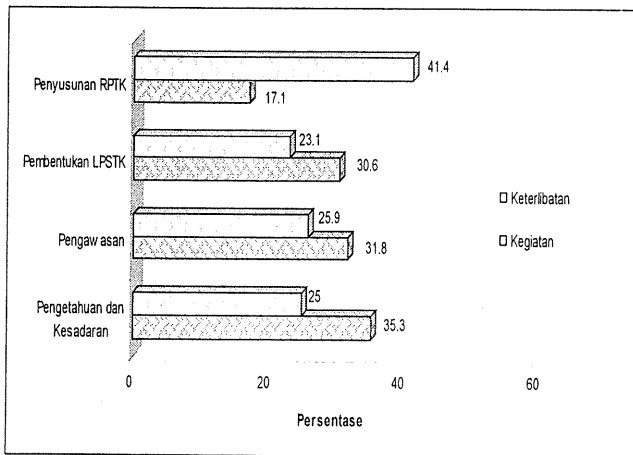
Diagram 3.1 ini juga mengungkapkan bahwa pengetahuan responden tentang keberadaan kegiatan penyelamatan terumbu karang, lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan tentang keberadaan COREMAP. Padahal kegiatan penyelamatan terumbu karang juga dilakukan oleh *stakeholders* lain, seperti WWF, TNC dan Taman Nasional. Frekuensi dan jumlah warga yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan ketiga *stakeholders* ini memang lebih rendah jika dibandingkan dengan kegiatan COREMAP.

3.2. Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Kegiatan-Kegiatan COREMAP

Diagram 3.2. menggambarkan persentase responden yang mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan COREMAP, keterlibatan dalam kegiatan yang diketahuinya, dan pendapat tentang manfaat kegiatan tersebut. Responden yang mengetahui adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan terumbu karang jumlahnya cukup kecil, hanya sekitar sepertiga dari total responden (sebanyak 170 rumah tangga). Dari sepertiga responden yang tahu ini, hanya seperempat yang terlibat

dalam kegiatan penyadaran masyarakat di semua lokasi kajian. Keadaan ini mungkin berkaitan dengan minimnya kegiatan penyadaran masyarakat, sehingga kegiatan tersebut kurang diketahui masyarakat dan kurangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Diagram 3.2. Persentase Responden Menurut Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran, Pengawasan, Pembentukan LPSTK dan Penyusunan RPTK



Sumber: *Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, PPK-LIPI (2008)

Gambaran serupa juga terjadi pada kegiatan perlindungan atau pengawasan wilayah pesisir dan laut. Responden yang mengetahui kegiatan ini persentasenya lebih rendah daripada kegiatan penyadaran masyarakat, kurang dari sepertiga total responden, namun jumlah yang terlibat dalam kegiatan pengawasan persentasenya hampir sama. Gambaran ini juga mencerminkan masih minimnya kegiatan pengawasan di ketiga lokasi COREMAP, sehingga kurang diketahui oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat yang disebut kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), kegiatan kelompok ini masih sangat terbatas, bahkan

pokmaswas Desa Mola Selatan belum pernah melakukan kegiatan pengawasan di desa ini.

Pengetahuan responden tentang pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan dua kegiatan sebelumnya, digambarkan dari persentase responden yang mengetahui kegiatan ini. Responden yang tahu ini, hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam pembentukan LPSTK (lihat Diagram 3.2.). Keadaan ini dapat dimengerti karena pembentukan LPSTK dilakukan dalam pertemuan yang hanya melibatkan sekelompok kecil masyarakat saja (penjelasan detail lihat penjelasan pada bagian sebelumnya).

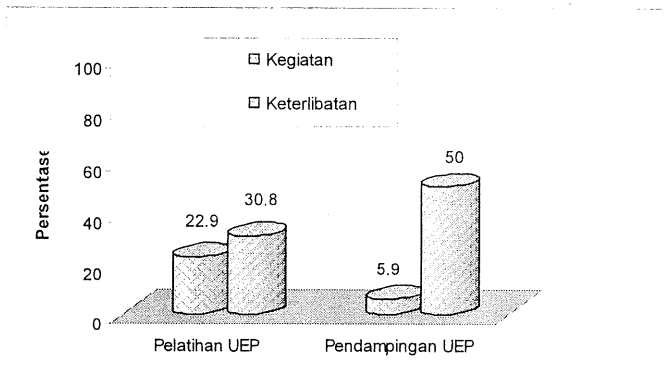
Kegiatan COREMAP yang paling sedikit diketahui masyarakat adalah penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), kurang dari 20 persen dari total responden yang tahu kegiatan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan proses penyusunan dokumen yang hanya melibatkan kelompok kecil masyarakat dalam suatu pertemuan yang bertujuan menggali potensi masyarakat dan daerah. Sedangkan penyusunan dokumen dilakukan oleh Seto dan pengelola COREMAP kabupaten. Meskipun jumlah yang mengetahui kegiatan ini sedikit, hampir separoh dari mereka yang tahu ini terlibat dalam penyusunan RPTK di desa/kelurahannya.

Diagram 3.3. menginformasikan pengetahuan dan keterlibatan responden dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Responden yang mengetahui adanya pelatihan sangat sedikit, kurang dari seperempat dari total responden. Responden yang tahu ini, sebagian kecil terlibat dalam pelatihan. Responden yang mengetahui adanya pendampingan untuk UEP jumlahnya jauh lebih sedikit, kurang dari 10 persen. Hanya sebagian responden tersebut terlibat dalam kegiatan pendampingan UEP.

Kurangnya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan UEP berkaitan dengan minimnya kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan UEP baru berjalan bulan April 2008, setelah turunnya dana *seed fund* di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Sedangkan UEP di Desa Mola Selatan

bahkan belum dilaksanakan, karena *seed fund* belum turun sampai awal Mei 2008.

Diagram 3.3. Persentase Responden Menurut Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Pelatihan dan Pendampingan UEP



Sumber: *Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, PPK-LIPI (2008)

- Respon Responden yang Belum Mengetahui Kegiatan COREMAP

Hasil kajian mengungkapkan bahwa sebagian besar responden (sebanyak 105 rumah tangga atau 61,8 persen) belum mengetahui dan belum terlibat dalam kegiatan COREMAP. Sekitar separoh dari responden tersebut (53 persen) mempunyai keinginan untuk mengikuti kegiatan COREMAP. Kegiatan yang ingin diikuti responden bervariasi, namun kebanyakan adalah kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), terutama budidaya ikan dan biota laut, usaha perdagangan dan pengolahan makanan. Keinginan ini dapat dilaksanakan menurut sebagian responden apabila COREMAP memberikan pelatihan dan bimbingan. Selain itu, sebagian responden berkeinginan untuk berpartisipasi dalam penyelamatan terumbu

karang dan perlindungan serta pengawasan sumber daya pesisir dan laut di desa/kelurahan.

Responden yang belum mempunyai keinginan untuk ikut terlibat dalam kegiatan COREMAP jumlahnya juga banyak sekitar 47 persen. Responden memberikan alasan yang bermacam-macam, antara lain tidak mempunyai waktu karena sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain, sering keluar desa/kelurahan, belum mengetahui tujuan dan manfaat COREMAP, dan faktor usia atau kesehatan yang tidak memungkinkan responden aktif dalam kegiatan COREMAP.

3.3. Manfaat COREMAP Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat

- Kegiatan Ekonomi

Tabel 3.1. menggambarkan bahwa masyarakat yang mengetahui kegiatan ekonomi yang dilakukan COREMAP di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka, dan Desa Waha jumlahnya masih sedikit dan bervariasi menurut jenis kegiatan. Responden yang mengetahui pemilihan jenis usaha yang tidak merusak, jumlahnya kurang dari sepertiga total responden. Responden yang tahu, kebanyakan, lebih dari dua pertiga, tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Responden yang terlibat, meskipun persentasenya kecil, semuanya mengatakan kegiatan tersebut bermanfaat bagi kehidupan mereka dan penyelamatan terumbu karang di lokasi ini. Informasi tentang pemilihan jenis usaha yang tidak merusak diperoleh dari motivator desa dan pengurus COREMAP, kepala/aparat desa/kelurahan, dan anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan COREMAP.

Responden yang mengetahui adanya pemberian dana bergulir untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masyarakat jumlahnya juga sedikit, kurang dari seperempat dari total responden. Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah untuk kegiatan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak.

Gambaran ini mengindikasikan informasi tentang dana bergulir UEP belum tersebar luas di kalangan masyarakat di ketiga lokasi kajian. Hal ini juga dapat diketahui dari responden yang terlibat masih

sangat terbatas, kurang dari sepertiga dari jumlah responden yang mengetahui dana bergulir tersebut. Responden yang terlibat sebagian besar mengatakan bahwa pemberian dana bergulir UEP ini bermanfaat bagi kegiatan ekonomi mereka. Informasi tentang pemberian dana bergulir diperoleh responden dari motivator/pengurus COREMAP, pimpinan informal dan formal di desa/kelurahan.

Tabel 3.1. Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Ekonomi yang Dilakukan COREMAP dan Manfaatnya Bagi Masyarakat (Persentase Responden yang Menjawab ‘Ya’)

Kegiatan Ekonomi	Pengetahuan		Keterlibatan		Manfaat	
	N	%	N	%	N	%
Pemilihan Jenis Usaha yang Tidak Merusak	55	32,7	17	30,9	17	100,0
Pemberian Dana Bergulir untuk UEP	40	23,8	12	30,0	10	83,3
Pelatihan dan Bimbingan untuk UEP	42	25,1	14	33,3	14	100,0

Sumber: *Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, PPK-LIPI (2008)

Tabel 3.1. juga mengungkapkan bahwa responden yang mengetahui adanya pelatihan dan bimbingan untuk kegiatan UEP jumlahnya juga masih terbatas, sekitar seperempat dari total responden. Jumlah yang terlibat juga masih minim, hanya sepertiga dari jumlah responden yang mengetahui kegiatan tersebut. Keterlibatan mereka cukup ‘bermakna’, karena semuanya menyatakan kegiatan pelatihan dan bimbingan ini bermanfaat bagi kegiatan ekonomi mereka. Informasi tentang adanya pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dalam berusaha didapatkan dari motivator/pengurus COREMAP dan anggota masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan COREMAP.

- **Jenis-jenis Usaha**

Hasil survei mengungkapkan bahwa responden yang mengetahui jenis-jenis usaha yang dikembangkan dari dana COREMAP

jumlahnya cukup kecil, hanya 60 responden dari total responden sebanyak 170 rumah tangga atau 35,3 persen. Jenis usaha yang paling banyak diketahui responden adalah perdagangan/warung, meskipun jumlahnya relatif kecil, kurang dari separuh responden. Jenis usaha yang juga banyak diketahui responden adalah budidaya dan pembuatan makanan/kue. Sedangkan jenis usaha yang paling sedikit diketahui responden adalah kerajinan/souvenir dan ternak ayam/bebek, kurang dari 10 persen (lihat Tabel 3.2.).

Dari tabel terungkap bahwa responden yang mengetahui jenis-jenis usaha belum tentu terlibat dengan usaha tersebut. Sebagian besar responden yang mengetahui jenis-jenis usaha ini terlibat dalam usaha pembuatan makanan/kue/minyak, perdagangan/warung, dan pengolahan hasil laut. Gambaran ini berkaitan erat dengan jenis usaha yang banyak dilakukan kelompok masyarakat yang didanai oleh COREMAP, terutama di Desa Waha, dan Kelurahan Wandoka. Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden yang terlibat dengan usaha budidaya, perikanan tangkap dan ternak. Gambaran ini dapat dimengerti karena usaha budidaya, seperti karamba ikan/udang/kepiting/biota laut lain dan usaha perikanan tangkap pelaksanaannya masih sangat terbatas di semua lokasi COREMAP.

Tabel 3.2. Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Usaha dari Kegiatan COREMAP dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha (Persentase Responden yang Menjawab ‘Ya’)

Jenis Usaha	Pengetahuan		Keterlibatan		Manfaat	
	N	%	N	%	N	%
Perdagangan/Warung	27	42.2	15	60.0	10	83.3
Budidaya	22	36.7	2	9.5	0	0.0
Perikanan Tangkap	15	25.0	2	13.3	2	00.0
Ternak Ayam/Bebek/Itik dll	7	11.7	1	14.3	1	00.0
Pembuatan Makanan/Kue/Minyak	21	35.0	14	66.7	14	00.0
Pengolahan Hasil Laut	12	20.0	7	58.3	7	00.0
Kerajinan/Souvenir	5	8.5	1	20.0	1	100.0

Sumber: *Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, PPK-LIPI (2008)

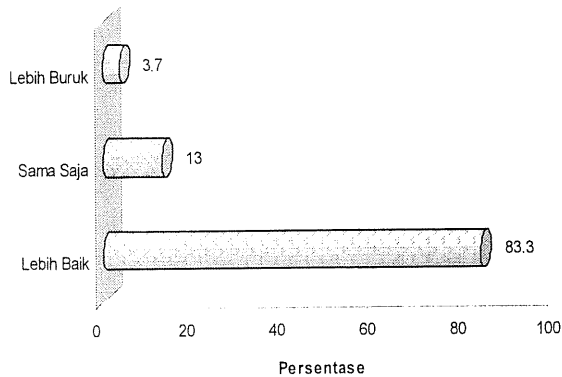
Jenis-jenis usaha yang didanai oleh COREMAP memberikan manfaat bagi masyarakat yang terlibat, kecuali usaha budidaya. Semua responden yang terlibat usaha perikanan tangkap, ternak, pembuatan makanan/kue/minyak, dan kerajinan/souvenir menyatakan usaha-usaha tersebut bermanfaat bagi kegiatan ekonomi mereka. Responden yang terlibat dalam usaha perdagangan/warung sebagian besar juga mengatakan usaha ini bermanfaat, meskipun beberapa responden memberikan pendapat yang berbeda mengingat usaha mereka baru saja dimulai jadi belum memberikan keuntungan.

- **Kondisi Ekonomi Keluarga**

Gambaran kondisi ekonomi keluarga diperoleh dari pendapat responden yang mengetahui paling tidak satu kegiatan COREMAP di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka, dan Desa Mola Selatan. Hanya sebagian kecil responden (31,7 persen) yang dapat memberikan gambaran ini.

Diagram 3.4. menginformasikan bahwa kehidupan ekonomi keluarga sebagian besar responden (yang mengetahui COREMAP) kondisinya sekarang lebih baik jika dibandingkan sebelum adanya program COREMAP. Hanya sebagian kecil responden (yang mengetahui COREMAP) yang menyatakan kondisi ekonomi keluarganya sekarang sama saja dengan sebelum adanya COREMAP. Sedangkan responden yang mengatakan kondisi ekonomi keluarganya sekarang lebih buruk dari sebelum adanya program ini jumlahnya sangat kecil, hanya beberapa responden saja.

Diagram 3.4. Persentase Responden Menurut Pendapat tentang Kondisi Ekonomi Keluarga Sekarang dan Sebelum Adanya COREMAP



Sumber: *Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, PPK-LIPI (2008)

Kebanyakan responden yang kehidupan ekonomi keluarganya lebih baik dari sebelum adanya program COREMAP berpendapat bahwa perbaikan ekonomi mereka tidak berkaitan langsung dengan kegiatan COREMAP, karena kegiatan usaha ekonomi baru dimulai dan jumlah responden yang mendapatkan dana dari usaha tersebut masih sangat terbatas. Kehidupan ekonomi yang lebih baik dalam dua tahun terakhir lebih dikarenakan meningkatnya pendapatan rumah tangga dari hasil produksi, terutama ikan yang harganya naik cukup substansial, dan pendapatan dari sumber lainnya.

Namun beberapa responden, khususnya yang terlibat dan mendapat dana dari kegiatan UEP, mengemukakan bahwa dana bergulir tersebut telah membantu kegiatan ekonomi atau menambah modal usahanya. Pendapat ini terutama dikemukakan oleh responden dari Desa Waha dan Kelurahan Wandoka. Sedangkan responden dari Desa Mola Selatan memberikan pendapat sebaliknya, karena dana *seed fund* belum turun di desa ini.

Bab ini menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang COREMAP dan keterlibatan mereka dalam kegiatan ini masih sangat minim. Meskipun sebagian besar responden mengetahui keberadaan COREMAP di daerahnya, pengetahuan mereka hanya terbatas pada proyek penyelamatan terumbu karang. Mereka belum mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam kegiatan. Keadaan ini berkaitan erat dengan masih terbatasnya sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan COREMAP dan mekanisme pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih terfokus pada penyadaran masyarakat akan pentingnya menyelamatkan dan melestarikan terumbu karang, namun masih kurang menyentuh pada kegiatan program dan proses pelaksanaannya.

BAB IV

PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Program COREMAP yang telah dilaksanakan selama dua tahun di Kabupaten Wakatobi diharapkan memberikan dampak positif bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Peningkatan pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan penduduk di lokasi COREMAP. Dalam penelitian ini pendapatan penduduk dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu pendapatan di tingkat kabupaten/kota dan pendapatan rumah tangga di tingkat desa/kelurahan yang termasuk lokasi COREMAP. Pendapatan di tingkat kabupaten/kota difokuskan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh dari data sekunder Biro Pusat Statistik (BPS). Pendapatan rumah tangga di tingkat desa/kelurahan diperoleh melalui survei.

4.1. Pendapatan di Tingkat Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Kabupaten Wakatobi berdasar harga konstan tahun 2000, menunjukkan adanya perkembangan sekitar 5,9 persen per tahun pada tahun 2003-2006. Peningkatan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang meningkat sekitar 25,7 persen per tahun. Jika dihitung berdasarkan harga berlaku dalam periode yang sama terjadi peningkatan PDRB sebesar 26,2 persen. Peningkatan pendapatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif tingkat perekonomian Kabupaten Wakatobi.

Struktur PDRB Kabupaten Wakatobi tahun 2006 secara umum tidak mengalami pergeseran yang berarti jika dibandingkan dengan tahun 2002 dan 2003. Keadaan ini berarti sumbangan masing-masing lapangan pekerjaan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku relatif

stabil. Pertanian tahun 2006 masih menjadi lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yaitu 50,7 persen. Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian diikuti perdagangan, hotel dan restoran yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,5 persen dan 13,4 persen.

Sumbangan sektor pertanian yang begitu besar terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan bagi sebagian besar masyarakat Wakatobi. Hal ini berkaitan dengan besarnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian (62,2 persen pada tahun 2006). Sub sektor pertanian bahan makanan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sub sektor yang lain (30,5 persen), kemudian diikuti oleh perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 11,31 persen.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wakatobi menurut Lapangan Pekerjaan atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (Jutaan Rp)

No	Lapangan Usaha	2003		2005		2006	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pertanian	66.797,4	37,2	67.993,9	39,0	69.666,1	37,7
2.	Pertambangan dan Penggalian	6.914,1	3,9	7.011,5	4,0	7.527,0	4,1
3.	Industri Pengolahan	9.006,3	5,0	8.663,5	4,9	9.037,9	4,9
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	2.454,4	1,4	4.187,3	2,4	4.432,9	2,4
5.	Konstruksi/Bangunan	15.565,5	8,7	8.426,8	4,8	9.627,1	5,2
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	36.250,7	20,2	24.794,7	14,2	25.422,2	13,8
7.	Angkutan dan Komunikasi	4.592,6	2,6	4.661,9	2,7	5.200,4	2,8
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11.434,0	6,4	12.529,5	7,2	15.678,8	8,5
9.	Jasa-jasa	26.759,1	14,9	35.889,9	20,6	38.070,1	20,6
Total		151.872,6	100	174.158,95	100	184.662,7	100

Sumber : *Wakatobi Dalam Angka*, BPS (2007)

* Angka sementara

Meskipun wilayah Wakatobi 97 persen berupa lautan, tetapi kontribusi sumber daya laut jauh lebih rendah dari sumber daya

daratan (perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan peternakan) dalam menyerap tenaga kerja. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Wangi-Wangi, Tomia dan Binongko bermata pencaharian di sub-sektor perkebunan, dengan komoditi utama berupa jambu mete dan kelapa. Satu kecamatan yang sebagian besar penduduknya bekerja di sub-sektor perikanan adalah Kecamatan Kaledupa (47 persen penduduk).

Data BPS Kabupaten Wakatobi tahun 2007 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat kabupaten ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2003 sampai 2006. Pada 2003 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 2.194.453,3 rupiah kemudian meningkat menjadi 4.244.112,6 rupiah tahun 2006 atau terjadi peningkatan sekitar 23,6 persen per tahun. Peningkatan pendapatan juga terjadi pada pendapatan per kapita berdasarkan atas harga konstan tahun 2000 yang meningkat sebesar 3,7 persen per tahun. Peningkatan pendapatan per kapita dapat menjadi indikasi peningkatan kesejahteraan penduduk selama empat tahun terakhir.

Table 4.2. Jumlah dan Persentase Keluarga Miskin di Wakatobi, Tahun 2004

Kecamatan	KK	Jumlah miskin			Persentase (%)		
		Sangat miskin	Miskin	Total	Sangat miskin	Miskin	Total
Binongko	3430	1676	483	2159	48,9	14,1	62,9
Tomia	4800	1419	1110	2529	29,6	23,1	52,7
Kaledupa	4554	941	856	1797	20,7	18,8	39,5
Wangi-wangi	5769	1084	1434	2518	18,8	24,9	43,6
Wangi-wangi selatan	5512	1152	1976	3128	20,9	35,8	56,7
Total	24065	6272	5859	12131	26,1	24,3	50,4

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, 2007

Meskipun pendapatan mengalami peningkatan, tetapi proporsi penduduk miskin di Wakatobi masih tinggi. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi (24,9 persen) tahun 2006, lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan kemiskinan tingkat provinsi dan Indonesia. Angka kemiskinan lebih tinggi lagi jika didasarkan pada data BPS setempat, proporsi penduduk yang termasuk keluarga miskin mencapai 50,4 persen, terdiri dari 26,1

persen sangat miskin dan 24,3 persen keluarga miskin. Kemiskinan terbesar terdapat di Binongko (62,9 persen) dan terkecil berada di Kaledupa (39,5 persen).

4.2. Pendapatan Penduduk di Lokasi COREMAP

Perkembangan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Wakatobi tahun 2006-2008 diperoleh melalui survei terhadap 170 rumah tangga di tiga desa/kelurahan yang disurvei tahun 2006, yaitu Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Pada 2008 ketiga desa/kelurahan ini telah mekar menjadi 8 desa/keurahan, tetapi dalam penelitian ini desa pecahan dimasukkan ke dalam desa Induk (tahun 2006), sehingga perkembangan pendapatan di ketiga desa dapat dibandingkan.

Pendapatan rumah tangga, sebagaimana definisi yang digunakan tahun 2006, adalah pendapatan bersih rumah tangga dalam satu tahun atau satu bulan terakhir. Besarnya pendapatan dihitung berdasarkan selisih antara penghasilan dari hasil produksi dan biaya produksi yang diterima oleh rumah tangga. Pendapatan rumah tangga diperoleh dari semua anggota rumah tangga yang mencakup pendapatan dari pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan. Pendapatan perkapita didapatkan dari total pendapatan rumah tangga dibagi dengan jumlah ART yang bersangkutan. Secara khusus perkembangan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan dilihat berdasarkan statistik pendapatan menurut musim serta distribusi rumah tangga menurut besar pendapatan dan musim.

4.2.1. Pendapatan Rumah Tangga (RT)

Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan sebesar 49,6 persen atau 24,9 persen per tahun, dari 598.522 rupiah tahun 2006 menjadi 895.499 rupiah per bulan (tabel 4.3). Besarnya peningkatan bervariasi antar lokasi dengan persentase tertinggi (61,7 persen) terdapat pada rumah tangga di Desa Waha dan sebaliknya persentase

pendapatan terendah (38,6 persen) pada rumah tangga di Desa Mola Selatan (lihat Lampiran 4.1. dan 4.2.).

Peningkatan hampir sama yaitu sebesar 49,0 persen terjadi pada pendapatan per kapita selama dua tahun terakhir. Persentase peningkatan pendapatan per kapita dan rumah tangga ini mendekati persentase peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Wakatobi selama tahun 2005-2006 sebesar 23,35 persen. Peningkatan pendapatan tersebut, secara umum menggambarkan peningkatan kesejahteraan penduduk di lokasi penelitian. Peningkatan pendapatan telah melebihi nilai inflasi di daerah selama dua tahun terakhir.

Meskipun demikian, peningkatan pendapatan tersebut tampaknya tidak ada kaitannya dengan program COREMAP di daerah penelitian, karena program ini belum berjalan secara optimal. Pada waktu penelitian ini dilakukan, program usaha ekonomi produktif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk, baru berjalan selama 2 bulan. Dana yang digulirkan untuk masyarakatpun sangat rendah (sekitar 19 juta/desa), sehingga masing-masing rumah tangga yang menjadi anggota pokmas hanya mendapat kucuran dana sekitar atau bahkan kurang dari satu juta rupiah. Rumah tangga untuk menjadi anggota pokmas harus menunggu giliran dengan waktu yang belum bisa ditentukan.

Namun, sebagian masyarakat tetap menganggap bahwa mereka sangat membutuhkan dana dari COREMAP, terutama untuk tambahan modal kerja. Salah satu Motivator Desa Waha mengungkapkan meskipun dana bergulir atau *seed fund* kecil, tetapi sangat bermanfaat terutama bagi warga yang biasa berhutang ke koperasi dengan bunga yang lebih tinggi. Dana *seed fund* saat ini terdistribusi pada 5 kelompok masing-masing beranggotakan 5 orang, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan dana sekitar 2,5 juta. Minat penduduk untuk menggunakan dana cukup tinggi terbukti dari antrian warga yang ingin meminjam. Pemberian dana bergulir dari COREMAP menimbulkan konflik di Waha karena ada pemekaran Desa Waha menjadi tiga desa. Masing-masing desa ingin mengelola *seed fund*. Hal berbeda terjadi di Wandoka, dimana *seed fund* langsung dikelola oleh masing-masing kelompok yang diketuai oleh

ketua lingkungan. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dana tersebut karena tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana. Masyarakat desa/kelurahan pada dasarnya saling curiga, sehingga menimbulkan konflik yang cukup rumit diantara mereka berkaitan dengan dana bergulir tersebut.

Tabel 4.3. Statistik Pendapatan Penduduk di Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008

Pendapatan per bulan	Total		Perkembangan (%)
	2006	2008	
1. Rata-rata Rumah Tangga (RT)	598.522	895.489	49,6
2. Median Pendapatan RT	453.333	608.333	34,2
3. Minimum pendapatan RT	5.000	41.666	733,3
4. Maksimum pendapatan RT	4.583.333	5.966.666	30,2
5. Per kapita	132.711	197.720	49,0

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2006 dan 2008).

Kasus yang berbeda terjadi di Desa Mola Selatan yang selama ini belum menerima dana *seed fund*. Ketua LKM setempat masih memiliki beban pinjaman yang cukup besar dengan DKP, sehingga pengelola COREMAP daerah belum berani mencairkan dana kepada masyarakat. Karena dana belum turun, sampai saat ini belum ada kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan di Mola Selatan. Kegiatan COREMAP seperti budidaya kerapu yang sedianya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa ini terbengkalai dan tidak terurus. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada program COREMAP sebelumnya juga gagal, karena tidak ada pengelolaan yang baik. Dana COREMAP yang sedianya digunakan untuk peningkatan usaha produktif masyarakat seolah terbuang tanpa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Hasil kajian mengungkap terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara pendapatan rumah tangga tertinggi dan terendah. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan antar rumah tangga yang tidak merata. Nilai pendapatan tertinggi bahkan mencapai 100 kali lebih dari pendapatan terendah. Variasi rata-rata pendapatan rumah tangga di Wakatobi menurut desa/kelurahan tahun 2008 hampir sama dengan tahun 2006. Rata-rata pendapatan tertinggi terdapat di Desa Waha (Rp

1.195.405) dan terendah terdapat di Kelurahan Wandoka (Rp 895.489). Rata-rata pendapatan RT di Desa Mola Selatan hampir sama dengan Kelurahan Wandoka (Rp 856.483). Pola yang sama terjadi pada pendapatan per kapita (lihat Lampiran 4.1.).

Tingginya perbedaan antara rata-rata pendapatan rumah tangga di Waha, Wandoka dan Mola Selatan berkaitan dengan sumber mata pencaharian penduduk di daerah setempat. Dari sisi kegiatan kenelayanan, penduduk Waha dan Mola Selatan sebagian kecil bekerja sebagai nelayan ikan tuna di laut dalam. Ikan ekspor ini harganya cukup mahal, sehingga pendapatan nelayan lebih besar, jika dibandingkan dengan pendapatan penduduk di Kelurahan Wandoka yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani tanaman pangan dengan penghasilan yang rendah. Berbeda halnya dengan Mola Selatan yang hampir seluruh warganya tidak ada yang mendapat penghasilan dari sektor pertanian tanaman keras dan pangan. Pendapatan penduduk di Mola Selatan sebagian besar bergantung pada laut, perdagangan dan jasa. Banyak nelayan di Mola Selatan yang memiliki penghasilan kecil, karena peralatan tangkap mereka rusak akibat badai atau terkena dampak pelarangan penangkapan ikan tertentu seperti penyu.

Pendapatan Per Kapita Per Bulan

Selama dua tahun terakhir juga terjadi peningkatan pendapatan per kapita per bulan di Wakatobi sebesar 49 persen. Pendapatan per kapita tahun 2006 sebesar Rp 132.711 per bulan, sedangkan pada tahun 2008 pendapatan tersebut meningkat menjadi Rp 197.720 per bulan. Pendapatan per kapita ini berada di atas garis kemiskinan Provinsi Sultra tahun 2006 (Rp 172.995) dan Kabupaten Wakatobi (Rp 151.941). Peningkatan pendapatan per kapita bervariasi antar desa/kelurahan. Peningkatan tertinggi terdapat di Kelurahan Wandoka (66,9 persen), sedangkan terendah terdapat di Desa Mola Selatan (28,1 persen). (lihat lampiran 4.1. dan 4.2.).

Besar pendapatan per kapita juga bervariasi menurut desa/kelurahan lokasi studi. Pendapatan per kapita tertinggi terdapat di

Desa Waha (Rp 296.159), sedangkan terendah berada di Wandoka (Rp162.606). Jika digunakan batasan kemiskinan baru yang dikeluarkan ADB (US\$1,35 per hari), maka pendapatan per kapita di semua desa/kelurahan tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan.

Median Pendapatan Rumah Tangga (RT)

Median/nilai tengah dapat dijadikan sebagai indikator distribusi pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian. Penentuan median dapat memberikan penjelasan bahwa 50 persen rumah tangga mempunyai pendapatan lebih kecil atau sama dengan median, sementara 50 persen yang lain mempunyai pendapatan di atas median. Median dapat dijadikan tolok ukur untuk meminimalkan pengaruh pendapatan yang relatif ekstrim, seperti pendapatan yang sangat tinggi atau sangat rendah dari satu atau beberapa rumah tangga responden saja.

Hasil penelitian menunjukkan nilai median pendapatan rumah tangga di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 608.333 (lampiran 4.1). Kondisi ini menunjukkan, bahwa meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga di Wakatobi cukup tinggi, tetapi masih ada 50 persen rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 608.333,00. Secara empirik data ini dapat dijadikan acuan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wakatobi masih tinggi. Meskipun nilai median cukup rendah, tetapi telah terjadi peningkatan nilai median sebesar 34,2 persen dibandingkan dengan median tahun 2006. Peningkatan median tertinggi terdapat di Desa Waha (150 persen), dan terendah di Desa Mola Selatan (9,4 persen).

Minimum Pendapatan Rumah Tangga (RT)

Minimum pendapatan rumah tangga (RT) adalah pendapatan minimum dari rumah tangga responden yang disurvei. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan minimum di Kabupaten Wakatobi sebesar 7 kali pendapatan minimum tahun 2006. Pendapatan minimum tahun 2006 sebesar 5 ribu rupiah, sedangkan

pada tahun 2008 menjadi 41 ribu rupiah. Pola perkembangan pendapatan minimum bervariasi menurut desa/kelurahan lokasi studi. Peningkatan tertinggi terdapat di Kelurahan Wandoka yang meningkat 9 kali dari pendapatan minimum tahun 2006, sedangkan terendah terdapat di Mola Selatan. Pendapatan minimum di Mola Selatan bahkan mengalami penurunan sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun 2006.

Meskipun secara umum terjadi peningkatan pendapatan minimum, tetapi sebagian rumah tangga tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan standar kebutuhan rumah tangga secara layak karena pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Strategi hidup yang sama dengan tahun 2006 tampaknya masih dilakukan sebagian rumah tangga miskin di Wakatobi. Banyak rumah tangga yang menggunakan ubi kayu hasil kebun sendiri sebagai makanan pokok. Biasanya mereka menanam ubi di lahan sendiri, sehingga untuk kebutuhan makanan pokok tidak perlu membeli. Lauk pauk dapat diperoleh dari hasil kebun dan memancing ikan di laut sekitarnya.

Maksimum Pendapatan Rumah Tangga (RT)

Maksimum pendapatan rumah tangga (RT) adalah pendapatan maksimum dari rumah tangga responden yang di survei. Secara umum terjadi peningkatan pendapatan maksimum sebesar 30,2 persen di lokasi studi selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2008 pendapatan maksimum rumah tangga di Wakatobi sebesar Rp 5,97 juta rupiah. Pendapatan ini cukup besar, dan berasal dari rumah tangga di Wandoka yang bekerja sebagai nelayan bagan. Pendapatan nelayan bagan cukup tinggi dan bervariasi antar musim. Pada waktu musim gelombang kuat pendapatan nelayan bagan ini mencapai 7,5 juta rupiah, kemudian pada waktu musim pancaroba sebesar 6 juta rupiah dan terkecil pada waktu musim gelombang kuat sebesar 2 ratus ribu rupiah.

Perubahan pendapatan maksimum bervariasi menurut lokasi (desa/kelurahan). Terdapat dua desa yang mengalami peningkatan pendapatan maksimum yaitu Mola Selatan dan Wandoka, sedangkan pendapatan maksimum di Waha mengalami penurunan. Pendapatan

maksimum di Mola Selatan pada tahun 2008 sebesar 4,15 juta rupiah, sedangkan pendapatan maksimum di Waha sebesar 3,3 juta rupiah. Pendapatan tertinggi di Mola Selatan terdapat pada nelayan tuna yang mempunyai beberapa ART yang bekerja di lapangan pekerjaan yang sama dengan KRT. Akumulasi pendapatan rumah tangga ini cukup tinggi dan bervariasi menurut musim. Pada waktu musim tenang mereka memperoleh pendapatan sekitar 9 juta rupiah. Pendapatan ini menurun pada waktu musim pancaroba dan gelombang kuat masing-masing menjadi 1,2 juta rupiah per bulan.

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Hasil survei menunjukkan sekitar 41,8 persen rumah tangga di Wakatobi pada tahun 2008 memiliki pendapatan kurang dari 500 ribu per bulan (tabel 4.4.). Persentase rumah tangga yang mempunyai pendapatan sangat rendah ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2006 (54 persen). Data hasil penelitian menunjukkan variasi perubahan persentase rumah tangga di desa lokasi studi yang mempunyai pendapatan kurang dari 500 ribu rupiah. Persentase rumah tangga yang mempunyai pendapatan sangat rendah di Desa Waha (53,6 persen) hampir sama dengan tahun 2006. Hal yang berbeda terjadi di Kelurahan Wandoka dimana terjadi penurunan persentase rumah tangga yang mempunyai pendapatan terendah selama dua tahun terakhir, dari 68 persen tahun 2006 menjadi 21,6 persen tahun 2008.

Tabel 4.4. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pendapatan dan Desa/ Kelurahan, Kabupaten Wakatobi, 2006 dan 2008 (Persen)

No	Kategori Pendapatan (Rp)	Desa / Kelurahan						Total	
		Mola Selatan		Waha		Wandoka		2006	2008
		2006	2008	2006	2008	2006	2008		
1.	< 500.000	44	42,9	53	53,6	68	21,6	54	41,8
2	500.000 - 999.999	44	20,8	23	23,2	24	18,9	33	21,2
3	1.000.000 -1.499.999	4	15,6	17	14,3	2	29,7	6	18,2
4	1.500.000 -1.999.999	6	15,6	0	3,6	2	18,9	3	12,4
5	2.000.000 -2.499.999	2	2,6	0	1,8	4	8,1	2	3,5
6	2.500.000 -2.999.999	0	1,3	3	0,0	0	0,0	1	0,6
7	≥3.000.000	0	1,3	3	3,6	0	2,7	1	2,4
N		70	77	50	56	30	37	150	170

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006 dan 2008

Peningkatan persentase pendapatan rumah tangga terjadi pada kelompok pendapatan 1 juta s.d. 1,9 juta rupiah. Peningkatan yang cukup besar pada kelompok pendapatan menengah ini terdapat di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Pada tahun 2006 rumah tangga di Wandoka yang masuk dalam kelompok pendapatan ini hanya sebesar 4 persen, dan meningkat menjadi 48,6 persen pada tahun 2008. Peningkatan yang cukup tinggi juga terjadi di Mola Selatan yang meningkat dari 10 persen pada tahun 2006 menjadi 30,2 persen pada tahun 2008. Fakta ini menunjukkan adanya mobilitas pendapatan dari kelompok rendah ke kelompok di atasnya.

Perubahan distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan juga terjadi pada kelompok pendapatan tinggi (> 2,5 juta rupiah). Pada tahun 2006 terdapat 1 persen rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan ini, dan meningkat menjadi 3,0 persen pada tahun 2008. Peningkatan persentase terjadi di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan, sedangkan penurunan persentase terjadi di Desa Waha. Pada tahun 2006 tidak ada rumah tangga di Mola Selatan yang masuk dalam kelompok pendapatan tinggi, sedangkan pada tahun 2008 terdapat 2,6 persen yang masuk dalam kelompok pendapatan ini. Hal yang sama terjadi di Wandoka yang meningkat dari 0 persen pada tahun 2006 menjadi 2,7 persen pada tahun 2008.

4.2.2. Pendapatan Menurut Lapangan Pekerjaan

Variasi pendapatan penduduk juga terjadi pada lapangan pekerjaan kepala rumah tangga. Hasil survei menunjukkan terdapat 8 lapangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk di Wakatobi, yaitu: perikanan, pertanian, pertambangan, perdagangan, transportasi, jasa/pemerintahan, bangunan dan pengolahan/ industri rumah tangga, serta sumber lain bagi rumah tangga yang kepala rumah tangganya (KRT) tidak bekerja.

Tabel 4.5 menginformasikan rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi bersumber dari lapangan pekerjaan yang sama dengan tahun 2006 yaitu transportasi/angkutan. Rumah tangga responden yang mempunyai sumber pendapatan dari transportasi/angkutan ini relatif

sedikit (1,2 persen rumah tangga) dan semuanya bekerja sebagai ABK transportasi laut. Pendapatan mereka cukup besar, namun tidak dapat mencerminkan transportasi umum yang ada di daerah kajian, seperti ojek, sopir angkot, kernet dan transportasi darat lainnya. Peningkatan pendapatan rumah tangga di sektor transportasi cukup tinggi (61,6 persen), menunjukkan bahwa transportasi laut memberikan insentif yang cukup tinggi terhadap ABK kapal tersebut.

Peningkatan rata-rata pendapatan terbesar terdapat pada industri rumah tangga yang meningkat sebesar 193 persen dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga tahun 2006. Meskipun mengalami peningkatan yang sangat tinggi, pendapatan di lapangan pekerjaan ini masih rendah dan berada di bawah 500 ribu rupiah. Industri pengolahan yang menjadi responden penelitian ini hanya satu orang dan bekerja sebagai pembuat batako. Pada 2006 pendapatan rumah tangga ini sebesar 125 ribu rupiah dan meningkat menjadi 366 ribu rupiah pada 2008. Pendapatan ini menempatkan rumah tangga yang bekerja sebagai pembuat batako termasuk dalam kelompok rumah tangga yang miskin secara ekonomi. Dari sisi pendapatan per kapita, rumah tangga yang bekerja di sektor industri rumah tangga mempunyai pendapatan terendah dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lainnya yaitu 41 ribu rupiah per bulan. Pendapatan ini sangat rendah dan jauh di bawah garis kemiskinan di daerah.

Tabel 4.5. Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan KRT Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008

No	Lapangan pekerjaan KRT	Pendapatan		Perkembangan (%)
		2006	2008	
1	Perikanan	633.002	1.078.439	70,4
2	Pertanian	338.009	474.914	40,5
3	Pertambangan	638.958	1.060.843	66,0
4	Perdagangan	721.667	333.143	(53,8)
5	Transportasi/angkutan	835.595	1.350.000	61,6
6	Jasa/pemerintahan	654.167	867.500	32,6
7	Bangunan	501.250	946.875	88,9
8	Pengolahan/industri RT	125.000	366.667	193,3
9	KRT tidak bekerja	527.500	274.167	(48,0)

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2006 dan 2008)

Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang mengalami peningkatan terbesar kedua setelah industri rumah tangga/pengolahan (88,9 persen). Tahun 2006 rata-rata pendapatan rumah tangga yang bekerja pada lapangan pekerjaan ini sebesar 501 ribu rupiah, kemudian meningkat menjadi 946 ribu rupiah tahun 2008. Lapangan pekerjaan bangunan terdiri dari tukang kayu, tukang bangunan dibantu orang lain, dan buruh bangunan. Rumah tangga yang mempunyai penghasilan cukup besar pada lapangan pekerjaan ini adalah rumah tangga yang mempunyai sumber penghasilan lain di luar bangunan. Penghasilan ini dapat berasal dari pekerjaan sampingan kepala rumah tangga atau penghasilan ART lain dalam rumah tangga yang telah bekerja. Pendapatan per kapita rumah tangga di lapangan pekerjaan bangunan mencapai 183 ribu rupiah per bulan. Pendapatan per kapita ini secara umum menunjukkan rumah tangga di lapangan pekerjaan bangunan mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan kabupaten (Rp 151.941 per bulan), tetapi masih berada di bawah garis kemiskinan ADB (\$ US 1,35 per hari).

Perikanan merupakan lapangan kerja yang dominan di lokasi kajian, Desa Mola Selatan, Waha dan Wandoka, sekitar 58,2 persen rumah tangga responden bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut. Pendapatan penduduk dari perikanan meningkat sekitar 70,4 persen selama dua tahun terakhir. Pada 2006 pendapatan penduduk di lapangan pekerjaan ini sebesar 633 ribu rupiah dan meningkat menjadi 1,08 juta rupiah pada 2008. Peningkatan pendapatan ini menempatkan perikanan sebagai sumber pendapatan per kapita terbesar kedua setelah bangunan (233 ribu rupiah). Secara umum pendapatan per kapita ini telah lebih besar dari garis kemiskinan di daerah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan garis kemiskinan ADB \$ US 1,35 per hari). Permasalahan lain yang dihadapi lapangan pekerjaan ini adalah terjadinya perbedaan pendapatan yang cukup mencolok antara pendapatan tertinggi dan terendah. Pendapatan tertinggi mencapai 5,97 juta rupiah sementara pendapatan terendah hanya 45 ribu rupiah.

Pertambangan merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan pendapatan cukup besar setelah perikanan

yaitu 66 persen (dari 639 ribu rupiah tahun 2006 menjadi 1,06 juta rupiah tahun 2008). Responden yang mempunyai lapangan pekerjaan ini sekitar 5,3 persen dari seluruh sampel. Pekerjaan yang dilakukan sama dengan tahun 2006 yaitu penambangan pasir dan batu karang yang dilakukan di semua lokasi penelitian. Penambangan batu karang dan pasir bervariasi antar desa/kelurahan. Penambangan dilakukan secara intensif dan melibatkan banyak penambang di Desa Mola Selatan, dan kurang intensif dengan jumlah penambang yang jauh lebih kecil di Desa Waha dan Kelurahan Wandoka. Kegiatan penambangan dilakukan untuk tujuan komersil, di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Meskipun penambang mengetahui bahwa kegiatan penambangan batu dan pasir dilarang, tetapi kegiatan ini masih tetap berlangsung. Di Mola Selatan penambangan batu dan pasir menjadi pekerjaan utama sebagian kecil penduduk dan kegiatan ini dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan di Wandoka dan Waha, kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sekelompok kecil (beberapa) warga dan penambang dari luar desa/kelurahan.

Pertanian merupakan lapangan pekerjaan dominan kedua setelah perikanan terutama di Desa Waha dan Kelurahan Wandoka, karena sekitar 18,2 persen rumah tangga bekerja pada lapangan pekerjaan ini. Terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga sekitar 40 persen selama dua tahun terakhir yaitu 338 ribu rupiah per bulan tahun 2006 menjadi 475 ribu rupiah tahun 2008. Meskipun mengalami peningkatan pendapatan, tetapi secara umum penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan ini belum dapat keluar dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita penduduk sebesar 118 ribu rupiah tahun 2008. Pendapatan per kapita ini sangat rendah, bahkan lebih rendah dari garis kemiskinan di daerah atau garis kemiskinan ADB. Perbedaan pendapatan yang mencolok antara pendapatan tertinggi dan terendah juga terjadi pada lapangan pekerjaan pertanian. Pada 2008 pendapatan rumah tangga tertinggi mencapai 1,4 juta rupiah dan terendah hanya 50 ribu rupiah. Pertanian di Waha dan Wandoka umumnya merupakan pertanian tanaman pangan terutama ubi kayu yang digunakan untuk konsumsi sendiri ataupun dijual dengan penghasilan yang sangat rendah.

Peningkatan pendapatan juga terjadi pada lapangan pekerjaan jasa/pemerintahan yang merupakan sumber mata pencaharian terbesar keempat di kawasan Pulau Wangi-Wangi. Rata-rata pendapatan pada lapangan kerja ini meningkat sebesar 32,6 persen dari 654 ribu rupiah tahun 2006 menjadi 867 ribu rupiah tahun 2008. Lapangan kerja ini terdiri dari jasa pemerintahan, seperti: pegawai negeri sipil (PNS) dan guru, dan jasa lainnya, seperti: dukun, tukang cukur dan bengkel. Jasa pemerintahan memberikan pendapatan yang lebih besar, jika dibandingkan dengan jasa layanan perorangan.

4.2.3. Pendapatan Menurut Kegiatan Kenelayanan

Bagian ini terfokus pada pendapatan dari kegiatan kenelayanan yang merupakan pekerjaan sebagian besar rumah tangga responden di Desa Mola Selatan dan Desa Waha, dan sebagian responden di Kelurahan Wandoka, Kabupaten Wakatobi. Untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif, analisa pada bagian ini menggunakan kombinasi antara data kuantitatif yang diperoleh dari survei dan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara terbuka dengan narasumber dan informan kunci serta pengamatan di tiga lokasi kajian.

Statistik Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan

Rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan di Wakatobi secara umum mengalami peningkatan sebesar 50,3 persen dalam dua tahun terakhir atau 25,1 persen per tahun. Peningkatan ini hampir sama dengan peningkatan pendapatan rumah tangga di desa/kelurahan (49 persen). Meskipun demikian, peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pendapatan penduduk yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor perikanan (70,4 persen), artinya peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan banyak dipengaruhi oleh sumber pendapatan lain di luar kegiatan kenelayanan.

Perkembangan positif juga terjadi pada median maupun pendapatan maskimum, sehingga secara umum terjadi peningkatan

pendapatan pada nelayan yang berpendapatan menengah ke atas. Hal yang berbeda terjadi pada nelayan berpendapatan rendah, karena terjadi perkembangan pendapatan negatif, sehingga terjadi penurunan tingkat kesejahteraan nelayan yang berpendapatan rendah. Pertumbuhan negatif pada nelayan berpendapatan rendah ini terjadi karena beberapa nelayan tidak melaut karena alat tangkapnya yang telah rusak.

Tabel 4.6. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008

Jenis pendapatan	Tahun		Perkembangan (%)
	2006	2008	
Rata-Rata	537.253	807.237	50,25
Median	406.667	571.667	40,57
Minimum	41.667	11.667	(72,00)
Maksimum	4.500.000	5.166.667	14,81

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2006 dan 2008)

Hasil kajian menginformasikan perkembangan rata-rata pendapatan dari kegiatan kenelayanan bervariasi menurut lokasi (lampiran 4.4). Peningkatan pendapatan tertinggi terjadi di Wandoka sebesar 82,9 persen, sedangkan terendah terdapat di Mola Selatan sebesar 23,4 persen. Pendapatan penduduk di Mola Selatan hampir tidak mengalami perubahan jika dikontrol dengan inflasi di daerah tersebut, bahkan cenderung menurun. Hal ini berkaitan dengan menurunnya hasil tangkapan ikan di Mola Selatan baik karena populasinya yang cenderung menurun maupun alat tangkap ikan yang sudah rusak, sehingga sebagian nelayan tidak dapat melaut lagi. Pola perkembangan yang berbeda terjadi di Wandoka dimana rata-rata pendapatan nelayan meningkat cukup signifikan. Peningkatan ini dapat terjadi karena masuknya sebagian nelayan tuna dan bagan yang tidak masuk dalam pendataan tahun 2006. Pendapatan nelayan tuna dan bagan cukup tinggi, sehingga berpengaruh terhadap rata-rata pendapatan secara keseluruhan.

Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan antara tahun 2006 dan tahun 2008 terjadi pada semua musim, baik gelombang kuat, pancaroba maupun gelombang lemah. Peningkatan ini dapat terjadi karena adanya peningkatan harga jual ikan hasil tangkapan yang disebabkan oleh faktor inflasi di daerah. Peningkatan pendapatan terutama terjadi pada sekelompok nelayan berpendapatan menengah ke atas seperti nelayan bagan dan nelayan koordinator. Selain itu, populasi ikan di laut selama ini sudah mulai meningkat karena intensitas pengeboman ikan sudah sangat berkurang. Penggunaan potassium sianida dan cairan dari akar kayu tohole sulit diberantas, karena kesulitan dalam pengawasan dan tidak mudah mengetahui apakah nelayan menggunakan obat-obatan yang memusnahkan dan merusak terumbu karang. Penggunaan cairan akar kayu *tohole* bahkan dilakukan oleh sebagian besar ibu-ibu yang ikut mencari ikan dipinggir laut pada waktu pasang surut, terutama di Waha dan Wandoka. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan tertinggi diperoleh pada musim gelombang lemah yang jumlahnya mencapai 2,3 kali pendapatan pada musim pancaroba dan 2,8 kali pendapatan musim gelombang kuat. Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan selama dua tahun terakhir juga mengalami peningkatan cukup tinggi.

Penurunan pendapatan dari kegiatan kenelayanan terjadi pada kelompok nelayan berpendapatan rendah yang ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan negatif pendapatan minimum pada musim pancaroba dan gelombang lemah. Musim gelombang lemah merupakan musim yang banyak dimanfaatkan oleh banyak nelayan untuk melaut, karena gelombang tidak berbahaya dan ikan tertentu jumlahnya lebih banyak. Penurunan pendapatan pada musim gelombang lemah akan memiliki pengaruh cukup tinggi terhadap penurunan kesejahteraan nelayan. Nelayan semestinya dapat menggunakan musim gelombang lemah sebagai persiapan untuk menutupi kekurangan pendapatan pada waktu musim gelombang kuat.

Tabel 4.7. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008

Musim / Jenis pendapatan	Tahun		Perkembangan (%)
	2006	2008	
Kuat			
Rata-rata	328.657	527.500	60,50
Median	240.000	345.000	43,75
Minimum	2.500	15.000	500,00
Maximum	1.400.000	4.000.000	185,71
Pancaroba			
Rata-rata	410.643	647.055	57,57
Median	300.000	425.000	41,67
Minimum	40.000	10.000	(75,00)
Maximum	2.500.000	6.000.000	140,00
Lemah			
Rata-rata	895.528	1.500.073	67,51
Median	720.000	1.000.000	38,89
Minimum	45.000	25.000	(44,44)
Maximum	10.000.000	9.000.000	(10,00)

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2006 dan 2008).

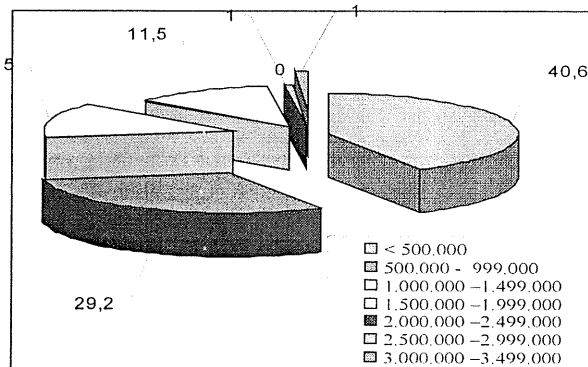
Persentase peningkatan pendapatan rumah tangga dari sektor kenelayanan menjadi lebih rendah jika perhitungan pendapatan hanya dilakukan pada responden yang didata tahun 2006. Peningkatan pendapatan rumah tangga pada musim gelombang lemah sebesar 49,6 persen dan pada gelombang kuat sebesar 43,5 persen, artinya terjadi peningkatan sebesar 21,7 persen per tahun. Peningkatan ini lebih kecil dibandingkan dengan perkembangan PDRB pada tahun 2003-2006 (23,35 persen per tahun).

Distribusi Pendapatan Nelayan

Dari hasil survei diketahui bahwa sekitar 40,6 persen dari total rumah tangga (RT) responden di tiga lokasi kajian, yang mempunyai kegiatan kenelayanan, berpendapatan kurang dari 500 ribu rupiah. Pendapatan rumah tangga ini termasuk yang paling rendah dan tidak

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Rumah tangga yang lain (29,2 persen) mempunyai pendapatan antara 500 ribu-999 ribu rupiah, dan 11,5 persen mempunyai pendapatan 1,5 – 1,99 juta rupiah. Melihat distribusi pendapatan tersebut, dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2006, karena hampir seluruh responden tahun 2006 mempunyai pendapatan di bawah 1 juta rupiah. Rumah tangga yang masuk dalam kelompok berpendapatan tinggi (> 2,5juta rupiah) hanya sekitar 2 persen dari total responden (Diagram 4.1).

Diagram 4.1. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 (Persen)



Sumber: *Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2008).

Pendapatan rumah tangga nelayan bervariasi menurut musim, yaitu musim gelombang lemah, pancaroba sampai dengan musim gelombang kuat (tabel 4.6.). Musim gelombang kuat ditandai dengan tingginya ombak di laut sehingga banyak nelayan yang tidak melaut karena takut terhadap ombak. Meskipun demikian, sebagian nelayan terutama nelayan tuna tetap melaut pada musim ini, karena ikan tuna lebih mudah didapatkan. Musim gelombang lemah ditandai dengan ombak yang tidak besar, dan merupakan musim yang bersahabat bagi nelayan. Pada musim ini hampir semua nelayan dapat melaut untuk

mencari ikan. Sama halnya dengan tahun 2006, persentase rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah (< 500 ribu rupiah) berbeda antar musim, gelombang lemah (21,2 persen), pancaroba (60,4 persen) dan gelombang kuat (71,7 persen). Secara umum terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah, terutama pada waktu musim gelombang lemah. Pada tahun 2006 terdapat 40 persen rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah, kemudian pada tahun 2008 menjadi 21,2 persen. Meskipun mengalami penurunan, tetapi sebagian besar warga masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena pengaruh inflasi di daerah.

Gambaran yang berbeda terjadi pada kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi (> 3 juta rupiah). Proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi pada musim gelombang lemah sebesar 17,2 persen, kemudian turun menjadi 2 persen pada musim pancaroba dan 0 persen pada musim gelombang kuat. Peningkatan persentase rumah tangga yang mempunyai penghasilan tinggi terjadi pada musim gelombang lemah dan pancaroba. Persentase rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi pada gelombang lemah tahun 2006 sebesar 4 persen, kemudian meningkat menjadi 17,2 persen tahun 2008. Peningkatan kelompok ini dapat terjadi karena sebagian nelayan yang digunakan untuk tambahan responden survei tahun 2008 (anggota pokmas) merupakan nelayan yang cukup sukses seperti koordinator nelayan di Desa Mola Selatan. Mereka masuk pokmas dengan harapan dapat menjadi pendorong anggota yang lain untuk lebih berhasil. Meskipun demikian sampai penelitian ini dilakukan tidak ada kegiatan pokmas yang menuju ke arah peningkatan pendapatan.

Di samping bervariasi menurut musim, pendapatan rumah tangga (RT) nelayan juga bervariasi antar desa/kelurahan lokasi kajian (tabel 4.7.). Pola pendapatan yang hampir sama antara tahun 2006 dan tahun 2008. Proporsi RT nelayan di Kelurahan Wandoka yang mempunyai pendapatan lebih rendah dari 500 ribu rupiah lebih besar dibandingkan dengan Mola Selatan dan Waha (58,3 persen dibandingkan dengan 47,4 persen dan 18 persen).

Tabel 4.8. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Kabupaten Wakatobi 2006 dan 2008 (Persen)

No	Kategori Pendapatan	Musim					
		Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
		2006	2008	2006	2008	2006	2008
1.	< 500.000	40	21,2	66	60,4	81	71,7
2.	500.000 - 999.999	32	23,2	30	22,2	14	17,2
3.	1.000.000 –1.499.999	16	18,2	2	9,1	5	7,1
4.	1.500.000 –1.999.999	2	13,1	1	5,1	0	2,0
5.	2.000.000 –2.499.999	5	5,1	1	1,0	0	1,0
6.	2.500.000 –2.999.999	1	2,0	0	0,0	0	1,0
7.	3.000.000 –3.499.999	2	5,1	0	1,0	0	0
8.	≥Rp 3.500.000	2	12,1	0	1,0	0	0
	N	92	99	92	99	92	99

Sumber: *Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK – LIPI (2006 dan 2008)*

Kondisi ini menunjukkan secara umum tingkat kesejahteraan nelayan di Wandoka lebih rendah dibandingkan dengan Waha dan Mola Selatan. Meskipun masih tinggi, persentase rumah tangga nelayan di Waha dan Wandoka yang mempunyai pendapatan kurang dari 500 ribu rupiah ini telah menurun dibandingkan dengan tahun 2006. Hal berbeda terjadi di Mola Selatan, dimana terjadi peningkatan proporsi rumah tangga nelayan yang mempunyai pendapatan di bawah 500 ribu rupiah. Dengan demikian proporsi penduduk miskin di desa ini juga mengalami peningkatan.

Tabel 4.9. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Desa, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006 dan 2008 (Persen)

No	Kategori Pendapatan	Desa Mola Selatan		Desa Waha		Kelurahan Wandoka		Total	
		2006	2008	2006	2008	2006	2008	2006	2008
1	< 500.000	40	47,4	55	18,5	71	58,3	49	40,6
2	500.000 - 999.999	49	21,1	25	55,6	17	8,3	38	29,2
3	1.000.000 –1.499.999	4	12,3	10	18,5	6	8,3	6	13,5
4	1.500.000 –1.999.999	5	15,8	0	3,7	6	8,3	4	11,5
5	2.000.000 –2.499.999	2	0	0	0	0	0	1	0
6	2.500.000 –2.999.999	0	1,8	5	0	0	0	1	1,0
7	3.000.000 –3.499.999	0	0	0	3,7	0	0	0	1,0
8	≥Rp 3.500.000	0	1,8	5	0	0	16,7	1	3,1
	N	55	57	20	27	17	12	92	96

Sumber: *Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK – LIPI (2006 dan 2008)*.

Nelayan yang memiliki pendapatan tinggi (> 2,5 juta rupiah) di ketiga lokasi jumlahnya sangat terbatas (5,1 persen dari total responden). Persentase tertinggi terdapat di Kelurahan Wandoka (16,7 persen) yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 (0 persen). Persentase lebih rendah terjadi di Mola Selatan dan Waha, masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,7 persen. Rendahnya rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi menunjukkan sebagian besar rumah tangga di daerah tersebut termasuk rumah tangga miskin. Nelayan yang mempunyai pendapatan tinggi umumnya bekerja sebagai nelayan bagan, koordinator nelayan ataupun nelayan tuna.

4.3. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan

Perkembangan PDRB Kabupaten Wakatobi berdasar harga konstan 2000, menunjukkan adanya perkembangan sekitar 5,9 persen per tahun pada tahun 2003-2006. Jika dihitung berdasarkan harga berlaku dalam periode yang sama terjadi peningkatan PDRB sebesar 26,2 persen per tahun. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan per kapita. Pada tahun 2003 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,2 juta rupiah kemudian pada tahun 2006 meningkat menjadi 4,2 juta rupiah atau terjadi peningkatan sekitar 23,4 persen per tahun. Peningkatan pendapatan juga terjadi pada pendapatan per kapita berdasarkan atas harga konstan tahun 2000 yang meningkat sebesar 3,7 persen per tahun. Peningkatan pendapatan per kapita dapat menjadi indikasi peningkatan kesejahteraan penduduk selama empat tahun terakhir.

Hasil kajian terhadap perkembangan pendapatan di Wakatobi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga dan per kapita selama dua tahun terakhir. Rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat sebesar 49,6 persen, atau 24,9 persen per tahun. Peningkatan yang hampir sama terdapat pada pendapatan per kapita yang selama dua tahun terakhir meningkat sebesar 49,0 persen. Peningkatan ini terjadi cukup tinggi, meskipun sebenarnya pertumbuhan tersebut hampir sama dengan persentase peningkatan

PDRB per kapita Kabupaten Wakatobi selama tahun 2005-2006.² Peningkatan pendapatan rumah tangga khusus untuk responden yang sama dengan tahun 2006 sebesar 37,9 persen (18,9 persen per tahun), sedangkan pendapatan per kapita meningkat sebesar 41,8 persen (20,9 persen per tahun). Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita tingkat kabupaten sebelum ada program COREMAP.

Peningkatan pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan, lebih tinggi dibandingkan peningkatan secara umum yaitu sebesar 70 persen. Khusus untuk responden yang sama dengan tahun 2006, pendapatan rumah tangga di sektor perikanan meningkat sebesar 53,4 persen (26,7 persen per tahun). Pendapatan khusus dari kegiatan kenelayanan juga meningkat di seluruh musim, baik gelombang lemah, pancaroba maupun gelombang kuat. Peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi COREMAP hampir sama dengan peningkatan pendapatan normal ditingkat kabupaten tahun 2003-2005. Oleh sebab itu, peningkatan pendapatan tersebut tidak ada kaitannya dengan program COREMAP di daerah penelitian, karena selama ini program ini belum berjalan secara optimal. Peningkatan pendapatan lebih dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro tingkat kabupaten. Meskipun mengalami peningkatan pendapatan, secara umum tingkat kesejahteraan penduduk tidak mengalami perubahan bahkan sebagian merasa lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada waktu penelitian ini dilakukan, program usaha ekonomi produktif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk, baru berjalan selama 2 bulan. Dana yang digulirkan untuk masyarakatpun sangat rendah (sekitar 19 juta/desa).

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat cenderung tidak mengalami perubahan baik sumber pendapatan, teknologi, alat tangkap, musim, pemasaran hasil dan kebijakan

² Pada tahun 2003-2005 terjadi pertumbuhan PDRB per kapita berdasar harga berlaku di Kabupaten Wakatobi sebesar sebesar 23,4 persen per tahun, dan 3,4 persen per tahun berdasar harga konstans tahun 2000. Oleh sebab itu, peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi COREMAP hampir sama dengan peningkatan pendapatan normal (jika tidak ada program COREMAP).

pemerintah. Perubahan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk masih sangat minim seperti dijelaskan di bawah ini.

Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga di Desa Mola Selatan, Waha dan Kelurahan Wandoka adalah sumber pendapatan dan kapasitas pemanfaatan sumber daya laut, termasuk teknologi dan wilayah tangkap serta biaya produksi/tangkap. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan dan keterampilan, juga mempunyai peran penting dalam menentukan besarnya pendapatan penduduk di lokasi kajian.

Sumber Pendapatan

Hasil kajian menunjukkan pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap sumber pendapatan penduduk di ketiga desa lokasi studi. Selain pekerjaan pokok, sebagian kepala rumah tangga juga memiliki pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekitar 33,5 persen kepala rumah tangga memiliki pekerjaan sampingan, baik di sektor perikanan, pertanian tanaman pangan maupun angkutan dan jasa. Sumber pendapatan juga berkaitan dengan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Terdapat sekitar 9,5 persen rumah tangga yang mengirimkan tiga atau lebih ART nya ke dunia kerja. Sementara sekitar 58,8 persen rumah tangga yang mengirimkan satu anggota rumah tangganya ke dunia kerja. Jumlah ART yang bekerja secara langsung akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan rumah tangga, karena semakin banyak jumlah ART yang bekerja, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Pekerjaan alternatif yang dimasukkan dalam program COREMAP belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Kapasitas pemanfaatan potensi sumber daya laut (SDL) juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan penduduk.

Kapasitas ini dapat diketahui dari teknologi, wilayah tangkap dan kemampuan untuk membiayai kegiatan.

- **Teknologi**

Teknologi penangkapan ikan yang terdapat di Wakatobi tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2006. Diantara rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor perikanan, terdapat 28,3 persen yang menggunakan perahu motor dalam berkekuatan 2,6-80 PK dengan mayoritas (70,4 persen) berkekuatan 26 PK. Selain itu terdapat sekitar 12,1 persen rumah tangga nelayan yang menggunakan perahu motor tempel berkekuatan 3-14 PK. Selain itu terdapat sekitar 56,6 persen rumah tangga yang memiliki perahu tanpa motor. Sebagian nelayan tidak memiliki perahu, baik dengan motor maupun non motor, karena mereka hanya bekerja sebagai ABK pada orang lain.

- **Sarana Penangkapan ikan**

Variasi alat tangkap tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2006. Alat tangkap bervariasi sesuai dengan jenis ikan yang akan ditangkap, armada dan wilayah tangkap nelayan. Alat tangkap yang dominan di tiga lokasi penelitian adalah pancing dan jaring. Pancing biasanya dipakai untuk menangkap ikan karang dan tuna di semua lokasi, sedangkan jaring digunakan nelayan rumpon dan nelayan yang menangkap ikan dengan sampan di pinggir pantai, terutama di Waha dan Wandoka. Sebagian kecil nelayan menggunakan bubu, terutama digunakan nelayan Desa Waha dan Kelurahan Wandoka, dan panah/cungkil batu yang dipakai nelayan Mola Selatan untuk menangkap gurita di karang. Bagan merupakan alat tangkap yang memberikan penghasilan cukup tinggi, tetapi hanya dimiliki oleh sebagian kecil rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan modal yang harus dikeluarkan untuk membuat bagan. Data penelitian menunjukkan hanya 5,1 persen rumah tangga yang memiliki bagan.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal, pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari luar, seperti: musim, pemasaran dan harga hasil tangkapan, sarana dan prasarana, serta kompetisi dalam pemanfaatan SDL.

Musim

Musim merupakan faktor alam yang tidak dapat dihindari, sehingga pengaruhnya tidak berubah selama dua tahun terakhir. Pada musim teduh atau gelombang lemah, sebagian besar nelayan turun ke laut untuk menangkap ikan, sebaliknya kebanyakan nelayan tidak dapat melaut pada musim gelombang kuat, karena armada tangkap nelayan belum mampu untuk beroperasi pada musim ini. Sedangkan pada musim pancaroba, nelayan masih melaut, namun frekuensinya berkurang disesuaikan dengan kondisi iklim. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap besar pendapatan rumah tangga dari sektor kenelayanan. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan nelayan pada musim teduh sebesar 1,5 juta rupiah, kemudian menurun pada waktu musim pancaroba dan gelombang kuat (masing-masing 647 ribu rupiah dan 527 rupiah). Meskipun demikian, ada sebagian kecil nelayan, khususnya yang mempunyai armada tangkap berkapasitas cukup besar, pada musim gelombang kuat memiliki pendapatan cukup tinggi, karena mereka tetap melaut dengan frekuensi yang sama dengan musim gelombang tenang.

Pemasaran Hasil Tangkap

Pola pemasaran ikan di daerah kajian tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pemasaran tahun 2006. Pertama, nelayan bebas menjual ikan dan hasil laut lainnya di pasar dan/atau langsung ke konsumen. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara nelayan dan pembeli. Pola ini terutama dilakukan oleh nelayan dari Desa Waha dan Kelurahan Wandoka. Wilayah pemasaran terbatas di pasar Wanci dan sekitar permukiman saja, yang dilakukan oleh *papalele* terdiri dari ibu-ibu rumah tangga.

Pola ke dua, nelayan terikat pada pedagang pengumpul/ koordinator/bos ikan untuk menjual hasil tangkapannya. Pola ini terutama terjadi di Desa Mola Selatan, karena banyak nelayan mendapat bantuan mereka untuk melaut dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pada pola ini posisi tawar nelayan sangat lemah, karena harga ditentukan oleh pedagang pengumpul/ koordinator/bos ikan tersebut.

Program/Kebijakan Pemerintah

Pendapatan juga dipengaruhi oleh program/kebijakan pemerintah, seperti peraturan dan penegakan hukum serta program pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan SDL, seperti larangan penggunaan bahan dan alat yang merusak, seperti bom dan bus, dan penambangan batu karang dan pasir, serta penegakan hukum bagi para pelanggar, mempunyai pengaruh tidak langsung pada pendapatan nelayan. Intensitas penangkapan ikan secara ilegal (pengeboman dan pembiusan) di lokasi studi sudah sangat berkurang karena adanya berbagai program penyelamatan terumbu karang baik dari COREMAP dan Taman Nasional maupun TNC. Kegiatan yang masih berlarutan adalah penambangan karang dan pasir, karena merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian kecil penduduk, terutama di Desa Mola Selatan. Mata pencaharian alternatif belum berjalan, sehingga membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain harus menambang batu karang maupun pasir. Program-program yang secara langsung berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendanaan belum sepenuhnya berhasil di daerah ini. Selain dana yang turun ke masyarakat sangat kecil, keterbatasan potensi sumber daya manusia dan alam merupakan kendala yang sangat sulit untuk diatasi.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan rangkuman hasil kajian Program Penyelamatan Terumbu Karang atau COREMAP di Kabupaten Wakatobi. Kajian difokuskan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, utamanya perubahan pendapatan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan COREMAP. Hasil kajian juga menggambarkan semua kegiatan COREMAP, capaian dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dari tahun 2006 sampai tahun 2008.

5.1. Perkembangan COREMAP di Tingkat Kabupaten

Hasil kajian menginformasikan bahwa pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Wakatobi telah mengalami perkembangan, meskipun belum optimal. Gambaran ini didasarkan dari pelaksanaan COREMAP, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat lokasi, yaitu Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha.

Pelaksanaan COREMAP di tingkat kabupaten pada awalnya mengalami kendala dan keterlambatan. Keadaan ini berkaitan erat dengan beberapa faktor, seperti kurang efektifnya pengelolaan program karena dominasi ‘aparatus’ tertentu, kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang, dan kendala administrasi seperti lambatnya pengeluaran surat keputusan (SK) untuk anggota PMU yang mengalami pergantian setiap tahun. Permasalahan juga bersumber dari jumlah lokasi yang meningkat secara signifikan, karena pemekaran desa/kelurahan yang berimplikasi pada dana. Selain itu, keterlambatan juga dikarenakan keterlambatan turunnya dana, terutama *seed fund* yang menjadi sumber dana untuk kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

PMU Kabupaten Wakatobi menyadari kendala dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan COREMAP di kabupaten ini, PMU dengan komponen-komponennya kemudian berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan COREMAP pusat. PMU untuk memacu pelaksanaan kegiatan, mengganti ‘aparatur’ yang mendominasi pengelolaan COREMAP. PMU juga berupaya mengurangi kendala administrasi dengan penetapan SK pengelola program di kabupaten ini.

Komponen *Public Awareness* (PA) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian terumbu karang di kawasan ini, terutama pada awal kegiatan. Kegiatan PA lebih terfokus pada kegiatan di tingkat kabupaten, seperti lomba karya tulis, training guru dan pelatihan jurnalis. Sedangkan sosialisasi tentang COREMAP masih terbatas pada tingkat kecamatan dan lokasi, karena itu pemahaman masyarakat tentang program ini masih terbatas pada tujuan COREMAP untuk penyelamatan terumbu karang.

Komponen Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBM) lebih terfokus pada kegiatan di tingkat kabupaten, padahal kegiatan ini dilaksanakan di lokasi COREMAP. Keadaan ini digambarkan dari terbatasnya keterlibatan komponen CBM dalam kegiatan *village grant*, *seed fund*, dan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Komponen ini mengetahui perkembangan kegiatan CBM di lokasi-lokasi hanya berdasarkan buku dari Seto, CF dan MD. Komponen CBM juga tidak dapat melakukan monitoring dan pembimbingan ke lokasi-lokasi COREMAP, karena ketiadaan dana monitoring.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dikelola oleh komponen *Monitoring, Controlling* dan *Surveillance* (MCS) telah berkontribusi pada pengurangan kegiatan ilegal yang merusak terumbu karang di kawasan ini. Kegiatan yang merusak, seperti pembiusan, dan pengambilan batu karang sudah mengalami penurunan sebelum diimplementasikannya COREMAP. Namun pelaksanaan COREMAP dengan kegiatan PA dan sosialisasi yang dilakukan secara ekstensif juga berkontribusi dalam pengurangan kerusakan terumbu karang di kawasan ini. Komponen MCS bersama-

sama dengan *stakeholders* lain seperti dari Taman Nasional, TNI AL/Polres, dan WWF, juga melakukan patroli pengawasan secara reguler.

Kegiatan COREMAP idealnya didukung oleh data yang diperoleh dari hasil riset *Coral Reef Research and Training Center* (CRITC). Kegiatan CRITC selama ini belum optimal, masih terfokus pada kegiatan membantu riset yang dilakukan CRITC pusat – LIPI. CRITC Wakatobi pada 2007 telah membuat rencana riset untuk monitoring terumbu karang, survei data *reef*, tetapi kegiatan-kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan dana *sharing*. Kegiatan-kegiatan yang lain seperti *filing* dan dokumentasi dengan alasan yang sama juga tidak dapat terlaksana.

5.2. Perkembangan COREMAP Di Tingkat Lokasi

Kendala dan keterlambatan pelaksanaan COREMAP di tingkat kabupaten berimplikasi pada pelaksanaan di tingkat lokasi. Hasil kajian menggambarkan bahwa COREMAP sudah dilaksanakan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, namun kegiatannya masih terbatas.

Pengelola COREMAP

Organisasi pengelola COREMAP di tingkat desa/kelurahan yaitu Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan di tingkat masyarakat yaitu kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan kelompok jender telah terbentuk di semua lokasi kajian. Pengelola COREMAP di ketiga lokasi menurut hasil kajian belum berfungsi secara optimal.

- Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)

Peran LPSTK dalam pengelolaan terumbu karang di semua lokasi masih terbatas. Keadaan ini diindikasikan dari terbatasnya peran LPSTK dalam pembuatan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) dan kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan. LPSTK terlibat dalam penggalan potensi daerah yang diperlukan untuk RPTK yang disusun oleh Seto dan pengelola COREMAP Kabupaten Wakatobi. Terbatasnya keterlibatan pengurus LPSTK berimplikasi pada kurangnya pemahaman pengurus tersebut terhadap RPTK. Ketua LPSTK di semua lokasi bahkan belum membaca dokumen yang seharusnya menjadi dasar dan landasan dalam pelaksanaan COREMAP di masing-masing lokasi.

LPSTK dalam pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) perannya bervariasi antar lokasi. LPSTK di Kelurahan Wandoka perannya cukup dominan dalam penentuan lokasi DPL, namun lokasi ini tidak disetujui oleh sebagian besar masyarakat karena terletak di jalur lalu lintas dan tempat penangkapan ikan waktu meti (surut). Sebaliknya, LPSTK di Desa Mola Selatan tidak terlibat dalam pembentukan DPL, karena di desa ini tidak ada DPL. Sedangkan di Desa Waha, LPSTK sangat dipengaruhi oleh Motivator Desa (MD) dalam pembentukan DPL. DPL di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha meskipun sudah dibentuk belum beroperasi sampai kajian dilakukan awal Mei 2008.

Kegiatan LPSTK yang berkaitan dengan pembangunan desa/kelurahan yang bersumber dari dana *village grant* baru dapat dilaksanakan pada awal 2008. Kegiatan ini idealnya mengacu pada RPTK, namun dalam realisasinya banyak yang mengalami perubahan. Kegiatan *village grant* umumnya tidak berkaitan langsung dengan pelestarian terumbu karang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat masing-masing lokasi pada saat dana tersebut turun. Kegiatan *village grant* di Desa Mola Selatan difokuskan pada sanitasi lingkungan yaitu pembuatan dan penempatan tong-tong sampah untuk mengurangi masalah sampah yang berserakan di seluruh permukiman penduduk, dan pembuatan MCK di mesjid.

Kegiatan *village grant* di Kelurahan Wandoka mengalami perubahan karena adanya pemekaran kelurahan. Masyarakat sepakat dana *village grant* digunakan untuk membantu pembangunan 4 mesjid di kelurahan ini. Mesjid dapat dijadikan sebagai tempat dan wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pelestarian terumbu karang dan mensosialisasikan kegiatan COREMAP. Kegiatan *village grant* yang langsung berhubungan dengan pengelolaan terumbu karang terdapat di Desa Waha, berupa pembuatan rumpon, pembelian pelampung untuk pembatas DPL dan biaya operasional pengawasan di kawasan pantai dan laut di desa ini.

- Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Peran LKM masih terbatas dan bervariasi antar lokasi. LKM di Desa Mola Selatan masih terfokus pada pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok jender. Peran LKM dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masih sangat minim, karena sumber dana kegiatan ini yaitu *seed fund* belum turun sampai awal Mei 2008. LKM di Kelurahan Wandoka juga telah membentuk 6 pokmas berdasarkan 6 lingkungan di kelurahan ini. Setiap pokmas mulanya terdiri dari 5 anggota, tetapi dalam pelaksanaannya tergantung pada kebijakan ketua lingkungan yang kebanyakan juga berfungsi sebagai ketua pokmas. Peran LKM dalam kegiatan UEP masih terbatas pada pendistribusian dana *seed fund* kepada ketua lingkungan. Peran LKM di Desa Waha lebih baik jika dibandingkan dengan LKM di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Keadaan ini berkaitan erat dengan pembimbingan yang dilakukan oleh MD Desa Waha yang secara aktif membantu kegiatan LKM dalam pembentukan pokmas dan pelaksanaan kegiatan UEP di desa ini.

Masih terbatasnya peran LKM berkaitan erat dengan beberapa faktor. Kapasitas dan pemahaman pengurus LKM kebanyakan masih minim, dikarenakan masih terbatasnya upaya peningkatan kemampuan pengurus dan anggota LKM. Sebagian pengurus bahkan belum paham tentang tugas dan tanggung jawabnya. Keadaan ini berimplikasi pada minimnya inisiatif pengurus LKM untuk menggerakkan pokmas dan anggotanya. Hasil kajian juga

menginformasikan ada LKM yang melakukan kegiatan jika ada kegiatan dari COREMAP Kabupaten. Keterbatasan peran LKM juga berhubungan dengan keterlambatan turunnya dana UEP yang bersumber dari *seed fund*, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan UEP yang sudah diharapkan masyarakat sejak awal pembentukan COREMAP di ketiga lokasi kajian.

- **Kelompok Masyarakat (Pokmas), Kelompok Jender, dan Pokmaswas**

Peran pokmas, kelompok jender dan pokmaswas masih terbatas dan bervariasi antar lokasi. Pokmas di Desa Mola Selatan belum melakukan kegiatan UEP karena belum turunnya *seed fund*. Pokmas di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha baru memulai kegiatan UEP, karena dana *seed fund* baru turun pada waktu kajian dilakukan. Pembagian dana pada anggota pokmas di Kelurahan Wandoka tidak sesuai dengan rencana, melainkan ditentukan oleh ketua lingkungan dengan alasan keterbatasan dana. Kondisi yang serupa juga terjadi pada kelompok jender. Kelompok jender di Desa Mola Selatan belum melakukan kegiatan, sedangkan di dua lokasi lainnya baru memulai usaha UEPnya.

Dampak pokmas dan kelompok jender terhadap keberhasilan kegiatan UEP belum dapat diketahui. Dengan demikian dampak kegiatan UEP terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota pokmas dan kelompok jender juga masih sangat terbatas. Padahal anggota pokmas dan kelompok jender jumlahnya masih sangat minim atau proporsinya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk atau rumah tangga di ketiga lokasi kajian. Karena itu dampak kegiatan COREMAP untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha dan belum dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Mola Selatan.

Kegiatan pokmaswas juga bervariasi antar lokasi kajian. Pokmaswas di Desa Mola Selatan belum melakukan kegiatan pengawasan, alasannya adalah tidak tersedianya armada dan biaya

operasional untuk melakukan patroli. Kelompok pengawas ini bahkan belum mempunyai rencana untuk kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan pokmaswas di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha sudah mulai beroperasi, meskipun belum optimal. Pemahaman Pokmaswas mengenai proses pengusulan dan penggunaan dana operasional masih kurang, karena itu dana tersebut belum jelas keberadaannya.

- **Sosialisasi COREMAP**

Sosialisasi COREMAP pada awal kegiatan sering dilakukan dengan metode penyuluhan dan materi yang hampir sama yaitu tentang terumbu karang dan pentingnya pengelolaan sumber daya tersebut. Sosialisasi ini cukup berpengaruh pada kegiatan pembiusan dan pengambilan batu karang di ketiga lokasi kajian. Sosialisasi tentang COREMAP masih terbatas pada tujuan program ini. Pondok informasi meskipun sudah dibangun, pemanfaatannya oleh masyarakat masih kurang, karena minimnya sumber dan materi informasi yang tersedia dan kurangnya informasi dari pengurus LPSTK dan pengurus COREMAP lainnya, seperti Seto, CF dan MD. Karena itu pemahaman pengurus COREMAP dan masyarakat tentang kegiatan program dan mekanisme pelaksanaannya masih terbatas. Masyarakat mulai jenuh dengan COREMAP, terutama dikarenakan lambatnya atau belum terealisasinya kegiatan UEP, padahal kegiatan ini yang paling ditunggu oleh masyarakat.

- **Pelatihan**

Pelatihan sudah dilakukan terhadap pengurus COREMAP di ketiga lokasi kajian, tetapi jenis pelatihan yang dilakukan tergantung pada COREMAP Pusat dan PMU kabupaten, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pokmas/pokmaswas dan masyarakat di lokasi. Pelatihan diikuti oleh tokoh-tokoh tertentu saja, kurang melibatkan anggota pokmas. Waktu pelatihan sangat pendek, sehingga belum dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil pelatihan kurang ditindak lanjuti, berhenti setelah pelatihan

selesai. Keadaan ini berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain peralatan yang belum lengkap, keterampilan yang masih terbatas karena kurangnya praktek pada waktu pelatihan.

- **Pendidikan**

Kegiatan pendidikan terumbu karang di sekolah mulai dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, diindikasikan dari keluarnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi untuk menerapkan pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Kelautan di kabupaten ini. Sebagian sekolah, seperti SD Negeri di Desa Mola Utara telah dijadikan sebagai sekolah pilot untuk menerapkan Mulok kelautan. Sekolah ini telah menggunakan Serial Buku Pesisir dan Laut Kita yang diproduksi Bidang edukasi COREMAP – LIPI sebagai buku sumber untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan panduan guru untuk pelajaran Mulok Kelautan. Di sekolah ini juga terdapat beberapa buku kelautan dari sumber lainnya. Sekolah di Desa Waha juga telah mendapat pemaparan tentang COREMAP dan pentingnya pelestarian terumbu karang dari motivator desa di lokasi ini. Pelatihan guru di ketiga lokasi kajian masih terbatas, karena itu guru-guru mulok di ketiga lokasi ini perlu diikutsertakan pada pelatihan guru selanjutnya. Training guru ini penting untuk mencapai indikator keberhasilan pendidikan COREMAP yaitu 75 persen sekolah dasar di lokasi COREMAP, seorang guru mulok (dari setiap sekolah) telah mengikuti training guru dari COREMAP.

- **Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**

Pelaksanaan kegiatan UEP masih terbatas, baru dimulai di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, dan belum berjalan di Desa Mola Selatan pada awal Mei 2008. Karena itu dampak kegiatan UEP terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan sebagian besar masyarakat di ketiga lokasi. Hasil kajian juga mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan RPTK.

5.3. Perubahan Pendapatan Masyarakat

Hasil kajian menginformasikan bahwa kegiatan COREMAP belum memberikan dampak ekonomi pada masyarakat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, karena belum turunnya dana bergulir (seed fund) untuk kegiatan ekonomi penduduk (UEP) di Desa Mola Selatan, dan baru turunnya dana bergulir di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan COREMAP belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat.

- **Kecenderungan Perubahan Pendapatan**

Hasil kajian menginformasikan, meskipun bukan hasil langsung dari kegiatan COREMAP, pendapatan per kapita penduduk Wakatobi mengalami peningkatan sebesar 49 persen, dari Rp 132.711 per bulan tahun 2006 menjadi Rp 197.720 per bulan tahun 2008. Pendapatan per kapita ini berada di atas garis kemiskinan Provinsi Sultra tahun 2006 (sebanyak Rp 172.995 per bulan) dan Kabupaten Wakatobi (Rp 151.941 per bulan). Peningkatan pendapatan per kapita bervariasi antar lokasi dengan pendapatan tertinggi terdapat di Kelurahan Wandoka yaitu sebanyak 66,9 persen dan pendapatan terendah terdapat di Desa Mola Selatan, hanya sebanyak 28,1 persen.

Pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan juga mengalami kenaikan sebanyak 49,6 persen dalam kurun dua tahun, dari Rp 598.522 tahun 2006 menjadi Rp 895.489 tahun 2008. Peningkatan rata-rata pendapatan bervariasi antar lokasi, persentase tertinggi terdapat pada rumah tangga di Desa Waha yaitu sebanyak 61,7 persen dan yang terendah terdapat pada rumah tangga di Desa Mola Selatan, sedangkan rumah tangga di Kelurahan Wandoka (54,3 persen) berada diantara pendapatan rumah tangga di kedua lokasi ini.

Peningkatan pendapatan rumah tangga bervariasi menurut lapangan pekerjaan. Peningkatan pendapatan rumah tangga tertinggi mencapai hampir 200 persen terdapat pada rumah tangga yang bekerja di pengolahan/industri rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan yang menjadi fokus kegiatan COREMAP,

persentasenya jauh lebih kecil yaitu mencapai 70,4 persen. Persentase ini juga lebih kecil dari kenaikan pendapatan rumah tangga yang bekerja di bangunan (sebanyak 89 persen). Keadaan ini dapat dipahami karena Kabupaten Wakatobi, khususnya Pulau Wangi-Wangi yang merupakan lokasi ibukota kabupaten, sedang melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas perkantoran dan kebutuhan sebagai ibukota dan sebagai kabupaten yang baru mekar.

Kenaikan pendapatan rumah tangga, jika dilihat dari distribusi menurut besar pendapatan, terjadi pada sebagian kecil masyarakat yaitu kelompok rumah tangga berpendapatan di atas satu juta rupiah. Peningkatan tertinggi terdapat pada rumah tangga berpendapatan Rp 1.500.000 – Rp 1.999.000 per bulan, dari 3 persen tahun 2006 menjadi 12,4 persen tahun 2008. Pendapatan bervariasi antar lokasi, peningkatan pendapatan terendah ditemukan di Desa Waha. Keadaan ini dapat dipahami karena kegiatan ekonomi dan pembangunan di desa ini, baik jumlah dan frekuensinya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kegiatan di kedua desa/kelurahan lainnya. Sedangkan peningkatan tertinggi terdapat di Kelurahan Wandoka yang terletak di Kota Wanci yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di kabupaten Wakatobi.

Sebaliknya, rumah tangga berpendapatan rendah, kurang dari satu juta rupiah, proporsinya masih cukup besar meskipun cenderung mengalami penurunan dari 87,0 persen tahun 2006 menjadi 63,0 persen tahun 2008. Perubahan persentase rumah tangga berpendapatan rendah ini bervariasi antar lokasi, mengalami penurunan di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan dan sebaliknya mengalami peningkatan di Desa Waha. Penurunan persentase rumah tangga berpendapatan rendah terjadi sangat signifikan di Kelurahan Wandoka, berkaitan erat dengan ketersediaan sumber penghasilan (tambahan) dari kegiatan ekonomi dan pembangunan di ibukota kabupaten ini. Sebaliknya, proporsi rumah tangga berpendapatan kurang dari satu juta rupiah meningkat di Desa Waha, berarti semakin banyak rumah tangga berpendapatan rendah di desa ini.

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan di Wakatobi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp 537.253 tahun 2006 menjadi Rp 807.237 tahun 2008 atau naik sebesar 50,3 persen. Peningkatan pendapatan terjadi di ketiga lokasi kajian dengan besaran yang bervariasi antar lokasi. Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan ini berkaitan erat dengan meningkatnya harga hasil perikanan di Wakatobi.

Sebagian besar rumah tangga nelayan, meskipun pendapatan nelayan naik, termasuk dalam kelompok yang berpendapatan relatif rendah yaitu di bawah satu juta rupiah per bulan. Persentase pendapatan rumah tangga nelayan pada kelompok ini cenderung mengalami penurunan antara tahun 2006 dan tahun 2008, persentasenya bervariasi antar lokasi. Persentase rumah tangga nelayan di Desa Mola Selatan mencapai 89 persen tahun 2006 turun menjadi 68,5 persen tahun 2008, nelayan di Kelurahan Wandoka mencapai 88 persen tahun 2006 turun menjadi 66,3 persen tahun 2008, dan nelayan di Desa Waha mencapai 80,0 persen tahun 2006 menjadi 74,1 persen tahun 2008. Gambaran ini cukup menggembirakan karena mengindikasikan turunnya persentase rumah tangga nelayan yang berpenghasilan relatif rendah. Namun penurunan persentase ini, jika diperhatikan menurut kelompok pendapatan, tidak terjadi di semua lokasi. Hasil kajian mengungkapkan bahwa rumah tangga nelayan di Desa Mola Selatan menunjukkan kondisi yang sebaliknya, persentase rumah tangga berpendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan meningkat sebanyak 7,5 persen. Demikian juga dengan pendapatan nelayan Desa Waha yang berpendapatan antara Rp 500.000 – Rp 999.000 per bulan juga naik sangat tajam, lebih dari dua kali lipat, dari 25 persen tahun 2006 menjadi 55,6 persen tahun 2008. Keadaan ini perlu mendapat perhatian serius karena persentase rumah tangga yang berpendapatan kurang dari satu juta rupiah persentasenya masih sangat besar, lebih dari separuh dari total rumah tangga nelayan di Wakatobi.

Hasil kajian juga menginformasikan pendapatan rumah tangga nelayan bervariasi dan mengalami peningkatan pada musim gelombang lemah, pancaroba dan gelombang kuat pada tahun 2006

sampai tahun 2008. Rumah tangga nelayan memperoleh pendapatan terbanyak pada musim gelombang lemah atau musim teduh. Pendapatan pada musim ini meningkat cukup signifikan yaitu sebanyak 67,5 persen dalam kurun dua tahun. Sebaliknya, pendapatan nelayan terendah diperoleh pada musim gelombang kuat, disebabkan oleh sebagian besar nelayan tidak dapat melaut karena keterbatasan armada tangkap. Meskipun demikian, pendapatan nelayan pada musim ini juga mengalami kenaikan sebanyak 60,5 persen. Sedangkan pendapatan nelayan pada musim pancaroba jumlahnya berada diantara pendapatan pada musim gelombang lemah dan gelombang kuat. Pendapatan nelayan juga meningkat, tetapi persentasenya paling rendah yaitu 57,6 persen.

Peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi COREMAP ternyata hampir sama dengan peningkatan pendapatan normal penduduk ditingkat Kabupaten Wakatobi tahun 2003-2005. Peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi COREMAP terutama dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro tingkat kabupaten, bukan oleh kegiatan COREMAP yang implementasinya belum dilakukan secara optimal. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang menjadi andalan COREMAP untuk meningkatkan pendapatan masyarakat baru saja dimulai di Desa Waha dan Kelurahan Wandokan dan sebaliknya belum berjalan di Desa Mola Selatan pada awal Mei 2008. Karena itu usaha ini belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Meskipun mengalami peningkatan pendapatan, secara umum tingkat kesejahteraan penduduk tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian penduduk merasa lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar rumah tangga di kabupaten ini.

5.4. Rekomendasi

Pengelolaan di Tingkat Kabupaten

- Pentingnya pelembagaan COREMAP dengan cara meningkatkan peran komponen-komponen COREMAP, termasuk PA, CBM, MCS dan CRITC, di lokasi-lokasi COREMAP, bukan hanya

kegiatan dan koordinasi komponen-komponen di tingkat kabupaten saja.

- Pentingnya pembimbingan dan pemantauan pengelola COREMAP, terutama komponen-komponen, kegiatan COREMAP yang dilakukan oleh LPSTK, LKM, Pokmas dan Pokmaswas di tingkat lokasi.
- Pentingnya mengurangi dominasi PMU dan Seto dalam pembuatan RPTK dan sebaliknya memberikan bimbingan yang lebih terarah dan intensif kepada LPSTK dan LKM dalam proses pembuatan RPTK. Dengan demikian pengurus LPSTK, LKM dan Pokmas/pokmaswas dapat menyusun dan memahami rencana pengelolaan terumbu karang yang dilakukan sendiri bersama-sama masyarakat di daerah masing-masing.
- Pentingnya PMU, terutama komponen-komponen COREMAP, mengarahkan pelaksanaan kegiatan COREMAP di lokasi sesuai dengan RPTK, bukan kegiatan-kegiatan 'insidental' di luar rencana yang telah disusun.
- Pentingnya kejelasan PMU tentang dana *seed fund* dan *village grant*, tahapan-tahapan pendistribusian dana dan mekanisme pengelolaannya kepada pengelola COREMAP di tingkat lokasi agar tidak membingungkan dan menimbulkan kecurigaan pengurus LPSTK, LKM, Pokmas/pokmaswas, dan masyarakat.

Pengelolaan di Tingkat Lokasi

- Pentingnya meningkatkan peran LPSTK dan LKM dalam penyusunan RPTK agar mereka memahami rencana pengelolaan yang sudah disepakati bersama masyarakat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPTK
- Pentingnya menyepakati lokasi DPL di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha agar tidak menimbulkan konflik dalam pengelolaan terumbu karang dengan masyarakat di kedua lokasi ini.

- Pentingnya meningkatkan peran Seto, CF dan MD dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP di semua lokasi, kecuali MD di Desa Waha.
- Pentingnya meningkatkan sosialisasi tentang COREMAP, termasuk tujuan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, proses dan mekanisme pelaksanaannya kepada anggota pokmas/pokmaswas dan masyarakat di ketiga lokasi kajian.
- Pentingnya mendistribusikan dana *seed fund* untuk melaksanakan kegiatan UEP di Desa Mola Selatan, seperti di Desa Waha dan Kelurahan Wandoka, agar masyarakat di desa ini mempunyai alternatif kegiatan dan tidak kembali melakukan praktek pembiusan dan pengeboman
- Pentingnya keterlibatan anggota pokmas/kelompok jender/pokmaswas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan COREMAP di masing-masing lokasi.
- Pentingnya transparansi dalam pembentukan anggota pokmas, terutama di Kelurahan Wandoka yang ditentukan secara sepihak oleh Ketua Lingkungan.
- Pentingnya komunikasi, penjelasan dan transparansi mengenai kegiatan-kegiatan COREMAP (termasuk sistem yang berlaku, pendanaan dan proses pelaksanaan) untuk mengurangi berbagai kecurigaan anggota pokmas dan masyarakat terhadap pengurus COREMAP di tingkat lokasi dan kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Wakatobi. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi 2006-2011*. Wanci: Bappeda Kabupaten Wakatobi.
- BPS Kabupaten Wakatobi. 2006. *Wakatobi Dalam Angka 2005/2006*. Wanci: Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi
- BPS Kabupaten Wakatobi. 2006. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wakatobi 2003-2005*. Wanci: Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi
- BPS Kabupaten Wakatobi. 2007. *Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2006/2007*. Wanci: BPS Kabupaten Wakatobi.
- BPS. 2007. *Kecamatan Wangi-Wangi dalam Angka Tahun 2006/2007*. Wanci: BPS Kabupaten Wakatobi.
- BPS. 2007. *Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam Angka Tahun 2006/2007*. Wanci: BPS Kabupaten Wakatobi.
- BPS. 2008. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2007. *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006, Buku II : Kabupaten*. Jakarta: BPS.
- Cahyadi, Rusli. 2008. Menanam Singkong untuk *Kasuami* di Kepulauan Wakatobi. Dalam *Cerita dari Ladang*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Forum Kajian Antropologi Indonesia.

- Clifton, Julian. 2003. Prospects for co-management in Indonesia's marine protected areas. *Marine Policy* No. 27 (2003) hlm. 389–395.
- Coles, Tim; *at al.* 2007. *Suggestions For Developing Tourism In The Wakatobi Islands*.
- Donahue, Mark. 1999. *A Grammar of Tukang Besi*. Mouton de Gruyter.
- DRSP, USAID & PERCIK. Tt. Proses Dan Implikasi Sosial-Politik Pemekaran: Studi Kasus Di Sambas Dan Buton
- Elliott, Gina; *at al.* 2001. Community Participation in Marine Protected Area Management: Wakatobi National Park, Sulawesi, Indonesia. *Coastal Management*, 29:295–316.
- Gomes, Alberto G. 1993. Konfrontasi dan Kontinuitas: Produksi Komoditas Sederhana di Kalangan Orang Asli. Dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes (ed.) *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haapkylä, J.; A.S. Seymour; J. Trebilco and D. Smith. 2007. Coral disease prevalence and coral health in the Wakatobi Marine Park, south-east Sulawesi, Indonesia. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (2007)* 87, 403–414.
- Hadara, Ali. 2006. Dinamika Pelayaran Tradisional Orang Buton Kepulauan Tukang Besi. Makalah disampaikan pada *Konferensi Nasional Sejarah VIII*, Jakarta, 14-17 November 2006.
- Haylor, G; *et al.* 2003. *Improving Coastal Livelihoods Through Sustainable Aquaculture Practices*. A Report To The Collaborative Apec Grouper Research And Development Network (Fwg/01/2001).

- Hidayati, Deny., Ngadi., dan Daliyo. 2007. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II: Kasus Kabupaten Wakatobi*. Jakarta: CRITC – LIPI.
- Hidayati, Deny. 2003. Coral reef rehabilitation and management program in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Surfing Reef Symposium*, Raglan, New Zealand, June 22-25, 2003. p303-319.
- Hidayati, Deny., dan, Laksmi, Rahmawati. 2002. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia: Studi Kasus Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton*. Jakarta: COREMAP – LIPI.
- http://www.idrap.or.id/id/consrv_wakatobi.htm. Profil Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. 28 Maret 2006.
- <http://sultra.bps.go.id/wakatobi/?nav>.
- http://www.kendarikota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=130 KDA - Keuangan dan Harga-Harga
- La Ode Hajifu dan Oktawinus. 2006. Potensi Perikanan Dan Sumberdaya Kelautan di Kabupaten Wakatobi, *Presentasi Dinas Kelautan Perikanan Kab. Wakatobi Dalam Rangka Pameran Perikanan Menyambut Pembukaan MTQ Nasional di Kendari 29 Juli 2006*. Wanci: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
- May, Duncan. 2005. Folk Taxonomy of Reef Fish and the Value of Participatory Monitoring in Wakatobi National Park, Southeast Sulawesi, Indonesia dalam Buletin *TRADITIONAL Marine Resource Management and Knowledge* Number 18 — August 2005.
- Pedju, Mirza, *et.al.* 2004. *Report on a Baseline Survey in Wakatobi Marine National Park to Assess Resource Status, Use and Perception*. Wanci: Wakatobi National Park - Joint Program Office.

- Pemda Kabupaten Wakatobi. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Wakatobi 2006-2011*. Wanci: Pemda Kabupaten Wakatobi.
- Sinar Harapan. 2008. *Suku Tukang Besi Berebut Parang, Mengakrabi Lautan*. Senin, 28 Juli 2008.
- Smart, Oliver Hunter. 2005. A Feasibility Study of Phycoculture as a Sustainable Livelihood in Kaledupa, Indonesia. BSc *Undergraduate Dissertation in Geography*.

Lampiran 4.1.
 Statistik pendapatan penduduk di Wakatobi tahun 2006 dan 2008

Pendapatan per bulan	Desa Mola Selatan		Desa Waha		Kelurahan Wandoka		Total	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Rata-rata Rumah Tangga (RT)	618.028	856.483	739.200	1.195.405	486.805	750.964	598.522	895.489
Median Pendapatan RT	548.333	600.000	460.000	1.150.000	339.167	439.166	453.333	608.333
Minimum pendapatan RT	43.333	41.666	75.000	116.666	5.000	50.000	5.000	41.666
Maksimum pendapatan RT	2.016.667	4.150.000	4.583.333	3.295.000	2.408.333	5.966.666	4.583.333	5.966.666
Per kapita	137.371	175.956	180.667	296.159	97.412	162606	132.711	197.720

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK – LIPI (2008)*

Lampiran 4.2.

Perkembangan Pendapatan Penduduk, menurut Desa, Kabupaten Wakatobi, 2006 dan 2008 (persen)

NO	Pendapatan per bulan	Desa Mola Selatan	Desa Waha	Kelurahan Wandoka	Total
1	Rata-rata Rumah Tangga (RT)	38,6	61,7	54,3	49,6
2	Median Pendapatan RT	9,4	150,0	29,5	34,2
3	Minimum pendapatan RT	(3,8)	55,6	900,0	733,3
4	Maksimum pendapatan RT	105,8	(28,1)	147,8	30,2
5	Per kapita	28,1	63,9	66,9	49,0

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2006 dan 2008)

Lampiran 4.3.

Statistik pendapatan penduduk di Wakatobi menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2008

	Jumlah Responden	Pendapatan Maksimum	Pendapatan Rata-Rata	Pendapatan Minimum
Perikanan tangkap	99	1.503.333	233.047	5.625
Pertanian tanaman pangan	31	360.000	117.906	20.000
Pertambangan	9	400.000	229.027	120.000
Industri pengolahan	1	40.741	40.741	40.741
Perdagangan	7	225.000	108.438	20.000
Angkutan	2	380.000	346.000	312.000
Jasa	8	480.000	176.710	13.889
Perikanan budidaya	1	62.500	62.500	62.500
Bangunan	8	579.167	182.736	63.750
Lain-lain	4	250.000	98.667	16.667

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2008)

Lampiran 4.4.

Statistik pendapatan penduduk di Wakatobi menurut lokasi dan jenis pendapata, tahun 2006 dan 2008

Lokasi/jenis pendapatan	Tahun		Perkembangan (%)
	2006	2008	
<i>Mola Selatan</i>			
Rata-Rata	662.189	817.034	23,38
Median	582.000	533.333	(8,36)
Minimum	43.333	45.000	3,85
Maksimum	2.016.667	3.800.000	88,43
<i>Wandoka</i>			
Rata-Rata	408.333	746.812	82,89
Median	266.667	200.000	(25,00)
Minimum	41.667	11.667	(72,00)
Maksimum	1.858.333	5.166.667	178,03
<i>Waha</i>			
Rata-Rata	553.925	835.230	50,78
Median	350.833	811.667	131,35
Minimum	69.167	13.333	(80,72)
Maksimum	4.500.000	3.265.000	(27,44)

Sumber: *Data Primer. Survei Aspek Sosial Terumbu Karang*, PPK – LIPI (2006 dan 2008)

